LAPORAN AKHIR PENELITIAN

DAMPAK SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)- BBM PADA KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR - JAWA BARAT

OLEH :
HERIEN PUSPITAWATI
TIN HERAWATI
MA'MUN SARMA

KERJASAMA
DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN (IKK), FEMA- IPB
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, RI
2006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penelitian 'Dampak Subsidi Langsung Tunai (SLT)- BBM pada Kesejahteraan keluarga Miskin di Bogor, Jawa Barat dapat terlaksana berkat kerjasama Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), FEMA- IPB dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia. Peneliti mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, RI atas kepercayaan dan amanahnya dalam memberikan kesempatan pada Departemen IKK – FEMA-IPB untuk melakukan penelitian dengan issue mutakhir ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa serta semua responden atas bantuan dalam memberikan data dan informasi demi kelancaran penelitian ini.

Tim peneliti:

Ketua Peneliti:	Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.
Anggota Peneliti:	Tin Herawati, SP., M.Si.
	Dr. Ir. Ma'mun Sarma, M.S., M.Ec.
Asisten Lapang:	Anne Suci Rejeki, SP
	Hilda Agustina, SP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemiskinan masih menjadi masalah pokok bagi Bangsa Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada Tahun 1997. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) secara nominal diketahui terjadi penurunan angka penduduk miskin, dari 38,4 juta jiwa pada tahun 2002, menjadi 37,3 juta jiwa (17,4%) pada tahun 2003, dan menjadi 36 juta jiwa keluarga miskin pada tahun 2004 yang tersebar di 31 propinsi, terdiri dari 10 juta kepala keluarga miskin dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 50.000 per bulan, dan 4 juta kepala keluarga fakir dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 130.000 per bulan (Republika, 3 Oktober 2005).

Strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan mengacu pada *Millenium Development Goals* (MDGs). Usaha-usaha baik pemerintah maupun non pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah banyak dilakukan dan melibatkan dana dari dalam maupun luar negeri yang sangat besar. Sebagai contoh, dana untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2004 mencapai 18 triliun rupiah yang tersebar di berbagai departemen (Tempo interaktif, 28 April 2004). Usaha Pemerintah Indonesia juga tercermin dari disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang digunakan sebagai panduan yang memberi arah kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan untuk sektoral, regional dan lokal dalam jangka segera, pendek, menengah dan panjang (TKP3KPK, Kementrian Koordinator Bidang Kesra, 2004).

Penanggulangan masalah kemiskinan yang belum terselesaikan pada tahun 2004, menjadi semakin parah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada. Tanggal 1 Oktober 2005, yaitu meningkatkan penduduk miskin menjadi 15,7 juta kepala keluarga atau sebesar 52 juta orang (Republika, 28 Oktober 2005). Strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan akibat kenaikan harga BBM tersebut di atas adalah pelaksanaan Program pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT)- BBM. Program diberikan kepada keluarga miskin tanpa syarat sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga selama bulan Oktober-Desember 2005 sejumlah Rp 5 triliun. Kriteria penerima kartu KKB adalah keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan penghasilan Rp 150.000 per bulan (Republika, 5 Oktober 2005).

Secara khusus, studi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan verifikasi secara sampling sederhana mengenai kriteria rumahtangga miskin penerima Program SLT-BBM sesuai dengan kriteria BPS.
2. Menganalisa Pendapatan dan Pengeluaran rumahtangga penerima Program SLT-BBM (sumber pendapatan, siapa yang bekerja, biaya kebutuhan dasar rumahtangga, pola pengeluaran rumahtangga) dengan menggunakan alur bagan " *Flow of resources to and from the household*"
3. Menguraikan dan menganalisa permasalahan kehidupan rumahtangga (masalah sosial, ekonomi, pembagian peran dan tanggungjawab anggota keluarga, hubungan antar anggota keluarga/ dukungan sosial antar anggota keluarga, hubungan dengan keluarga besar, hubungan dengan tetangga) dengan menggunakan proses analisa mulai dari identifikasi masalah, penyebab masalah, strategi pemecahan masalah / *coping survival strategies/ practical strategies*)
4. Menguraikan dan menganalisa secara global manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi rumahtangga miskin dengan menggunakan analisa SEAGA (*Socio Economic and Gender Analysis*), ditinjau dari analisa tingkat mikro/field analysis (situasi dan kondisi rumahtangga miskin, aktivitas ekonomi).
5. Melakukan analisa gender (*Intra-household gender analysis*) di dalam rumahtangga berkaitan dengan pemberian SLT (yang berkaitan dengan siapa yang mengambil uang SLT, siapa yang memegang dan mengontrol uang tersebut (*gender roles in resources' access and control*), siapa yang memutuskan dalam penggunaan uang tersebut, alur pengeluaran uang tunai / *cash flow path*, dan manfaat yang dirasakan oleh keluarga)

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang memperhatikan kebijakan bagi rakyat miskin, baik itu pihak Bappenas, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, para civitas akademik maupun para pengambil kebijakan di tingkat nasional. Disamping itu diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan kebijakan masalah kemiskinan di masa yang akan datang.

Output dari penelitian ini adalah berbentuk dokumen yang berisi berbagai hasil temuan di lapangan baik dalam tinjauan skala mikro, dan meso, yang meliputi informasi sebagai berikut:

1. Pemetaan penduduk miskin penerima SLT
2. Ketepatan target keluarga miskin dengan sampling purposive sesuai dengan kriteria penerima Program SLT.
3. Alur bagan " *Flow of resources to and from the household*" termasuk alur pemanfaatan uang Rp 300.000 dari SLT
4. Analisa permasalahan kehidupan rumahtangga berikut *survival strategies*
5. Analisa manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) BBM bagi rumahtangga miskin dengan menggunakan analisa SEAGA

Penelitian dilakukan di Kota Bogor (Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan), dan Kabupaten Bogor (Kecamatan Ciomas), Propinsi Jawa Barat. Pengambilan data dilakukan selama 1-2 bulan yaitu pada bulan Januari-Februari 2004. Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu diambil secara sengaja (*pusposive*) dengan salah satunya mempertimbangkan faktor lokasi berdasarkan data keluarga miskin terbanyak yang mendapatkan SLT BBM di Kota Bogor.

Rumahtangga yang dijadikan contoh penelitian dipilih secara purposive dari lokasi yang terbanyak menerima SLT. Berdasarkan data dari Kantor Pos sebagai distributor SLT, maka untuk wilayah Kota Bogor dipilih lokasi Kecamatan Bogor Barat yang terbanyak cakupan pelayanannya, yaitu meliputi 10,458 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 3,137 milyar dan kecamatan Bogor Selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor dipilih wilayah Kecamatan Ciomas yang cakupan pelayanannya cukup banyak, yaitu meliputi 21.105 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 6,332 milyar. Jumlah sampel yang dianalisa secara total adalah 168 keluarga (112 KK adalah laki-laki, dan 56 KK adalah perempuan).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar setengah dari jumlah rumahtangga miskin dinyatakan salah sasaran atau tidak layak mendapatkan dana SLT. Rumahtangga contoh yang memenuhi 9 kriteria atau lebih dari aturan yang ditetapkan oleh BPS (2005) hanya sebesar 45 persen saja. Selama observasi di tempat tinggal keluarga contoh dalam rangka verifikasi kriteria kemiskinan, ditemui beberapa aset seperti sepeda motor, audio visual, dan rumah yang cukup baik dan nyaman. Memang secara visual, terlihat bahwa ada sebagian dari responden yang seharusnya tidak layak untuk menerima dana SLT. Namun demikian, kalau ditinjau dari sudut besarnya pendapatan yang diperoleh, rata-rata pendapatan keluarga contoh per bulan sebagian besar (75%) di bawah Rp 750.000,- untuk KK laki-laki dan di bawah Rp 500.000,- untuk KK perempuan. Apalagi kalau dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan, maka sebanyak 60 persen keluarga contoh berada di bawah Rp 100.000,- atau di bawah garis kemiskinan, yaitu untuk Kota Bogor Rp 133.803 per kapita per bulan dan Kabupaten Bogor Rp 105 588 per kapita per bulan (Garis Kemiskinan tahun 2003).

Program SLT dirasakan banyak manfaatnya bagi keluarga miskin. Hal ini terlihat dari aliran dana SLT sejumlah Rp 300.000 yang diterima oleh responden. Berdasarkan " *Flow of resources to and from the household*", diketahui bahwa sekitar setengah dari jumlah dana SLT diprioritaskan untuk kebutuhan pangan pokok (sesuai dengan tahapan kebutuhan Maslow). Selanjutnya, kurang dari sepertiganya dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan rokok. Bahkan sebagian lagi dialokasikan untuk membayar hutang atau untuk modal usaha. Sayangnya, dana SLT yang diperuntukkan untuk modal usaha adalah sangat kecil, yaitu kurang dari lima persen. Sepertinya keluarga contoh memang sangat terbatas sumberdaya keuangannya, sehingga dana SLT ini langsung dialokasikan untuk kebutuhan pokok saja. Hal ini juga terbukti apabila dilihat dari jangka waktu lamanya dana SLT habis, yaitu kurang dari seminggu.

Apabila dilihat dari pemrakarsa dalam melakukan *coping strategy* atau kiat-kiat dalam mengatasi kesulitan hidup, maka terbukti bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka keterlibatan istri saja yang mempunyai prakarsa dalam *survival strategies* adalah kurang dari setengah jumlah contoh, sedangkan keterlibatan bersama antara istri dan suami adalah sekitar setengahnya. Adapun keterlibatan suami saja dalam berprakarsa agar keluarganya tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya hanya kurang dari lima persen. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa peran perempuan dalam bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup sehari-hari adalah sangat dominan dan penting.

Masalah terbesar yang diakui oleh keluarga contoh adalah berujung dari masalah ekonomi. Oleh karena itu strategi pemecahan yang dilakukan terdiri atas dua cara. Strategi pertama dilakukan dengan cara berhemat atau mengurangi pengaluaran-pengeluaran untuk biaya pangan, transport, dan kesehatan, atau dengan cara mensubstitusi penggunaan bahan bakar untuk memasak dari minyak tanah ke kayu bakar yang lebih murah. Strategi kedua adalah dengan cara menambah jumlah ketersediaan sumberdaya keluarga dengan cara bekerja lembur, menjual aset, menggadaikan barang, atau berhutang.

Analisa berikutnya adalah analisa gender (*Intra-household gender analysis*) di dalam rumahtangga yang berkaitan dengan pemberian SLT. Konsisten dengan hasil sebelumnya bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran perempuan sangat dominan dan penting dalam bertanggung jawab mengenai kelangsungan hidup keluarga sehari-hari di sektor manajemen kegiatan domestik rumahtangga.

Berdasarkan analisa SEAGA (*Socio Economic and Gender Analysis*) terhadap manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi rumahtangga miskin, maka diketahui bahwa pada tingkat mikro/ *field analysis*, peran perempuan dan laki-laki di dalam rumahtangga adalah setara. Memang telah dibuktikan bahwa peran perempuan atau istri lebih dominan dalam pembagian kerja pada aktivitas domestik, pengaturan uang SLT, mengatur uang keluarga, menyediakan makanan. Sedangkan peran suami atau laki-laki lebih bertanggung jawab pada aktivitas publik/ ekonomi. Namun demikian, ditemukan bukti bahwa ada join peran antara laki-laki dan perempuan yang seimbang di dalam pembagian peran di dalam keluarga, yaitu bersama-sama bertanggung jawab pada pengasuhan dan pendidikan anak.

Pada tingkat meso atau tingkat masyarakat (*community level*), dampak dana BLT dapat dinikmati atau benefited baik bagi laki-laki maupun perempuan. Telah dibuktikan bahwa laki-laki dan perempuan bersama-sama mempunyai akses, kontrol dan benefit dari Program SLT. Secara Ekonomi baik KK laki-laki maupun KK perempuan mendapatkan tambahan dana segar untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Secara sosial baik laki-laki maupun perempuan dapat berinteraksi dengan lebih baik setelah mendapatkan dana SLT, dan secara mental merasa tingkat stresnya menurun sesaat setelah mendapatkan dana SLT.

Pada tingkat meso atau tingkat masyayarakat (*community level*), baik laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. *Social capital* yang ada di tingkat desa dan kecamatan mendapatkan respon positif dari para keluarga miskin, baik KK laki-laki maupun KK perempuan, terutama kegiatan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan analisa *benefit cost rasio* terhadap program SLT bagi keluarga miskin di Kota/ Kabupaten Bogor, maka diketahui bahwa *social cost* yang harus ditanggung baik oleh unit keluarga/ rumahtangga dan oleh Negara dalam jangka panjang adalah lebih lesar dari pada benefit sesaat yang dirasakan oleh keluarga miskin. ***Lesson learn*** dari Program SLT berdasarkan analisa *Benefit Cost Rasio* terhadap Pemberdayaan Masyarakat diuraikan sebagai berikut.

Benefit yang dirasakan oleh keluarga miskin di Kota/Kabupaten Bogor adalah bahwa keluarga merasakan manfaat dana segar SLT; secara mental, stres keluarga terkurangi; dana dapat digunakan untuk keperluan pangan, perumahan, pendidikan, keseharan, membayar hutang, modal, memberi saudara/anak, zakat, dll; dan perempuan merasa beban beratnya berkurang, serta SLT dapat meningkatkan interaksi antar anggota keluarga (*intra-family*) dan antar keluarga (*inter-families*). Namun biaya social yang harus ditanggung dari sisi mikro pihak keluarga miskin adalah Pemberian SLT dalam jangka waktu yang lama akan melemahkan motivasi bekerja dan menurunkan kreativitas dalam melakukan *survival strategies* dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan biaya sosial yang harus ditanggung dari sisi makro pihak Negara RI adalah bahwa dana SLT berasal dari hutang luar negeri yang harus dibayar dalam jangka waktu panjang sehingga dapat menjadikan negara kita *dependent* terhadap hutang luar negeri.

Sebagai kesimpulan didapatkan hasil bahwa apabila dilihat dari pemrakarsa dalam melakukan *coping strategy* atau kiat-kiat dalam mengatasi kesulitan hidup, maka terbukti bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka keterlibatan istri saja yang mempunyai prakarsa dalam *survival strategy* adalah kurang dari setengah jumlah contoh, sedangkan keterlibatan bersama antara istri dan suami adalah sekitar setengahnya. Adapun keterlibatan suami saja dalam berprakarsa agar keluarganya tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya hanya kurang dari lima persen saja. Dengan demikian membuktikan bahwa peran perempuan dalam bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup sehari-hari adalah sangat dominan dan penting.

Masalah terbesar yang diakui oleh keluarga contoh adalah berujung dari masalah ekonomi. Oleh karena itu strategi pemecahan yang dilakukan terdiri atas dua cara. Strategi pertama dilakukan dengan cara berhemat atau mengurangi pengaluaran-pengeluaran untuk biaya pangan, transport, dan kesehatan, atau dengan cara mensubstitusi penggunaan bahan baker untuk memasak dari minyak tanah ke kayu baker yang lebih murah. Strategi kedua adalah dengan cara menambah jumlah ketersediaan sumberdaya keluarga dengan cara bekerja lembur, menjual asset, menggadaikan barang, atau berhutang. Perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran perempuan sangat dominan dan penting dalam bertanggung jawab mengenai kelangsungan hidup keluarga sehari-hari di sektor manajemen kegiatan domestik rumahtangga.

Dengan demikian telah dibuktikan bahwa benefit yang dirasakan oleh keluarga hanya sesaat saja, yaitu kurang dari waktu seminggu dana SLT sudah habis, sedangkan setelah seminggu keluarga penerima SLT kembali miskin. Meskipun para responden menginginkan adanya Program SLT ini diberikan selamanya (karena menurut keluarga miskin sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari), namun mengingat benefit yang dirasakan hanya sesaat, sedangkan biaya sosial dan biaya ekonomi hutang luar negeri yang ditanggung oleh seluruh Bangsa Indonesia adalah dalam jangka waktu panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar pemberian subsidi untuk rakyat harus dipaketkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, baik berkaitan dengan *human investment* atau aktivitas ekonomi, agar uang yang disalurkan ke rakyat dapat mempunyai *multiplier effect* di kemudian hari. Secara detil, penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bantuan SLT diberikan dalam bentuk lain, misalnya dikaitkan dengan human investment, seperti modal kerja berkelompok atau disalurkan ke keluarga miskin melalui institusi pendidikan dasar,
2. Untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya golongan *handicapp* disalurkan melalui balai latihan kerja khusus,
3. Untuk kelompok lanjut usia dan masyarakat tertinggal disalurkan melalui Departemen Sosial,
4. Untuk kelompok anak yatim disalurkan melalui Departemen Sosial.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah pokok bagi Bangsa Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi pada Tahun 1997. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) secara nominal diketahui terjadi penurunan angka penduduk miskin, dari 38,4 juta jiwa pada tahun 2002, menjadi 37,3 juta jiwa (17,4%) pada tahun 2003, dan menjadi 36 juta jiwa keluarga miskin pada tahun 2004 yang tersebar di 31 propinsi, terdiri dari 10 juta kepala keluarga miskin dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 150.000 per bulan, dan 4 juta kepala keluarga fakir dengan penghasilan rata-rata hingga Rp 130.000 per bulan (Republika, 3 Oktober 2005). Angka kemiskinan yang tertera pada data tersebut baru menunjukkan kemiskinan dari dimensi pengeluaran, padahal kemiskinan bersifat multidimensi baik dari segi kemiskinan sumberdaya manusia dan kemiskinan dari segi aspek budaya dan moral.

Strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan mengacu pada *Millenium Development Goals* (MDGs). Usaha-usaha baik pemerintah maupun non pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah banyak dilakukan dan melibatkan dana dari dalam maupun luar negeri yang sangat besar. Sebagai contoh, dana untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2004 mencapai 18 triliun rupiah yang tersebar di berbagai departemen (Tempo interaktif, 28 April 2004). Usaha Pemerintah Indonesia juga tercermin dari disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang digunakan sebagai panduan yang memberi arah kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan untuk sektoral, regional dan lokal dalam jangka segera, pendek, menengah dan panjang (TKP3KPK, Kementrian Koordinator Bidang Kesra, 2004).

Penanggulangan masalah kemiskinan yang belum terselesaikan pada tahun 2004, menjadi semakin parah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Tanggal 1 Oktober 2005, yaitu meningkatnya penduduk miskin menjadi 15,7 juta kepala keluarga atau sebesar 52 juta orang (Republika, 28 Oktober 2005). Strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan akibat kenaikan harga BBM tersebut di atas adalah pelaksanaan

Program pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT)- BBM. Program diberikan kepada keluarga miskin tanpa syarat sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga selama bulan Oktober-Desember 2005 sejumlah Rp 5 triliun. Kriteria penerima kartu KKB adalah keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan penghasilan Rp 150.000 per bulan (Republika, 5 Oktober 2005).

Berbagai fakta yang menunjukkan masalah kemiskinan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu menarik untuk dikaji lebih mendalam. Berkaitan dengan penyaluran SLT sebagai program pertama dalam pemberian uang tunai kepada keluarga miskin, berapa pertanyaan riset yang menarik diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Seberapa parahkah masalah kemiskinan di beberapa wilayah yang padat penduduk seperti di Bogor sebagai daerah sekitar ibukota akibat dari naiknya harga BBM?
- Strategi bertahan hidup macam apakah yang dilakukan oleh keluarga miskin dalam menanggulangi masalah kemiskinan ditinjau dari aspek gender?
- Bagaimana proses pendistribusian dan sosialisasi SLT di Kota dan Kabupaten Bogor?
- Manfaat apa yang dirasakan oleh keluarga penerima SLT? Digunakan untuk apa saja uang tersebut? Siapa yang mengelola uang tersebut?
- Apakah ada masalah atau konflik antar warga dalam pendistribusian SLT di daerah?

Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap manfaat SLT dan survival strategi keluarga miskin dalam menghadapi kesulitan hidup. Penelitian ini juga melihat pendapat sisi akademis dalam mengkaji baik buruknya kebijakan SLT bagi kelangsungan hidup rakyat miskin.

Perumusan Masalah

Masalah kemiskinan semakin memprihatinkan di Indonesia. Sebelum krisis ekonomi (1996) angka kemiskinan mencapai 11,3 persen atau 22,5 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan tepat sesudah krisis (1999) angka tersebut menjadi dua kali lipat, yaitu 24,2 persen. Tahun 2003 angka kemiskinan turun menjadi 17,4 persen (37,3 juta jiwa), tetapi masih lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum krisis ekonomi (BPS). Kriteria penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kkal Energi per kapita per hari , ditambah dengan nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling esensial.

Program pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT)- BBM merupakan program pemerintah dalam membantu rakyat miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut Meneg PPN/ Kepala Bappenas, Program SLT akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebelum kenaikan harga BBM, jumlah penduduk miskin mencapai 16,65 persen, namun setelah kenaikan harga BBM, kalau tanpa SLT jumlah kemiskinan dapat mencapai 22,33 persen dengan tiga skenario: (1) Seandainya SLT tersalurkan sempurna, yakni 28,4 persen masyarakat berpendidikan terendah, maka penduduk miskin turun menjadi 12,69 persen, (2) Bila SLT meleset sampai dengan 40%, jumlah penduduk miskin turun menjadi 14,75 persen, dan (3) Bila SLT meleset sampai dengan 60%, jumlah penduduk miskin turun menjadi 17,45 persen.

Selanjutnya Meneg PPN/ Kepala Bappenas mengklaim bahwa SLT adalah program terbesar di dunia karena mencakup 15,5 juta rumahtangga. Sampai dengan bulan Oktober telah tersalurkan kepada 10,2 juta rumahtangga dengan total dana yang didistribusikan secara nasional sebesar Rp 2,9 triliun dari Rp 4,5 triliun (Republika, 1 November 2005). Banyak berita di media massa yang menginformasikan tentang ketidaktepatan sasaran penerima SLT di daerah, diantaranya adanya penerima SLT yang bekerja sebagai PNS, dan adanya sebagian keluarga yang cukup mampu mendapatkan dana bantian SLT.

Sebagai contoh, untuk Kota Bogor distribusi Program SLT-BBM dilakukan melalui enam kantor bayar dengan jumlah jangkauan pelayanan mencakup 39.162 kepala keluarga dengan total penyaluran sejumlah Rp 11.748.600.000,- Diantara enam kantor pembayaran di Kota Bogor, wilayah Kecamatan Bogor Barat adalah yang terbanyak cakupan pelayanannya, yaitu meliputi 10,458 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 3,137 milyar, kemudian berturut-turut diikuti oleh kantor pembayaran wilayah Kecamatan Bogor Sukasari dan Bogor Selatan yang masing-masing melayani 8.531 dan 8.313 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 2,559 milyar dan Rp 2,494 milyar. Adapun jumlah Kartu Kompensasi BBM (KKB) yang ditarik meliputi 765 rumahtangga. Selanjutnya, jumlah rumahtangga miskin susulan di Kota Bogor adalah sebesar 31.506 kepala keluarga.

Sedangkan untuk Kabupaten Bogor distribusi Program SLT-BBM dilakukan melalui 15 kantor bayar dengan jangkauan pelayanan mencakup 149.028 kepala keluarga dengan total penyaluran sejumlah Rp 44.708.400.000,- Diantara 15 kantor pembayaran di Kabupaten Bogor, wilayah Kecamatan Cibungbulang adalah yang terbanyak cakupan pelayanannya, yaitu meliputi 21.105 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 6,332 milyar, kemudian berturut-turut diikuti oleh kantor pembayaran wilayah Kecamatan Cigombong dan Leuweliang yang masing-masing melayani 19.516 dan 19.376 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 5,855 milyar dan Rp 5,813 milyar.

Tujuan Penelitian

Mengingat semakin besarnya tantangan di masa depan, maka studi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) BBM pada rumahtangga miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk:

1. Melakukan verifikasi secara sampling sederhana mengenai kriteria rumahtangga miskin penerima Program SLT-BBM sesuai dengan kriteria BPS.
2. Menganalisa Pendapatan dan Pengeluaran rumahtangga penerima Program SLT-BBM (sumber pendapatan, siapa yang bekerja, biaya kebutuhan dasar rumahtangga, pola pengeluaran rumahtangga) dengan menggunakan alur bagan " *Flow of resources to and from the household*"
3. Menguraikan dan menganalisa permasalahan kehidupan rumahtangga (masalah sosial, ekonomi, pembagian peran dan tanggungjawab anggota keluarga, hubungan antar anggota keluarga/ dukungan sosial antar anggota keluarga, hubungan dengan keluarga besar, hubungan dengan tetangga) dengan menggunakan proses analisa mulai dari identifikasi

masalah, penyebab masalah, strategi pemecahan masalah / *coping survival strategies/ practical strategies*)

4. Menguraikan dan menganalisa secara global manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi rumahtangga miskin dengan menggunakan analisa SEAGA (*Socio Economic and Gender Analysis*), ditinjau dari analisa tingkat mikro/field analysis (situasi dan kondisi rumahtangga miskin, aktivitas ekonomi).
5. Melakukan analisa gender (*Intra-household gender analysis*) di dalam rumahtangga berkaitan dengan pemberian SLT (yang berkaitan dengan siapa yang mengambil uang SLT, siapa yang memegang dan mengontrol uang tersebut (*gender roles in resources' access and control*), siapa yang memutuskan dalam penggunaan uang tersebut, alur pengeluaran uang tunai / *cash flow path*, dan manfaat yang dirasakan oleh keluarga)

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang memperhatikan kebijakan bagi rakyat miskin, baik itu pihak Bappenas, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, para civitas akademik maupun para pengambil kebijakan di tingkat nasional. Disamping itu diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan kebijakan masalah kemiskinan di masa yang akan datang.

Output Penelitian

Output dari penelitian ini adalah berbentuk dokumen yang berisi berbagai hasil temuan di lapangan baik dalam tinjauan skala mikro, meso, maupun makro yang meliputi informasi sebagai berikut:

1. Pemetaan penduduk miskin penerima SLT
2. Ketepatan target keluarga miskin dengan sampling purposive sesuai dengan kriteria penerima Program SLT.
3. Alur bagan " *Flow of resources to and from the household*" termasuk alur pemanfaatan uang Rp 300.000 dari SLT
4. Analisa permasalahan kehidupan rumahtangga berikut *survival strategies*

5. Analisa manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) BBM bagi rumahtangga miskin dengan menggunakan analisa SEAGA

TINJAUAN PUSTAKA

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kenaikan harga BBM di Indonesia memang menimbulkan berbagai kontroversi. Adapun alasan pemerintah dalam menaikan harga BBM ini terdiri dari alasan ekonomi dan alasan sosial politik. Alasan ekonomi yang dikemukakan oleh Hasyim (2005) terdiri atas empat hal, yaitu pertama untuk menaikan pendapatan negara karena subsidi bisa memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, untuk melindungi industri dalam negri dalam rangka melawan kompetisi dari luar negri. Ketiga, untuk mendukung daya saing barang-barang yang diekspor dengan barang-barang negara lain di arena perdagangan internasional dan alasan keempat yaitu untuk menyesuaikan harga dengan perkembangan harga minyak dunia.

Sedangkan yang berkaitan dengan persoalan sosial politik terdiri dari tiga alasan, yaitu untuk mengatasi persoalan polusi, untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan dikarenakan pada pertimbangan politik pada saat itu (Hasyim 2005). Namun yang menjadi alasan utama kenaikan BBM yaitu untuk menekan besarnya jumlah subsidi BBM.

Pemberian subsidi pada harga jual BBM mengakibatkan rendahnya harga jual BBM sekaligus meningkatkan konsumsi BBM masyarakat sehingga subsidi dan ketergantungan terhadap import menjadi semakin besar. Di lain pihak rendahnya harga BBM tidak memberikan insentif yang cukup untuk menggali sekaligus menggunakan sumber energi alternatif. Besarnya selisih harga BBM dalam negeri dengan harga BBM luar negeri, mengakibatkan maraknya penyelundupan BBM diberbagai daerah sekaligus mengganggu jalannya roda perekonomian nasional karena kurangnya pasokan BBM di berbagai wilayah (Djalil 2005).

Subsidi seringkali menjadi pemicu konsumsi energi yang berlebihan dan juga sebagai sumber pemborosan, sehingga subsidi menguras anggaran yang besar bagi keuangan negara dan merupakan tekanan yang berat bagi pemerintah. Menurut

Hasyim (2005) dampak negatif dari subsidi adalah dapat merugikan masyarakat karena subsidi kemungkinan dapat berasal dari anggaran yang semula dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti untuk program kesehatan, pendidikan, sehingga porsi untuk peningkatan kesejahtraan tersebut berkurang.

Dampak kenaikan harga BBM dirasakan langsung oleh masyarakat menengah ke bawah di perkotaan, yaitu masyarakat yang mengalami stres sosial akibat semakin beratnya beban hidup, sedangkan pendapatannya tidak pernah bertambah. Sementara itu kebutuhan hidup tidak hanya terbatas pada makan dan minum saja melainkan dalam hal pendidikan anak dan biaya pemeliharaan kesehatan keluarga (Anonim 2005a).

Program Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Menurut Djalil (2005), sejak tahun 2000 pemerintah dengan persetujuan DPR telah memutuskan untuk menghentikan subsidi BBM secara bertahap. Pengalihan subsidi tersebut dialokasikan untuk program kompensasi yang diperuntukan bagi masyarakat miskin salah satunya yaitu pada tahun 2005 ini yaitu berupa Subsidi Langsung Tunai (SLT) dengan dialokasikannya dana sebesar Rp. 4,65 trilyun untuk pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000/ rumahtangga/ bulan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin. Djalil (2005) menjabarkan tentang tahap-tahap pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga, yaitu :

1. Pendataan keluarga miskin oleh BPS.
2. Daftar nama dan alamat diolah dan disimpan dalam *database*.
3. Nama dan alamat diberikan kepada PT Pos.
4. PT. Pos mencetak Kartu Pengenal (nama dan alamat, nomor identitas dan *bar code*).
5. Kartu yang telah dicetak diserahkan kembali ke BPS di tingkat Kabupaten/Kota.
6. BPS di tingkat Kabupaten/Kota bersama aparat di daerah dan pemuka masyarakat melakukan verifikasi dan membagikan Kartu Tanda Pengenal kepada keluarga miskin.
7. Pemegang kartu akan mengambil uang di kantor Pos.

Sedangkan rumah tangga yang berhak menerima SLT BBM adalah :

- Keluarga miskin hasil survei BPS.
- Menjaga persepsi bahwa garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang selama ini dikenal.
- Makanan setara 2.100 kilo kalori dan non makanan.
- Garis kemiskinan terukur.

Rumah tangga tersebut kemudian dikunjungi dan didata dengan menggunakan variabel sosial yang memiliki korelasi sangat kuat dengan ciri-ciri kemiskinan, melalui pertanyaan sebagai berikut:

- Luas dan jenis lantai bangunan.
- Jenis dinding bangunan.
- Fasilitas jamban/kakus.
- Sumber air minum.
- Sumber penerangan utama.
- Jenis bahan bakar untuk masak.
- Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu.
- Frekuensi makan dalam sehari.
- Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun.
- Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik.
- Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga.
- Pendidikan kepala rumah tangga.
- Kepemilikan *asset liquid* (minimum Rp.500 ribu).
- Anak usia sekolah yang putus sekolah.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya (BKKBN 1996). Kemiskinan sering diukur berdasarkan indikator-indikator yang melekat pada seorang individu atau sebuah rumah tangga. Menurut Pakpahan, Hermanto dan Taryoto (1995), kemiskinan sering digambarkan oleh satu atau kombinasi dari tingkat pendapatan yang rendah, tingkat kematian balita yang tinggi, tingkatt nutrisi rendah, kualitas perumahan yang buruk, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan yang buruk dan lain lain. Pengkategorian kemiskinan menurut indikator-indikator tersebut adalah upaya pengkategorian berdasarkan akibat (*consequences* atau *output*).

Indikator kemiskinan yang digunakan dalam data BKKBN ada lima, yaitu (1) beribadah secara rutin, (2) makan minimal dua kali sehari, (3) memiliki pakaian berbeda untuk setiap kegiatan, (4) jika ada anggota keluarga sakit diberi pengobatan modern, dan (5) bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. Sedangkan BPS menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Djalil (2005), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari babmu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Ada satu kriteria tambahan lagi, hanya tidak terdapat dalam leaflet bahan sosialisasi Departemen Komunikasi dan Informatika tentang kriteria rumah tangga miskin, yaitu rumah tangga yang tidak pernah menerima kredit usaha UKM/ KUKM setahun lalu.

BKKBN (1999) menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS)
2. Keluarga Sejahtera Tahap 1(KS-1)
3. Keluarga Sejahtera Tahap 2 (KS-2)
4. Keluarga Sejahtera Tahap 3 (KS-3)
5. Keluarga Sejahtera Tahap 3 plus (KS-3 plus)

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak dari ketidakmampuan-nya dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar yaitu spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Suatu keluarga akan berada pada tahap pra sejahtera jika belum memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut, pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau lebih per hari, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, bagian lantai yang terluas bukan dari tanah, dan anak sakit dan PUS ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.

Sedangkan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendapatan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar yang telah disebutkan di atas sudah terpenuhi, namun kebutuhan psikologis belum terpenuhi. Suatu keluarga dikatakan pada tahap sejahtera I jika belum dapat memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: melaksanakan ibadah agama, makan tiga kali atau lebih per hari, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian, lantai yang terluas bukan dari tanah, dan anak sakit/ PUS ber KB ke sarana kesehatan serta diberi obat/cara modern.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Untuk mengoperasionalkan ukuran kualitas keluarga seperti tersebut diatas telah dikembangkan 23 indikator Keluarga Sejahtera. Keluarga di-katakan sempurna (Keluarga Sejahtera III plus) apabila keseluruhan 23 indikator dapat dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan (BKKBN, 1996).

Keluarga dan Rumah Tangga

Istilah keluarga lebih sering dipakai di bidang sosiologi yang artinya menurut Undang-undang dan PP No. 21 dan 27 tahun 1994 dalam BKKBN (1996) merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan pengertian keluarga menurut Burgers dan Locke (Guhardja *et al.,* 1992) adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami dengan isteri) serta hubungan darah (orang tua dengan anak kandung) atau adopsi (anak angkat).

Sedangkan istilah rumahtangga merupakan unit terkecil dalam konsep ekonomi. Rice dan Tucher (Guhardja *et al.*, 1992) mengemukakan bahwa pengertian rumahtangga lebih luas daripada pengertian keluarga. Rumahtangga dapat terdiri atas beberapa keluarga. Kata rumahtangga menyiratkan suatu deskripsi tentang rumah, isi serta pengaturan yang ada di dalamnya tetapi kurang menyiratkan hubungan antar anggota yang mengisi rumah itu. BPS di Indonesia mendefinisikan rumah tangga sebagai sekelompok orang yang tinggal di bawah satu atap dan makan dari dapur yang sama sehingga rumahtangga dapat terdiri dari anggota keluarga dan bukan anggota keluarga (Guhardja *et al.,* 1992).

<u>Fungsi Keluarga</u>

Guhardja *et al.* (1992) mengemukakan bahwa keluarga bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota-anggotanya. Dengan demikian, pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan untuk mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang perlu tersedia, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan untuk pengembangan fisik dan mental.
b. Kebutuhan akan pendidikan formal, informal, dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental, emosional, dan spiritual.

Dalam rangka memantapkan fungsi-fungsi keluarga, maka perlu dijelaskan upaya atau paket-paket kegiatan yang perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga tersebut menurut BKKBN (1996) secara umum diarahkan sebagai berikut :

1. **Fungsi Keagamaan**, dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Fungsi Sosial Budaya,** memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
3. **Fungsi Cinta Kasih**, dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
4. **Fungsi Melindungi,** dimaksud untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
5. **Fungsi Reproduksi**, yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
6. **Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan,** memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya dimasa depan.
7. **Fungsi Ekonomi,** menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
8. **Fungsi Pembinaan Lingkungan,** memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai

daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja

Konsep yang sudah umum dalam masyarakat Indonesia tradisonal menyatakan bahwa peran yang paling wajar bagi wanita ialah peran menjadi ibu atau isteri di lingkungan rumahtangga dan apabila pada masa sekarang ini, perempuan yang bekerja di luar rumahtangga dan menghasilkan uang semata-mata itu karena terpaksa akibat dari tekanan ekonomi (Mudzhar, Alvi & Sadli 2001).

Pada beberapa penelitian tentang masalah peranan perempuan seperti ungkapan Sajogyo (1981) bahwa dalam keluarga dan rumahtangga, perempua pada dasarnya seringkali berperan ganda. Hal ini dicerminkan pertama-tama oleh peranannya sebagai ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumahtangga (masak, mengasuh anak, dan sebagainya), suatu pekerjaan produktif yang tidak langsung menghsilkan pendapatan, karena pekerjaan itu memungkinkan anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan penghasilan secara langsung (pencari nafkah). Lestari (1984a) menyatakan hal yang serupa yaitu terdapat beberapa penelitian mengenai keluarga inti yang pernah dilakukan bahwa dalam keluarga dan rumah tangga perempua pada dasarnya sering berperan ganda. Hal ini dicerminkan pertama oleh peranannya sebagai ibu rumahtangga dan yang kedua adalah sebagai pencari nafkah.

Hal serupa juga diungkapkan BPS (1998) bahwa sejumlah perempua banyak yang mengalami pergeseran peranannya sebagai perempua. Semula perempua lebih banyak yang mengurus rumahtangga saja, tetapi kini juga harus mencari nafkah karena menjadi tulang punggung keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Biasanya laki-laki menjalankan peranan sebagai pencari nafkah sehingga dianggap sebagai kepala keluarga atau rumahtangga yang berarti dianggap paling bertanggung jawab pencarian nafkah dalam keluarga. Namun karena terjadinya perubahan dalam struktur internal dalam keluarga atau ketika laki-laki tidak berfungsi dalam menjalankan peranan produktif, maka perempuanlah yang menjadi kepala keluarga atau rumahtangga.

Perempuan di sektor informal mengatakan bahwa semula tidak berniat bekerja di sektor informal, tetapi keadaanlah yang memaksa. Sebagian besar perempuan berupaya menutupi kekurangan kebutuhan keluarga karena penghasilan suami kecil atau tidak menentu (Djamal 1996). Menurut Surbakti (BPS, 1998) berdasarkan hasil survey rumahtangga menunjukan bahwa keadaan rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan umumnya tergolong sebagai rumahtangga yang rendah tingkat sosial ekonominya.

Pekerjaan Publik dan Pekerjaan Domestik

Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu kehidupan rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa yang lain oleh perempuan (UNFPA, BKKBN & Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI 2005). Kehidupan rumahtangga jika dillihat dari aktivitasnya terdiri atas dua unit pekerjaan, yaitu pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan pasar yaitu pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh upah di pasar tenaga kerja, sedangkan pekerjaan rumahtangga adalah pekerjaan yang dilakukan dalam rumahtangga yang berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya baik barang maupun jasa (Guhardja *et al.,* 1992).

Menurut Walker dan Woods (Guhardja *et al.*, 1992) mengemukakan bahwa aktivitas pekerjaan rumah tangga menurut jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis pekerjaan, yaitu:

1. Menyediakan makanan dan keperluan yang berhubungan dengan makanan tersebut, yaitu :
   - Berbelanja bahan makanan dan memasak makanan maupun minuman
   - Menyiapkan makanan dan keperluannya termasuk mencuci peralatan makan dan minum
2. Memenuhi kebutuhan non-makanan, yaitu :
   - Membersihkan dan memelihara rumah dan perlengkapannya termasuk perabot rumah tangga dan prasarana lain yang ada dalam rumah tangga
   - Mencuci pakaian dan perlengkapannya
   - Menyediakan air untuk mandi dan cuci anggota rumah tangga
3. Mengasuh dan merawat serta mendidik anak.

Menurut Wittemore dan Neil (Huffman, 1986), aktivitas pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh ibu yang berhubungan dengan waktu yang di gunakan dapat di klasifikasikan menjadi 6 jenis pekerjaan, yaitu :

1. Penyediaan makanan
2. Pemeliharaan rumah
3. Pemeliharaan fisik anggota keluarga
4. Pencucian pakaian
5. Setrika pakaian
6. Pencucian alat makanan.

Herawaty (2000) mengungkapkan bahwa semakin tinggi jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah dapat disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga, meningkatnya pendidikan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan dan teknologi yang semakin maju. Kemudahan teknologi sangat berpengaruh dalam beban kerja karena semakin canggih teknologi rumahtangga maka akan berkurang beban kerja yang dilakukan oleh anggota rumahtangga, misalnya yaitu adanya mesin cuci, *rice cooker, mixer* dan alat penyedot debu (Guhardja *et al.*, 1992).

Perbedaan pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan di luar rumahtangga tampak jelas dalam hal ekonomi yaitu pada pekerjaan rumahtangga tidak memiliki nilai ekonomi bagi anggota keluarga sedangkan untuk pekerjaan di luar rumah-tangga yaitu sebaliknya (Guhardja *et al.*, 1992). Menurut Gardiner *et al.* (1996) terdapat anggapan bahwa perempuan bukanlah pencari nafkah yang utama, hal ini menyebabkan berbagai pekerjaan perempuan seperti pedagang, penjual kue atau menjadi buruh cuci menjadi tidak terlihap dan disepelekan. Masyarakat dan perempuan sendiri merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai pekerjaan sambilan dan penghasilannya adalah sebagai tambahan pendapatan bagi keluarga (Djamal 1996).

Peran ganda wanita terkadang menimbulkan dilema bagi perempuan yang menjalankannya, di satu pihak dituntut atau menuntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat tetapi di pihak lain masyarakat masih berharap perempuan dapat menjadi ibu yang baik di tengah keluarganya. Dilema pada perempuan itu menimbulkan beberapa pendapat yang setuju dan yang tidak setuju. Pendapat yang tidak setuju mengatakan bahwa peran ganda merupakan salah satu faktor kegagalan keluarga seperti banyak terjadi di beberapa negara, namun di pihak lain pendapat yang setuju menyatakan bahwa perempuan di rumah menunjukan tanda adanya diskriminasi seperti yang diungkapkan dalam teori-teori feminisme (Megawangi 1999).

Pembagian Tugas Keluarga

Pergeseran dalam peranan (pembagian kerja) antara pria dan perempuan dalam keluarga dan rumahtangga mencerminkan perubahan peranan perempuan dalam pekerjaan rumahtangga (Sajogyo, 1981). Tipe pembagian kerja menurut Sajogyo ada dua, yaitu (1) Pola peranan yang menggambarkan peranan perempuan seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumahtangga atau pekerjaan pemeliharaan kebutuhan hidup semua anggota keluarga dan rumahtangga, dan (2) Pola peranan yang menggambarkan bahwa perempuan mempunyai dua peranan yaitu peranan dalam pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan mencari nafkah.

Perempuan yang bekerja di luar rumah mempunyai beban ganda sehingga diperlukan pembagian tugas *(job decision)* dalam anggota keluarga. Dengan adanya pembagian tugas yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, maka perbedaan gender tidaklah menjadi suatu masalah, karena peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan kedua belah pihak (UNFPA *et al.* 2005).

Pendapatan

Pendapatan keluarga adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga atau rumahtangga ekonomi. Pendapatan ini terdiri dari (Prasetyo 2004):

1. Pendapatan dari upah/ gaji yang diterima oleh seluruh anggota rumah-tangga ekonomi yang bekerja sebagai buruh, sebagai imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan untuk suatu perusahaan/majikan/instansi, baik uang, barang maupun jasa.
2. Pendapatan dari seluruh anggota rumahtangga yang berupa pendapatan kotor, yaitu selisih nilai jual barang dan jasa yang diproduksi dengan biaya produksinya.

3. Pendapatan lainnya adalah pendapatan di luar upah/gaji yang menyangkut usaha lain.

Sumberdaya uang (pendapatan) yang dimiliki suatu keluarga relatif terbatas. Oleh karena itu, agar pendapatan keluarga yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi keinginan semua anggota keluarga secara optimal diperlukan upaya pengalokasian sumberdaya secara optimal pula dengan cara mengelolanya secara baik dan benar. Menabung (*saving*) merupakan salah satu usaha untuk menyebarkan penghasilan keluarga sepanjang kehidupan (Guhardja *et al.*, 1992).

Pengambil Keputusan Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali suatu keluarga atau rumahtangga dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anggota keluarganya. Pengambilan keputusan adalah suatu proses dalam memilih dan menetapkan altematif yang tepat untuk suatu tindakan yang diinginkan dan akan mendasari semua fungsi manajemen (Guhardja *et al.*, 1992). Sedangkan menurut Cromwell dan Olson yang diacu dalam Lestari (1984b) mendefinisikan pengambilan keputusan merupakan perwujudan dari proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil linteraksi di antara para anggota keluarga untuk saling mempengaruhi serta sekaligus merujuk pada hasil atau akibat dari struktur kekuasaan dalam keluarga tersebut. Pola pengambilan keputusan (*decision making*) dalam suatu keluarga dapat menggambarkan bagaimana struktur atau pola kekuasaan dalam keluarga tersebut (Lestari 1984b).

Guhardja *et al.* (1992) mengungkapkan bahwa biasanya proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara singkat ataupun mengambil waktu yang lama, hal ini tergantung pada keputusan yang akan diambil karena pada dasarnya dalam menetapkan pilihan merupakan suatu hal yang sangat sulit, sehingga menurut Lestari (1984b) keputusan yang diambil sebaiknya merupakan hasil keputusan bersama.

Sajogyo P (1981) dalam penelitiannya tentang pola pengambilan keputusan mengemukakan terdapat lima variasi mengenai siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam keluarga, yaitu (1) pengambilan keputusan hanya oleh istri, (2) pengambilan keputusan hanya oleh suami, (3) pengambilan keputusan oleh suami dan istri, dimana istri lebih dominan, (4) pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, dimana suami lebih dominant, dan (5) pengambilan keputusan bersama oleh suami dan istri.

Dalam masyarakat patriaki, suami dan istri menganggap wajar bila suami yang lebih banyak mengambil keputusan dalam berbagai macam hal yang bersangkutan dengan kehidupan keluarganya. Pada masyarakat *yang* bilateral strukturnya seseorang diperhitungkan sebagai anggota dari kelompok kekerabat an pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini pria maupun perempuan diakui sebagai orang-orang yang berhak menjadi penghubung garis keturunan dan secara teori hubungan-hubungan kepada kelompok kekerabatan pihak ayah maupun ibu, mempunyai bobot yang sama kuatnya (Mudzhar *et al.,* 2001).

Sedangkan Sajogyo (1981) mengungkapkan bahwa peranan perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan dalam rumahtangga dan masyarakat dibagi menjadi empat bidang, yaitu (1) tingkat keputusan dihubungkan dengan bidang produksi (pembelian sarana produksi, pembelian alat-alat, penanaman modal), (2) tingkat keputusan dihubungkan dengan pengeluaran dalam kebutuhan pokok (makanan, perumahan, pakaian, biaya pendidikan, pembelian peralatan rumah tangga dan perawatan kesehatan), (3) tingkat keputusan dihubungkan dengan pembentukan keluarga (jumlah anak, sosialisasi anak, pembagian kerja antara anak-anak, pendidikan) dan (4) tingkat keputusan dihubungkan dengan kegiatan sosial sesuai dengan yang ada dalam masyarakat (selamatan, kegiatan gotong royong, pengeluaran untuk pengajian, arisan, koprasi atau lumbung desa).

Untuk memilih wanita sebagai pengambil keputusan baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat tidaklah mudah. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi peranan perempuan dalam persoalan pengambilan keputusan yaitu misalnya dalam sektor kegiatan dalam masyarakat dimana sektor domestik adalah bidang untuk wanita sedangkan sektor publik untuk laki-laki sebagai pencari nafkah. Selain itu faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhi peranan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah proses sosialisasi, pendidikan, latar belakang perkawinan, kedudukan dalam masyarakat dan pengaruh luar lainnya (Lestari 1984b).

Peran Gender dalam Keluarga

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan (UNFPA *et al.*, 2005). Menurut data yang diperoleh dari BPS, perempuan mempunyai angka buta huruf yang besar dibandingkan dengan laki-laki, khususnya perempuan rumah tangga demikian juga untuk angka partisipasi perempuan dalam pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki. Menurut Megawangi (1999), para feminis sering bersikukuh bahwa faktor budaya yang menyebabkan mengapa rata-rata pendidikan wanita masih di bawah pria, sehingga praktik diskriminasi pada perempuan masih terus berlaku di Indonesia.

Diskriminasi wanita berarti setiap perbedaan, pengecilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Mudzhar *et al.*, 2001).

Perempuan digariskan untuk menjadi istri dan ibu, sehingga muncul "image" bahwa perempuan adalah mahluk yang emosional, pasif, lemah, dependen, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga (Hasibuan & Sedyono 1996). Adapun perempuan diharuskan untuk bernaung di bawah kekuasaan laki-laki, akibatnya perempuan dianggap sebagai mahluk lemah dan kedudukannya dalam mayarakat selalu di bawah lawan jenisnya serta dianggap tidak produktif (BPS, 1998).

Dalam GBHN 1999 yang diacu oleh (UNFPA *et al.* 2005) peranan perempuan terdiri dari dua hal, yaitu (1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), dan (2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sedangkan peran perempuan dalam Panca Dharma Wanita adalah sebagai (1) Istri pendamping suami, (2) Ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, (3) pengatur rumah tangga, (4) pekerja penambah penghasilan keluarga, dan (5) anggota masyarakat yang berguna (Megawangi 1999).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

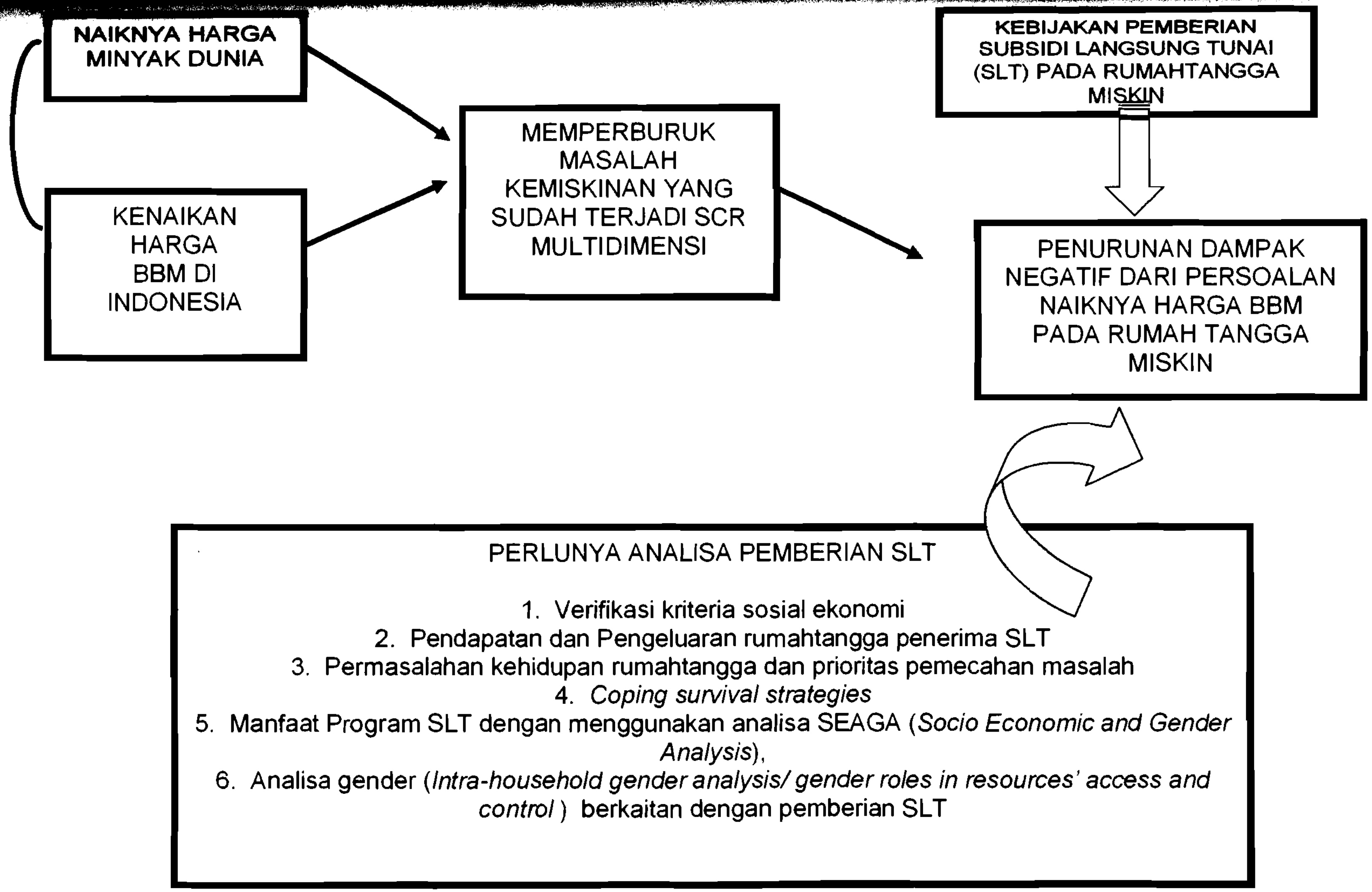

Gambar 1. Kerangka Berpikir Manfaat Pemberian Subsidi Langsung Tunai pada Rumahtangga Miskin

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kota (Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan), dan Kabupaten Bogor (Kecamatan Ciomas), Propinsi Jawa Barat. Pengambilan data dilakukan selama 1-2 bulan yaitu pada bulan Januari-Februari 2004. Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu diambil secara sengaja (*pusposive*) dengan salah satunya mempertimbangkan faktor lokasi berdasarkan data keluarga miskin terbanyak yang mendapatkan SLT BBM di Kota Bogor. Penelitian dilakukan di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Lokasi penelitian yaitu dipilih dua tempat di kota dan satu tempat di kabupaten dengan pertimbangan kecamatan yang cenderung mempunyai angka kemiskinan tertinggi berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang diambil untuk penelitian yaitu rumahtangga miskin yang mendapatkan dana SLT BBM.

Berdasarkan data dari Kantor Pos Pusat Bogor selaku distributor pelayanan SLT maka kecamatan yang dipilih di Kotamadya Bogor untuk dijadikan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat serta Kecamatan Ciomas untuk lokasi di kabupaten.

Metode Pengambilan Contoh

Rumahtangga yang dijadikan contoh penelitian dipilih secara purposive dari lokasi yang terbanyak menerima SLT. Berdasarkan data dari Kantor Pos sebagai distributor SLT, maka untuk wilayah Kota Bogor dipilih lokasi Kecamatan Bogor Barat yang terbanyak cakupan pelayanannya, yaitu meliputi 10,458 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 3,137 milyar dan kecamatan Bogor Selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Bogor dipilih wilayah Kecamatan Ciomas yang cakupan pelayanannya cukup banyak, yaitu meliputi 21.105 kepala keluarga dengan besaran uang Rp 6,332 milyar. Jumlah sampel yang dianalisa secara total adalah 168 keluarga (112 KK adalah laki-laki, dan 56 KK adalah perempuan).

Contoh atau responden yang digunakan pada penelitian ini merupakan rumahtangga miskin yang dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan data dari BPS dan Kantor Pos Pusat Bogor tentang keluarga penerima SLT-BBM.

Jumlah contoh yang diambil yaitu sebanyak 108 untuk lokasi di kota dan 60 untuk di lokasi kabupaten. Sebagai unit analisa yang digunakan untuk penelitian ini lebih spesifik lagi yaitu merupakan keluarga dengan kepala keluarga laki-laki dan perempuan.

Penarikan contoh di Kota Bogor yang berlokasi di Kecamatan Bogor Selatan yaitu dipilih secara *purposive* berdasarkan jumlah keluarga penerima SLT-BBM terbanyak yaitu Kelurahan Empang, sedangkan untuk lokasi Kecamatan Bogor Barat yaitu Kelurahan Situ Gede. Penarikan contoh serupa juga dilakukan di kabupaten yaitu di Kecamatan Ciomas, tepatnya di Kelurahan Laladon sebagai lokasi penelitian. Penarikan contoh secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

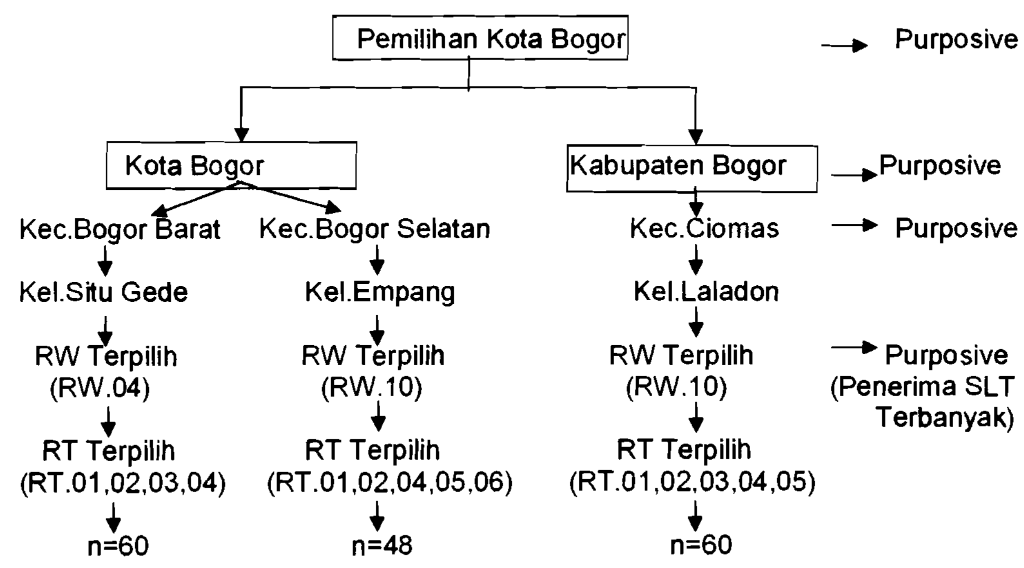

Gambar 2 Kerangka Sampling Penelitian

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara yang menggunakan kuesioner, pengamatan langsung pada saat melakukan wawancara di rumah contoh (Lampiran 1).

Sedangkan untuk data sekunder yang dikumpulkan meliputi data potensi desa, data monografi desa, data penduduk miskin dan penerima SLT pada bulan Oktober-Desember 2005, data BKKBN dan BPS serta dokumentasi lain yang berkenaan dengan penelitian. Secara keseluruhan, data primer dan sekunder yang diperoleh dari responden beserta alat dan cara pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. Data primer yang diambil meliputi:

1. Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi rumahtangga penerima SLT
2. Peran dan tanggung jawab anggota rumahtangga
3. Pola pendapatan dan pengeluaran rumahtangga
4. Alur penggunaan dana Rp 300.000,- bagi rumahtangga
5. Manfaat SLT bagi penduduk miskin
6. Penggunaan bahan bakar untuk usaha kecil dan menengah perempuan

Metode pengumpulan data/ informasi yang diterapkan pada penelitian ini adalah bervariasi sebagai berikut:

1. *In desk study* untuk mendapatkan berbagai informasi dari media cetak maupun elektronik, dari Kantor Pos maupun Kantor Statistik Kota dan Kabupaten Bogor.
2. Pengamatan yang cermat di lapangan pada rumahtangga penerima SLT pada saat pengambilan data primer
3. Pengamatan beberapa hari di lapangan pada saat pemberian Subsidi selanjutnya pada bulan Februari 2006.
4. Metode survey pada sejumlah rumahtangga penerima dengan menggunakan kuesioner terstruktur
5. *In dept interview* dengan dan aparat pemerintahan tentang kebijakan SLT

Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang telah dikumpulkan melalui wawancara diolah melalui proses editing, koding, *scoring, entry* data ke komputer, *cleaning* dan analisis data. Koding atau yang biasa disebut *code book* dilakukan di dalam kuesioner yang ditulis pada masing-masing pertanyaan, sehingga diperoleh jenis-jenis kode seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Sedangkan untuk pemberian skor ditujukan pada setiap variabel (kecuali untuk pertanyaan terbuka), kemudian skor tersebut dijumlahkan menjadi satu variabel komposit.

Interval kelas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Interval Kelas (I)} = \frac{SkorMaksimum(NT) - SkorMinimum(NR)}{\sum kategori}$$

Ket : Kurang = NR- (NR+I)
Sedang = (NR+I) - [(NR+I) + I]
Baik = [(NR+I) + I] – NT

Data yang diperoleh dari contoh di tabulasi silang untuk memudahkan pengolahan data. Data-data tersebut kemudian diolah secara komputerisasi dengan menggunakan Program Microsoft Excel dan Program SPSS versi 11.0 *for Windows.* Analisis statistik yang akan digunakan untuk melihat gambaran dari berbagai variabel yang diteliti yaitu analisis deskriptif.

Data yang terkumpul kemudian diberi skor sesuai dengan tingkatan masalahnya. Analisa yang akan dipergunakan dalam studi ini meliputi:

1. Analisis deskriptif yang meliputi penjelasan pemaknaan dari pengamatan, data sekunder, berita koran, in-dept interview dan diskusi fokus grup.
2. Uji Triangulasi yang dilakukan untuk menguji kekonsistenan pendapat dari berbagai golongan masyarakat (*check and re-check*)

Penelitian ini juga dianalisis berdasarkan kepala keluarga (KK) laki-laki dan KK perempuan (n=168) serta menganalisis keluarga berdasarkan ibu bekerja dan tidak bekerja pada keluarga yang lengkap (n=107).

Definisi Operasional

1. **Keluarga** adalah suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi serta saling berkomunikasi satu sama lain sehingga menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara lki-laki dan perempuan serta merupakan pemelihara kebudayaan bersama.

2. **Masyarakat / Keluarga Miskin** adalah masyarakat atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum.
3. **Garis Kemiskinan** adalah besarnya nilai Pengeluaran (dalam rupiah per kapita per bulan) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (2100 kkal per kapita per hari) dan non makanan (papan, sandang, pendidikan, transportasi serta kebutuhan rumahtangga dan individu yang mendasar lainnya).
4. **Karakteristik keluarga** adalah keadaan keluarga yang meliputi jenis kelamin kepala keluarga, tingkat pendidikan orangtua, tingkat pendapatan orang tua dan jumlah anggota keluarga.
5. **Jenis Kelamin** adalah perbedaan biologis, hormonal dan anatomi fisiologi antara perempuan dan laki-laki.
6. **Tingkat pendidikan orangtua** adalah lama pendidikan formal yang pernah diikuti oleh orangtua yang diukur dalam lamanya pendidikan atau jumlah tahun pendidikan.
7. **Tingkat pendapatan orangtua** jumlah pendapatan orangtua yang dihasilkan per bulan dari pekerjaan utama ataupun pekerjaan tambahan yang dinilai dalam rupiah.
8. **Jumlah anggota keluarga** adalah banyaknya anggota dalam hal ini jumlah anak dan orangtuanya yang terdapat dalam keluarga.
9. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi).
10. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh individu yang termasuk golongan bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.
11. **Ibu bekerja** adalah ibu yang mempunyai peran ganda dalam rumah tangga, yaitu selain bekerja dalam kegiatan reproduktif juga bekerja dalam kegiatan produktif.
12. **Ibu Tidak Bekerja** adalah ibu yang hanya bekerja pada kegiatan reproduktif saja.

13. **Kegiatan Produktif** adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung.
14. **Kegiatan Ekonomi** adalah bermacam-macam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan selama beberapa waktu.
15. **Kegiatan Reproduktif** adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik atau kemasyarakatan dan dalam beberapa referensi disebut reproduksi sosial.
16. **Kegiatan Rumahtangga** adalah kegiatan rutin yang dilakukan ibu rumahtangga semenjak bangun pagi hingga bangun pagi keesokan harinya yaitu selama 24 jam meliputi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu rumahtangga seperti berbelanja, memasak, mengasuh anak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, membersihkan rumah dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di luar rumah.
17. **Pembagian Kerja** adalah kerja atau peran yang diwajibkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki, baik dalam rumah maupun di dalam komunitas.
18. **Peran** adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
19. **Pengambilan Keputusan** adalah suatu proses dalam memilih dan menetapkan alternatif yang tepat untuk suatu tindakan yang diinginkan dan akan mendasari semua fungsi manajemen.
20. **Gender** adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal peran, tanggung jawab, fungsi, hak, sikap dan perilaku yang telah dikonstruksi oleh sosial atau budaya yang dapat berubah-ubah sesuai kemajuan zaman.
21. **Peran Gender** adalah peran-peran dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin yang berbeda.
22. **Manfaat** adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Sosial dan Demografi Responden

Berdasarkan jenis kelamin KK, maka istri dari keluarga dengan KK laki-laki memiliki tingkat pendidikan relatif lebih tinggi, yaitu pada umumnya tamat SD (40.2%). Sedangkan istri yang berstatus janda (KK perempuan) pada umumnya (42.8%) tidak bersekolah, bahkan tidak ditemukan juga yang berpendidikan SMP atau SMA (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan KK (KK Laki-laki dan KK Perempuan)

Tingkat Pendidikan	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
Tidak sekolah	14	13.1	24	42.8
Tidak tamat SD	34	31.8	21	37.5
Tamat SD	43	40.2	11	19.7
SMP	10	9.3	0	0.0
SMA	6	5.6	0	0.0
Total	107	100.0	56	100.0

Keterangan : 5 orang istri sudah meningggal

Jika dilihat berdasarkan ibu bekerja dan tidak bekerja maka lebih dari setengah suami pada contoh ibu bekerja memiliki tingkat pendidikan sampai tidak tamat SD (51.5%), sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja yaitu lebih dari seperempatnya (25.7%). Persentase tingkat pendidikan terendah suami pada contoh ibu bekerja adalah tamat SMA (3.0%), sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja adalah tidak tamat SMA (1.4%) (Tabel 2).

Tabel 2. Sebaran contoh berdasarkan tingkat pendidikan KK laki-laki

Tingkat Pendidikan	Ibu Bekerja		Ibu Tidak Bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tidak sekolah	0	0.0	8	10.8	8	5.4
Tidak Tamat SD	17	51.5	19	25.7	36	38.6
Tamat SD	13	39.4	28	37.8	41	38.6
Tidak Tamat SMP	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tamat SMP	2	6.1	10	13.5	12	9.8
Tidak Tamat SMA	0	0.0	1	1.4	1	0.7
Tamat SMA	1	3.0	8	10.8	9	6.9
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Std. Deviasi	1.098		1.961		1.746	
Uji Beda T			0.134			

Lebih dari sepertiga suami pada contoh ibu bekerja memiliki tingkat pendidikan sampai tamat SD (39.4%) sedangkan lebih dari seperempat suami pada contoh ibu tidak bekerja memiliki tingkat pendidikan tidak tamat SD (25.7%). Tidak ada suami contoh yang berpendidikan tidak tamat SMP baik pada contoh ibu bekerja maupun ibu tidak bekerja, namun suami yang tamat SMP pada contoh ibu tidak bekerja (13.5%) lebih tinggi dibandingkan pada contoh ibu bekerja (6.1%).

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa sebagian besar contoh memiliki tingkat pendidikan tamat SD, baik pada ibu bekerja (39.4%) dan ibu tidak bekerja (39.2%). Contoh yang berpendidikan tidak tamat SD pun cukup banyak, hal ini dapat dilihat baik pada contoh ibu bekerja (36.4%) dan pada ibu tidak bekerja (29.7%). Terdapat contoh yang tidak sekolah pada contoh ibu bekerja (10.8), namun pada contoh ibu bekerja tidak ada yang tidak sekolah, artinya keseluruhan contoh ibu bekerja pernah bersekolah. Hal serupa terjadi untuk tingkat pendidikan tidak tamat SMA, yaitu pada contoh ibu tidak bekerja sebesar 1.4 persen, sedangkan pada contoh ibu bekerja tidak ada.

Hanya sebagian kecil saja contoh dengan tingkat pendidikan tamat SMP dan tamat SMA. Pada contoh ibu bekerja yang tamat SMP (6.1%) lebih sedikit dibandingkan contoh ibu tidak bekerja (13.5%). Sedangkan untuk tingkat pendidikan tamat SMA pada contoh ibu bekerja (3.0%) lebih sedikit dibandingkan contoh ibu tidak bekerja (10.8%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu yang bekerja dan tidak bekerja adalah cenderung rendah dan sesuai dengan beberapa penelitian yang menunjukan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan pekerja Indonesia yang masih rendah khususnya wanita (BPS 1998).

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan pendidikan Isteri pada KK laki-laki

Tingkat Pendidikan	Pendidikan Istri				Total	
	Ibu Bekerja		Ibu Tidak Bekerja			
	n	%	n	%	n	%
Tidak sekolah	4	12.1	10	13.5	14	12.8
Tidak Tamat SD	12	36.4	22	29.7	34	33.1
Tamat SD	13	39.4	29	39.2	42	39.3
Tidak Tamat SMP	1	3.0	0	0.0	1	1.5
Tamat SMP	2	6.1	8	10.8	10	8.4
Tidak Tamat SMA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tamat SMA	1	3.0	5	6.8	6	4.9
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Std. Deviasi	1.438		1.738		1.648	
Uji Beda T			0.385			

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ($p > 0.05$) antara pendidikan contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan jenjang tingkat pendidikan antara ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal serupa terjadi pada tingkat pendidikan suami contoh, hasil uji beda T menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata ($p > 0.05$) antara pendidikan suami contoh ibu yang bekerja dan suami contoh ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan jenjang pendidikan antara suami pada contoh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja.

Sebagian besar istri, baik dari keluarga dengan KK laki-laki maupun perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Istri dari keluarga dengan KK laki-laki lebih banyak yang bekerja (30.8%) dibandingkan istri yang berstatus janda (KK perempuan) (44.7%). Jenis pekerjaan yang banyak dijalani oleh istri yang bekerja adalah sebagai buruh. Jenis pekerjaan istri lainnya adalah berdagang dan wiraswasta (Tabel 4).

Tabel 4. Sebaran Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan Istri danJenis Kelamin KK

Jenis Pekerjaan	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
Buruh	23	21.5	14	25.0
Dagang	9	8.4	10	17.9
Wiraswasta	1	0.9	1	1.8
IRT	74	69.2	31	55.3
Total	107	100.0	56	100.0

Berdasarkan Tabel 5 dibawah ini, sebagian besar suami contoh bekerja sebagai buruh yaitu pada contoh ibu bekerja sebesar 51.5 persen dan contoh ibu tidak bekerja sebesar 52.1 persen. Pada saat penelitian berlangsung, kurang dari seperempat suami contoh tidak memiliki pekerjaan, hal ini terjadi baik pada contoh ibu bekerja (24.2%) dan ibu tidak bekerja (24.3%). Pekerjaan yang cukup banyak dilakukkan oleh suami contoh ibu bekerja (18.2%) adalah sebagai pedagang, sedangkan suami pada contoh ibu tidak bekerja adalah sebagai pedagang dan wiraswasta yang masing-masing sebanyak 6.8 persen. Hanya sebagian kecil suami pada contoh ibu bekerja yang berstatus sebagai pegawai swasta dan petani, yaitu masing-masing sebanyak 3.0 persen, sedangkan suami pada contoh ibu tidak bekerja yang bekerja sebagai pegawai swasta lebih tinggi yaitu 5.4 persen dan tidak ada yang bekerja sebagai petani. Suami yang bekerja sebagai supir hanya terdapat pada contoh ibu tidak bekerja (4.1%).

Tabel 5. Sebaran contoh berdasarkan jenis pekerjaan suami pada KK laki-laki (n=107)

Jenis Pekerjaan	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pegawai Swasta	1	3.0	4	5.4	5	4.2
Buruh	17	51.5	39	52.7	56	52.1
Dagang	6	18.2	5	6.8	11	12.5
Petani	1	3.0	0	0.0	1	1.5
Wiraswasta	0	0.0	5	6.8	5	3.4
Supir	0	0.0	3	4.1	3	2.0
Tidak bekerja	8	24.2	18	24.3	26	24.3
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0

Pekerjaan suami terkadang tidak menetap bahkan kadang-kadang saja mereka mendapat pekerjaan, seperti halnya buruh bangunan yang bekerja apabila ada proyek bangunan, selain itu juga kepala keluarga yang tidak bekerja cukup besar sehingga keadaan ini membuat contoh berkeinginan untuk mencari uang tambahan dengan bekerja di sektor informal. Jenis pekerjaan publik yang terbanyak dilakukan oleh contoh ibu bekerja yaitu sebagai buruh 66.7 persen kemudian berdagang sebesar 27.3 persen. Hanya sebagian kecil saja contoh bekerja sebagai wiraswasta dan pegawai swasta, yaitu masing-masing sebanyak 3.0 persen Tabel 6).

Tabel 6. Sebaran contoh berdasarkan jenis pekerjaan KK laki-laki

Jenis Pekerjaan	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pegawai Swasta	1	3.0	0	0.0	1	1.5
Buruh	22	66.7	0	0.0	22	33.4
Dagang	9	27.3	0	0.0	9	13.6
Wiraswasta	1	3.0	0	0.0	1	1.5
Tidak bekerja	0	0.0	74	100.0	74	50.0
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0

Pekerjaan terbanyak yang dilakukan oleh ibu bekerja berdasarkan tabel diatas adalah sebagai buruh (66.7%). Adapun jenis pekerjaan buruh itu terdiri atas beberapa macam, yaitu misalnya seperti buruh cuci, buruh bangunan, buruh tani, buruh pabrik dan lain-lain. Berdasarkan Gambar 3 berikut ini, setengah contoh bekerja sebagai buruh cuci (50%), sedangkan lebih dari seperlima contoh bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) yaitu sebanyak 22.7 persen. Ibu yang bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan dan buruh pabrik masing-masing yaitu sebanyak 9.1 persen.

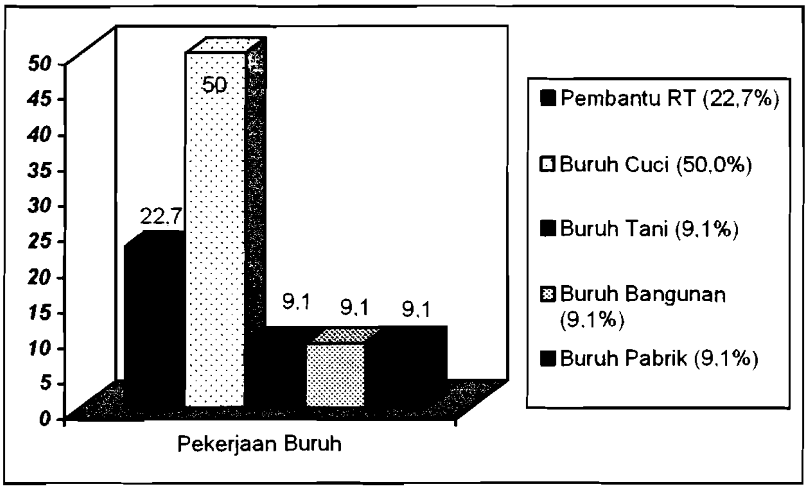

Gambar 3. Sebaran contoh ibu bekerja berdasarkan jenis pekerjaan buruh (n=22)

Pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di luar rumah ini merupakan suatu upaya untuk membantu suami dalam menambah keuangan keluarga karena dengan berdagang, menjual kue, menjual makanan atau menjadi buruh cuci maka upah yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga (Lestari 1984a).

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin kepala keluarga (KK), maka lebih dari setengah keluarga, baik yang KK laki-laki maupun perempuan berkisar antara 5-8 orang dan sepertiga lebih antara 1-4 orang. Sedangkan yang lebih dari 8 orang kurang dari 10 persen. Rata-rata jumlah keluarga dengan KK laki-laki adalah 5.34 dan KK perempuan 5.39 orang (Tabel 7). Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah keluarga dengan KK laki-laki dan KK perempuan (α <0.05).

Tabel 7. Sebaran Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga dan Jenis Kelamin KK

Jumlah (orang)	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
1-4	38	33.9	22	39.3
5-8	66	58.9	29	51.8
> 8	8	7.1	5	8.9
Total	112	100.0	56	100.0
Rata-rata ± std	5.34 ± 2.04		5.39 ± 2.19	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah contoh memiliki jumlah anggota keluarga 5-8 orang, pada keluarga ibu yang bekerja terdapat 60.6 persen dan pada ibu yang tidak bekerja sebanyak 56.8 persen (Tabel 8). Sepertiga contoh memiliki jumlah anggota keluarga ≤ 4 orang yaitu baik pada contoh ibu bekerja (30.3%) dan ibu yang tidak bekerja (36.5%). Pada contoh keluarga ibu tidak bekerja, terdapat satu contoh yang memiliki jumlah anggota keluarga ≥12 orang. Rata-rata jumlah anggota keluarga contoh ibu bekerja 6 orang dan pada contoh ibu yang tidak bekerja yaitu 5 orang, hal ini menunjukan bahwa jumlah anggota keluarga pada ibu yang bekerja lebih banyak daripada jumlah anggota keluarga ibu yang tidak bekerja.

Tabel 8. Sebaran contoh berdasarkan jumlah anggota keluarga pada KK laki-laki

Jumlah (orang)	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
≤ 4	10	30.3	27	36.5	37	33.4
5-8	20	60.6	42	56.8	62	58.7
9-12	3	9.1	4	5.4	7	7.2
≥12	0	0.0	1	1.4	1	0.7
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Rata-rata	5.55		5.35		5.39	
Standar Deviasi	1.822		2.061		1.985	
Uji Beda T			0.639			

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$) antara jumlah anggota keluarga pada contoh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara jumlah anggota keluarga pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin KK, maka keluarga dengan KK laki-laki memiliki tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan KK perempuan. Proporsi tertinggi (36.6%) pendapatan total KK laki-laki berkisar antara Rp 251 000 - Rp 500 000, sedangkan KK perempuan proporsi tertingginya (39.3%) berkisar antara Rp 101 000 – Rp 250 000 (Tabel 9). Rata-rata jumlah pendapatan total keluarga dengan KK laki-laki adalah Rp 494 945,1, sedangkan KK perempuan adalah Rp 275 498,2. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan total KK laki-laki dengan KK perempuan ($\alpha < 0.05$). Tingginya pendapatan pada KK laki-laki karena selain kontribusi dari suami juga dari isteri yang bekerja.

Tabel 9. Sebaran Keluarga Berdasarkan Pendapatan Total Keluarga per Bulan

Jumlah (Rp)	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
≤ 100.000	10	8.9	15	26.8
101.000 – 250.000	19	17.0	22	39.3
251.000 – 500.000	41	36.6	12	21.4
501.000 – 750.000	23	20.5	3	5.4
751.000 – 1.000.000	9	8.0	3	5.4
> 1.000.000	10	8.9	1	1.8
Total	112	100.0	56	100.0

Pada umumnya contoh memiliki pendapatan total keluarga pada kategori Rp.250.001-500.000, yaitu pada contoh ibu bekerja sebanyak 36.4 persen dan pada contoh ibu tidak bekerja 36.5 persen. Lebih dari seperlima contoh memiliki angka total pendapatan keluarga antara Rp.500.001-750.000, baik pada contoh ibu yang bekerja (21.2%) dan pada contoh ibu tidak bekerja yaitu sebanyak (20.3%). Proporsi yang cukup tinggi juga dapat dilihat pada pendapatan total keluarga antara Rp.100.001-250.000 yaitu pada ibu bekerja sebesar 18.2 persen dan pada ibu tidak bekerja sebanyak 14.9 persen (Tabel 10).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi contoh pada keluarga ibu bekerja dengan total pendapatan keluarga ≤ Rp.100.000 yaitu sebanyak 3.0 persen lebih rendah daripada ibu yang tidak bekerja sebanyak 10.8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki pendapatan minimal lebih tinggi daripada ibu yang bekerja, karena ibu yang bekerja di luar rumah memiliki penghasilan tambahan sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah total pendapatan keluarga.

Hanya sebagian kecil contoh yang memiliki total pendapatan keluarga di atas Rp.750.000. Hal ini dapat dilihat pada ibu yang bekerja dengan pendapatan total keluarga antara Rp.750.001-1.000.000 sebanyak 9.1 persen dan pada ibu yang tidak bekerja sebesar 9.5 persen serta pendapatan lebih dari Rp.1.000.000 pada contoh ibu yang bekerja sebesar 12.1 persen lebih banyak daripada ibu yang tidak bekerja (8.1%). Rata-rata total pendapatan keluarga pada ibu bekerja yaitu Rp. 561.400,00 dan pada ibu yang tidak bekerja sebesar Rp. 479.092,57.

Tabel 10. Sebaran contoh berdasarkan kategori pendapatan total keluarga pada KK laki-laki

Kategori Pendapatan (Rp)	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
≤ 100.000	1	3.0	8	10.8	9	6.9
100.001 – 250.000	6	18.2	11	14.9	17	16.5
250.001 – 500.000	12	36.4	27	36.5	39	36.5
500.001 – 750.000	7	21.2	15	20.3	22	20.7
750.001 – 1.000.000	3	9.1	7	9.5	10	9.3
> 1.000.001	4	12.1	6	8.1	10	10.1
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Uji Beda T			0.286			

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ($p > 0.05$) antara jumlah pendapatan total keluarga pada contoh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan pada keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Sebanyak sepertiga (31.3%) keluarga dengan KK laki-laki memiliki pendapatan perkapita antara Rp 51 000 – 100.000 dan lebih dari setengahnya (62.5%) keluarga dengan KK perempuan memiliki pendapatan perkapita kurang dari Rp 50 000 (Tabel 11). Rata-rata pendapatan perkapita keluarga dengan KK laki-laki

Tabel 11. Sebaran Responden Berdasarkan Pendapatan Per Kapita

Jumlah (Rp)	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
≤ 50 000	30	26.8	35	62.5
51 000 – 100.000	35	31.3	10	17.9
101 000 – 150 000	28	25.0	5	8.9
151 000 – 200 000	11	9.8	4	7.1
> 200 000	8	7.1	2	3.6
Total	112	100.0	56	100.0
Rata-rata ± std	106 536.85 ± 89 679.6		59 861.12 ± 55 625.1	

adalah Rp 106 536.85 dan KK perempuan adalah Rp 59 861.12. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan perkapita KK laki-laki dengan KK perempuan (α <0.05).

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 12, rata-rata pendapatan perkapita contoh ibu bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan contoh ibu tidak bekerja, yaitu Rp.115.959,59 pada ibu bekerja dan Rp. 102.005,62 pada contoh ibu tidak bekerja. Sebaran terbanyak pendapatan perkapita yaitu pada kisaran Rp.50.001-100.000, baik pada contoh ibu bekerja (33.3%) dan ibu tidak bekerja (31.1%). Lebih dari seperlima contoh memiliki pendapatan perkapita ≤ Rp. 50 000, baik pada contoh ibu bekerja sebanyak 21.2 persen dan pada contoh ibu tidak bekerja 29.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita minimal pada contoh ibu bekerja lebih rendah daripada ibu tidak bekerja yang diduga karena ibu bekerja memiliki penghasilan tambahan sehingga pendapatan perkapita keluarga cenderung lebih tinggi.

Pendapatan perkapita yang cukup banyak proporsinya dapat dilihat pada pendapatan perkapita antara Rp.100.001-Rp.150.000, yaitu pada contoh ibu bekerja 27.3 persen dan ibu tidak bekerja 23.0 persen. Hanya sebagian kecil saja contoh dengan pendapatan perkapita antara Rp.150.001-Rp.200.000, baik pada contoh ibu bekerja (9.1%) dan ibu tidak bekerja (9.5%). Sedangkan contoh yang memiliki pendapatan perkapita diatas Rp.200.001 pada contoh ibu bekerja (9.1%) lebih tinggi dibandingkan dengan contoh ibu tidak bekerja (6.8%).

Tabel 12. Sebaran contoh berdasarkan kategori pendapatan perkapita pada KK laki-laki

Kategori Pendapatan Perkapita (Rp)	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	%	n	n	%	n	%
≤ 50 000	7	21.2	22	29.7	29	25.5
50.001 – 100.000	11	33.3	23	31.1	34	32.2
100.001 – 150 000	9	27.3	17	23.0	26	25.1
150.001 – 200 000	3	9.1	7	9.5	10	9.3
> 200 001	3	9.1	5	6.8	8	7.9
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Uji Beda T			0.465			

Berdasarkan hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (p>0.05) antara pendapatan perkapita pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara pendapatan perkapita keluarga pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Kriteria penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tahun 2004 untuk kota Bogor adalah Rp.168.111. Berdasarkan Tabel 13 lebih dari setengah contoh baik pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja memiliki pendapatan perkapita di bawah garis kemiskinan (≤ -½ GK), yaitu masing-masing sebesar 39.4 persen dan 50.0 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar contoh termasuk ke dalam keluarga sangat miskin. Sedangkan lebih dari sepertiga contoh baik pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja memiliki pendapatan perkapita antara -½ garis kemiskinan sampai garis kemiskinan (-½ GK – GK), yaitu masing-masing sebesar 48.5 persen dan 39.2 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa contoh yang berada pada kategori miskin cukup tinggi.

Hanya sebagian kecil contoh yang termasuk ke dalam keluarga dengan pendapatan perkapita di atas garis kemiskinan (GK – 2GK) dan pendapatan perkapita lebih dari 2X garis kemiskinan (2GK), yaitu masing-masing 6.1 persen pada contoh ibu bekerja dan 5.4 persen pada contoh ibu tidak bekerja.

Tabel 13. Sebaran contoh berdasarkan kategori pendapatan perkapita terhadap garis kemiskinan pada KK laki-laki (n=107)

Kategori	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
Pendapatan (Rp)	n	%	n	%	n	%
≤ 84.055	13	39.4	37	50.0	50	44.7
84.055-168.111	16	48.5	29	39.2	45	43.9
168.112-336.222	2	6.1	4	5.4	6	5.7
> 336.223	2	6.1	4	5.4	6	5.7
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Uji Beda T			0.464			

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p>0.05$) antara pendapatan perkapita terhadap garis kemiskinan pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara pendapatan perkapita terhadap garis kemiskinan pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin KK, pada umumnya jumlah pengeluaran pada keluarga dengan KK laki-laki lebih tinggi dibandingkan KK perempuan (Tabel 14). Lebih dari 60 perempuan keluarga mengeluarkan uangnya untuk pangan pokok, lauk pauk dan sayur mayur. Jumlah pengeluaran yang lebih tinggi pada keluarga dengan KK perempuan dibandingkan KK laki-laki adalah rokok, listrik dan bayar kredit.

Tabel 14. Pengeluaran per bulan Berdasarkan Jenis Komoditas dan Jenis Kelamin KK

Uraian Pengeluaran	KK Laki-laki			KK Perempuan		
	n	Rata-rata (Rp)	Standar Deviasi	n	Rata-rata (Rp)	Standar Deviasi
Pangan pokok	106	172 634.9	86 611.7	51	145 098.0	68 267.2
Lauk pauk	107	88 299.1	49 237.9	54	70 213.0	42 668.5
Sayur	105	43 917.1	29 503.4	54	39 870.4	28 274.3
Jajan	74	129 489.2	100 803.9	20	67 000.0	54 017.8
Minyak goreng	89	39 758.4	15 252.6	38	35 486.8	17 546.5
Kesehatan	75	40 171.3	102 761.9	30	23 190.0	36 443.8
Pakaian	24	50 362.5	69 308.2	5	25 020.0	14 419.3
Pendidikan	40	50 782.5	71 316.4	8	50 425.0	55 007.2
Transport	46	67 508.7	88 024.9	26	50 142.3	91 851.7
Rokok	78	81 328.2	80 909.1	8	126 250.0	139 456.8
Listrik	84	39 400.0	24 434.4	39	43 551.3	23 270.9
Minyak tanah	88	89 334.1	56 290.2	43	81 376.7	44 493.6
Arisan	2	60 000.0	56 568.5	1	40 000.0	-
Kredit	7	38 628.6	45 959.4	2	91 200.0	125 582.2
Bayar hutang	2	15 650.0	10 818.7	0	-	-
Sewa rumah	1	50.000	-	0	-	-
Undangan	0	-	-	1	70 000	-
Lain-lain	112	9 300	27 842.9	56	7 498.2	25 783.2

Jumlah pengeluaran yang paling tinggi pada keluarga dengan KK laki-laki maupun KK perempuan adalah pengeluaran untuk pangan. Jenis pengeluaran lain yang jumlahnya cukup banyak juga adalah lauk pauk, jajan, rokok dan minyak tanah. Jumlah pengeluaran untuk jenis tersebut bervariasi sekitar Rp 60 000 - Rp129 000. Pada keluarga dengan KK laki-laki tidak ditemukan pengeluaran untuk undangan, sedangkan pada KK perempuan tidak ada pengeluaran untuk bayar hutang dan sewa rumah. Pengeluaran yang relatif rendah pada KK perempuan adalah untuk kesehatan dan pakaian.

Contoh mengalokasikan pendapatan keluarga per bulannya untuk dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk biaya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transport, bayar hutang dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar contoh baik pada ibu bekerja dan pada ibu tidak bekerja mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Hal ini serupa dengan pernyataan Guhardja *et al.* (1992) bahwa pada umumnya keluarga dengan pendapatan yang rendah akan menggunakan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan pangan.

Adapun yang termasuk ke dalam kebutuhan pangan adalah dalam pembelian pangan pokok dan lauk pauk serta sayur, minyak tanah, minyak goreng, jajan anak dan rokok untuk suami. Persentase untuk kebutuhan pangan sehari-hari pada contoh ibu bekerja (80.0%) lebih rendah daripada ibu tidak bekerja (82.7%) (Tabel 15). Pengeluaran yang cukup besar juga terdapat untuk biaya operasional rumah seperti pembayaran rekening listrik dan biaya sewa rumah, yaitu pada contoh ibu bekerja sebesar 5.6 persen dan ibu tidak bekerja 4.5 persen. Pada contoh ibu bekerja (5.5%), pengeluaran biaya transportasi lebih besar dibandingkan pada contoh ibu tidak bekerja (3.9%). Hal ini diduga bahwa ibu yang bekerja lebih sering berpergian menggunakan sarana transportasi untuk menuju tempat kerja mereka.

Tabel 15. Sebaran contoh berdasarkan kategori pengeluaran kebutuhan hidup pada KK laki-laki

Kategori	Ibu Bekerja (%)	Ibu Tidak Bekerja (%)	Total (%)	Uji Beda T (*p*)
Pangan	80.0	82.7	81.4	0.607
Kesehatan	3.2	3.6	3.4	0.643
Pendidikan	1.8	2.6	2.2	0.354
Pakaian	1.7	1.1	1.4	0.448
Operasional Rumah	5.6	4.5	5.1	0.425
Hutang	0.8	0.4	0.6	0.458
Transport	5.5	3.9	4.7	0.646
Lain-Lain	1.4	1.1	1.2	0.744
Total	100.00	100.00	100.00	(α=0.05)

Pengeluaran contoh untuk biaya kesehatan memiliki persentase yang tidak jauh berbeda, yaitu 3.2 persen pada contoh ibu bekerja dan 3.6 persen pada contoh ibu tidak bekerja. Sedangkan untuk biaya pendidikan, contoh ibu bekerja hanya mengalokasikan sebesar 1.8 persen dari pendapatan mereka yaitu lebih rendah daripada contoh ibu tidak bekerja (2.6%). Pengeluaran untuk pembelian pakaian pada ibu bekerja (1.7%) lebih tinggi daripada ibu tidak bekerja (1.1%), namun ibu yang bekerja (0.8%) memiliki hutang lebih banyak daripada ibu tidak bekerja (0.4). Adapun yang termasuk kategori hutang ini yaitu peminjaman uang oleh contoh kepada pihak lain, biaya arisan setiap bulannya dan pembelian barang secara kredit. Menurut Guhardja *et al.* (1992) gaya hidup dalam kehidupan rumah tangga yang terlalu dipaksakan dapat mengakibatkan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga dampak dari hal ini adalah munculnya gejala pembelian secara angsuran (kredit). Ibu yang bekerja mempunyai persentase hutang lebih tinggi dibandingkan dengan contoh ibu tidak bekerja, hal ini diduga karena ibu yang bekerja memiliki penghasilan tambahan sehingga mereka melakukan pembelian barang secara kredit atau ikut arisan.

Secara keseluruhan, alokasi pengeluaran keluarga contoh dapat dilihat pada gambar alur pengeluaran berdasarkan pendapatan baik pada contoh ibu bekerja maupun ibu tidak bekerja berikut ini :

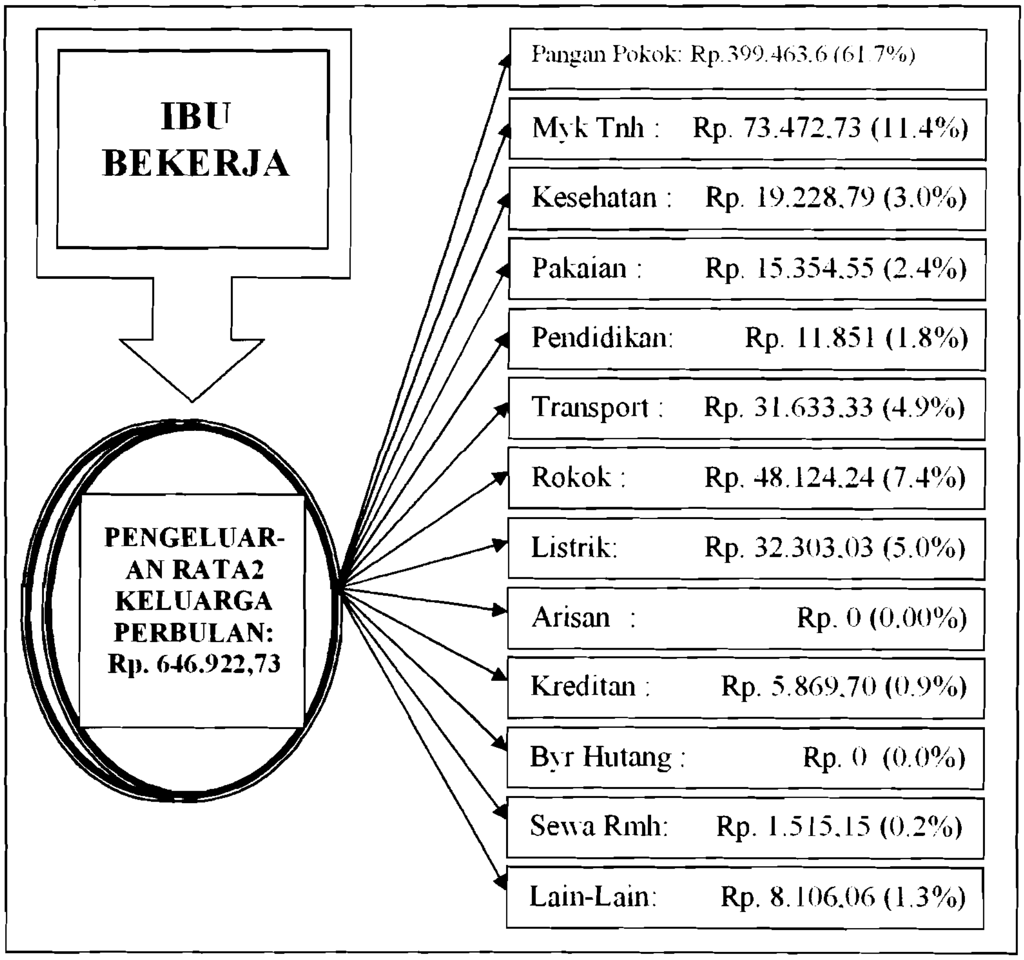

Gambar 4. Alur alokasi pendapatan keluarga terhadap pengeluaran pada contoh ibu bekerja

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa total rata-rata pengeluaran pada ibu yang bekerja per bulannya adalah sebesar Rp. 646.922,73. Berikut merupakan alur alokasi pendapatan keluarga terhadap pengeluaran rata-rata pada contoh ibu tidak bekerja.

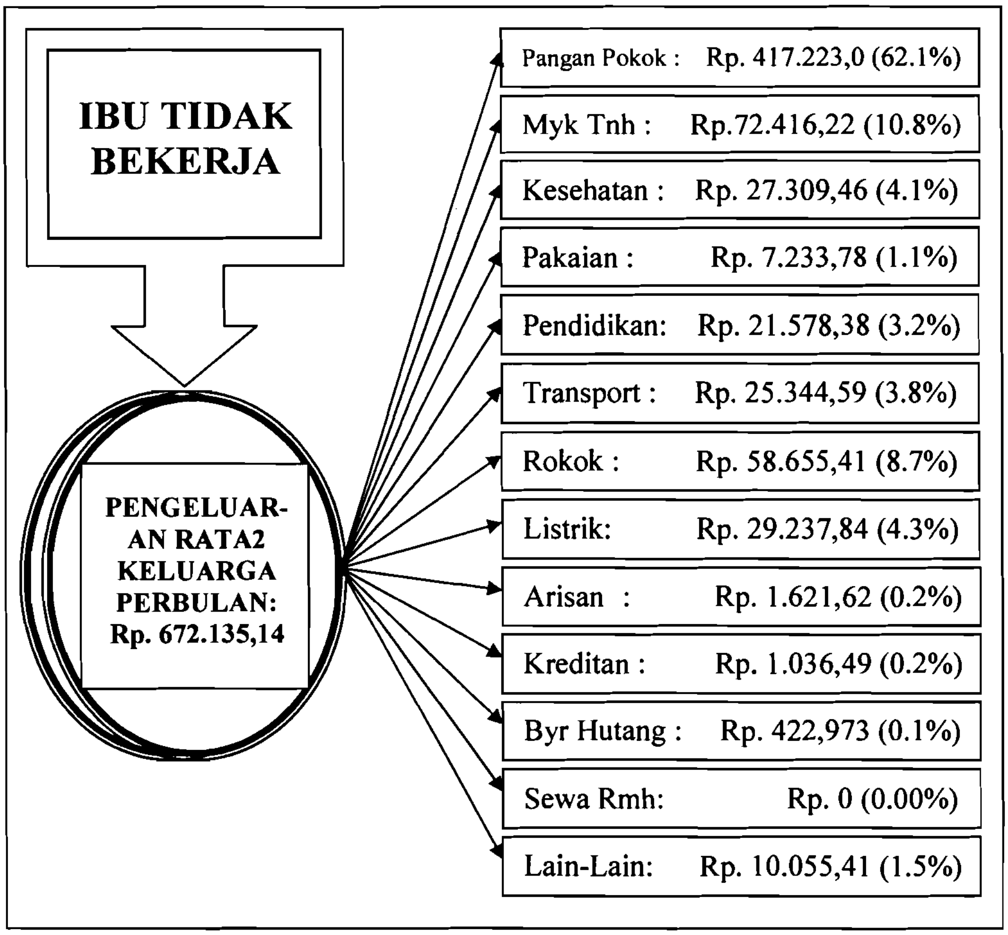

Gambar 5 Alur alokasi pendapatan keluarga terhadap pengeluaran pada contoh ibu tidak bekerja

Berdasarkan alur di atas dapat dilihat bahwa total rata-rata pengeluaran pada ibu yang tidak bekerja per bulannya adalah sebesar Rp. 672.135,14. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata pengeluaran contoh pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja lebih tinggi daripada jumlah rata-rata pendapatan yang dimiliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan yang contoh terima setiap bulannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan pokok, yaitu pada contoh ibu bekerja (61.7%) lebih rendah daripada ibu tidak bekerja (62.1%). Contoh ibu bekerja tidak mengalokasikan pendapatan untuk pengeluaran arisan dan hutang, sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja memiliki pengeluaran untuk kedua hal tersebut walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu masing-masing sebesar 0.2 dan 0.1 persen. Pada contoh ibu tidak bekerja, mereka tidak memiliki pengeluaran untuk biaya sewa rumah. Hal ini berbeda pada contoh ibu bekerja yang memiliki pengeluaran untuk biaya sewa rumah sebesar 0.2 persen.

Berdasarkan hasil uji beda T dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$) antara pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara alokasi pengeluaran untuk pangan, kesehatan, pendidikan, pakaian, operasional rumah, hutang, transportasi dan lain-lain pada contoh keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Verifikasi Kriteria RumahTangga Miskin Penerima SLT

Berdasarkan hasil penelitian lebih dari 80 persen keluarga dengan KK laki-laki maupun perempuan memiliki sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan, hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari, pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD, bahkan semua keluarga (100%) menggunakan bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah (Tabel 16).

Sebanyak 80.4 persen keluarga dengan KK perempuan memiliki sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah petani dengan luas 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan, sedangkan pada KK laki-laki jumlah tersebut mencapai 75.9%.

Tabel 16. Kriteria Rumahtangga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin KK

No	KRITERIA	KK Laki-laki				KK Perempuan			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal < $8m^2$ per orang	57	50.9	55	49.1	28	50.0	28	50.0
2	Jenis lantai bangunan tenpat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan	51	45.5	61	54.5	25	44.6	31	55.4
3	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester	46	41.1	66	58.9	27	48.2	29	51.8
4	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumahtangga lain	56	50.0	56	50.0	27	48.2	29	51.8
5	Sumber penerangan rumahtangga tidak menggunakan listrik	16	14.3	96	85.7	8	14.3	48	85.7
6	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan	98	87.5	14	12.5	49	87.5	7	12.5
7	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah	112	100	0	0.0	56	100	0	0.0
8	Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ayam satu kali dalam seminggu	64	57.1	48	42.9	39	69.6	17	30.4
9	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun	89	79.5	23	20.5	41	73.2	15	26.8
10	Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari	93	83.0	19	17.0	51	91.1	5	8.9
11	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik	42	37.5	70	62.5	34	60.7	22	39.3
12	Sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah petani dengan luas 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan	85	75.9	27	24.1	45	80.4	11	19.6
13	Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD	91	81.3	21	18.8	54	96.4	2	3.6
14	Tidak memiiki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/ non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.	81	72.3	31	27.7	43	76.8	13	23.2

Sedangkan untuk keluarga yang tidak mengunakan listrik sebagai alat penerangan hanya 14.3%, baik pada KK laki-laki maupun KK perempuan. Beberapa hal yang lebih banyak dialami oleh keluarga dengan KK perempuan dibandingkan KK laki-laki adalah tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik (60.7%), hanya mengkonsumsi daging/ susu/ayam satu kali dalam (60.7%) seminggu, sedangkan pada KK laki-laki kondisi tersebut dialami oleh sekitar 37.5%-57.1%.

Untuk kondisi lainnya, seperti luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi (< $8m^2$) per orang, jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumahtangga lain hanya berkisar antara 40-50% pada KK laki-laki maupun KK perempuan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hampir tiga perempat keluarga pada KK laki-laki maupun KK perempuan hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun dan tidak memiiki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/ non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Melihat data-data tersebut maka dapat dikatakan bahwa keluarga dengan KK perempuan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih berat dibandingkan KK laki-laki.

Tabel 17 menjelaskan verifikasi kriteria kemiskinan. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 55 persen keluarga contoh terbukti tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan salah sasaran. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BPS (2005), dinyatakan bahwa kriteria rumahtangga yang layak mendapatkan SLT adala rumahtangga yang memenuhi minimal 9 atau lebih ciri rumahtangga.

Tabel 17. Sebaran Responden Berdasarkan Verifikasi Kriteria Kemiskinan

Kategori Memenuhi	KK Laki-laki		KK Perempuan		Total	
	n	%	n	%		
3-5	15	13.4	5	8.9	20	11.9
6-8	47	42.0	24	42.9	71	42.3
9-14*	50	44.6	27	48.2	77	45.8
Total	112	100	56	100	168	100

* yang layak menerima SLT

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 18, lebih dari setengah contoh ibu bekerja memiliki luas lantai bangunan tempat tinggal < $8m^2$ per orang (63.6%), sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu lebih dari setengahnya memiliki luas lantai bangunan tempat tinggal sebesar > $8m^2$ per orang (55.4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar contoh ibu tidak bekerja tidak memenuhi verifikasi kriteria rumah tangga miskin penerima SLT-BBM kategori luas lantai bangunan tempat tinggal yang seharusnya yaitu < $8m^2$.

Untuk keadaan jenis lantai bangunan tempat tinggal yang terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan dan jenis dinding tempat tinggal yang terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester pada contoh ibu bekerja masing-masing sebanyak 48.5 persen, sedangkan pada contoh ibu yang tidak bekerja masing-masing sebanyak 45.9 persen dan 54.1 persen. Hanya sebagian kecil contoh ibu bekerja yang tidak memiliki fasilitas buang air besar pada tempat tinggal mereka (39.4%), namun pada contoh ibu tidak bekerja yaitu lebih dari setengahnya yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri melainkan harus bersama-sama dengan rumah tangga lain (55.4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar contoh ibu bekerja memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain, sedangkan yang menjadi kriteria rumah tangga miskin penerima SLT adalah mereka yang seharusnya tidak memiliki fasilitas buang air tersebut.

Sumber penerangan pada rumah baik untuk contoh ibu bekerja dan tidak bekerja yang tidak menggunakan listrik yaitu masing-masing sebesar 9.1 persen dan 16.2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar contoh menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada rumah mereka. Lebih dari ¾ contoh baik pada ibu yang bekerja (84.8%) dan pada ibu yang tidak bekerja (89.2%) menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau dari sungai atau dari air hujan.

Terdapat keseragaman pada seluruh contoh (100%) dalam hal bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari baik pada keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja dimana mereka menggunakan kayu bakar/ arang/ minyak tanah. Untuk jumlah frekuensi makan keluarga, terlihat lebih dari ¾ contoh yaitu pada ibu bekerja (90.9%) dan ibu tidak bekerja (82.4%) masing-masing hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. Sedangkan lebih dari setengah contoh baik pada ibu bekerja (60.6%) dan pada contoh ibu tidak bekerja (58.1%) mengkonsumsi daging /susu /ayam dalam seminggunya hanya sanggup sebanyak satu kali.

Tabel 18. Sebaran contoh berdasarkan verifikasi kriteria rumah tangga miskin (n=107) pada KK laki-laki

No	KRITERIA	IBU BEKERJA				IBU TIDAK BEKERJA			
		YA		TIDAK		YA		TIDAK	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal < $8m^2$ per orang	21	63.6	12	36.4	33	44.6	41	55.4
2	Jenis lantai bangunan tenpat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan	16	48.5	17	51.5	34	45.9	40	54.1
3	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester	16	48.5	17	51.5	29	39.2	45	60.8
4	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumahtangga lain	13	39.4	20	60.6	41	55.4	33	44.6
5	Sumber penerangan rumahtangga tidak menggunakan listrik	3	9.1	30	90.9	12	16.2	62	83.8
6	Sumber air minum berasal dari susia/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan	28	84.8	5	15.2	66	89.2	8	10.8
7	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah	33	100.0	0	0.0	74	100.0	0	0.0
8	Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ayam satu kali dalam seminggu	20	60.6	13	39.4	43	58.1	31	41.9
9	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun	27	81.8	6	18.2	59	79.7	15	20.3
10	Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari	30	90.9	3	9.1	61	82.4	13	17.6
11	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik	11	33.3	22	66.7	30	40.5	44	59.5
12	Sumber penghasilan kepala rumahtangga adalah petani dengan luas 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan	27	81.8	6	18.2	55	74.3	19	25.7
13	Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD	29	87.9	4	12.1	57	77.0	17	23.0
14	Tidak memiiki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/ non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.	9	27.3	24	72.7	15	20.3	59	79.7

Sumber penghasilan kepala rumah tangga pada contoh ibu bekerja adalah petani dengan luas 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000/bulan sebanyak 81.8 persen, sedangkan untuk contoh ibu tidak bekerja adalah sebanyak 74.3 persen. Sebagian besar pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD, yaitu pada contoh ibu bekerja 87.9 persen dan ibu tidak bekerja sebesar 77.0 persen. Contoh yang tidak memiiki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit atau non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya pada keluarga ibu bekeerja dan tidak bekerja relatif rendah yaitu masing-masing sebesar 27.3 persen dan 20.3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari ¾ contoh peneerima SLT memiliki *asset liquid* lebih dari Rp.500.000.

Berdasarkan hasil uji beda T pada Lampiran 9, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$) antara karakteristik rumah tangga miskin pada contoh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara verifikasi rumah tangga miskin pada contoh keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Dalam satu tahunnya, sebagian besar contoh yaitu pada ibu bekerja (81.8%) dan pada ibu tidak bekerja (79.7%) hanya mampu membeli pakaian baru sebanyak satu stel. Menurut pengakuan beberapa contoh, pakaian yang di beli adalah pakaian untuk lebaran dan sebagian besar di beli secara kredit. Contoh yang tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik pada ibu bekerja adalah sebanyak 33.3 persen dan pada ibu tidak bekerja 40.5 persen. Hal ini menunjukan bahwa lebih dari setengah contoh mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga pada contoh ibu bekerja adalah petani dengan luas 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000/bulan sebanyak 81.8 persen, sedangkan untuk contoh ibu tidak bekerja adalah sebanyak 74.3 persen. Sebagian besar pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD, yaitu pada contoh ibu bekerja 87.9 persen dan ibu tidak bekerja sebesar 77.0 persen. Contoh yang tidak memiiki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor

(kredit atau non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya pada keluarga ibu bekeerja dan tidak bekerja relatif rendah yaitu masing-masing sebesar 27.3 persen dan 20.3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari ¾ contoh peneerima SLT memiliki *asset liquid* lebih dari Rp.500.000.

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$) antara karakteristik rumah tangga miskin pada contoh ibu yang bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata antara verifikasi rumah tangga miskin pada contoh keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat contoh yang tidak memenuhi kriteria rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaktepatan sasaran pemberian dana SLT pada keluarga miskin, karena masih ada kriteria rumah tangga miskin yang tidak terpenuhi. Keadaan ini sesuai dengan Suhartiningsih (2005) yang mengungkapkan bahwa subsidi selama ini tidak dinikmati oleh keluarga miskin. Berdasarkan Depkominfo (2005), rumah tangga yang berhak menerima SLT-BBM adalah rumah tangga yang memiliki 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin, sehingga rumah tangga yang memiliki kriteria kurang dari 9 tidak layak untuk mendapatkan SLT-BBM tersebut. Berikut adalah tabel kelayakan penerimaan SLT-BBM berdasarkan verifikasi kriteria rumah tangga miskin.

Tabel 19. Sebaran contoh atas kelayakan penerimaan SLT berdasarkan kriteria keluarga miskin pada KK laki-laki

Keterangan	Ibu Bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sangat Tdk Layak (3-5)	1	3.0	13	17.6	14	10.3
Tidak Layak (6-8)	17	51.5	27	36.5	44	44.0
Layak (>9)	15	45.5	34	45.9	49	45.7
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Std. Deviasi	0.561		0.749		0.697	
Uji Beda T			0.286			

Berdasarkan Tabel 19 di atas, banyak terjadi ketidaktepatan pemberian dana SLT-BBM di lokasi penelitian. Hal ini dapat dilihat secara keseluruhan dari keluarga yang dijadikan contoh dalam penelitian ini masih banyak yang ternyata tidak berhak untuk menerima SLT-BBM yaitu lebih dari setengahnya. Adapun keluarga yang sangat tidak layak menerima SLT dalam penelitian ini adalah keluarga yang hanya memenuhi 3-5 kriteria (10.3%), sedangkan yang tidak layak menerima adalah yang memenuhi 6-8 kritria (44.0%) dan yang layak menerima SLT adalah yang memenuhi lebih dari 9 kriteria (45.7%) dari 14 kriteria keluarga miskin yang telah ditetapkan.

Pada contoh ibu bekerja, terdapat 3.0 persen keluarga yang sangat tidak layak menerima SLT lebih sedikit bila dibandingkan dengan keluarga pada contoh ibu tidak bekerja (17.6%). Sedangkan lebih dari setengah keluarga pada ibu bekerja yang tidak layak menerima SLT (51.5%) dan pada contoh ibu tidak bekerja adalah lebih dari sepertiga persen (36.5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat lebih dari setengah contoh yang kurang dari 9 kriteria keluarga miskin ternyata mendapatkan SLT. Jadi, pemberian SLT yang tepat sasaran hanya kurang dari setengahnya, baik pada contoh ibu bekerja (45.5%) atau ibu tidak bekerja (45.9%).

Menurut SMERU (2006), beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran penerimaan SLT adalah :

1. Tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai
2. Cukup tingginya subjektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin
3. Prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama
4. Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah
5. Terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga
6. Indikator kemiskinann yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara utuh
7. Terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap dalam kuesioner
8. Konsep keluarga atau rumah tangga sebagai unit penerima SLT tidak ditetapkan secara tegas.

Berdasarkan hasil uji beda T, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata ($p > 0.05$) antara kelayakan penerima SLT pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara layak atau tidaknya contoh menerima SLT berdasarkan 14 kriteria keluarga miskin pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Permasalahan Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

Permasalahan responden sesudah kenaikan BBM nampaknya lebih banyak dibandingkan sebelum kenaikan BBM (Tabel 20). Masalah yang paling banyak dialami keluarga sebelum kenaikan BBM adalah kesulitan keuangan keluarga (63.7%) dan minimnya aset keluarga (52.4%). Sebagain besar responden (95.8%) tidak mengalami masalah hubungan/konflik dengan tetangga, hal ini terlihat sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Sedangkan masalah hubungan/konflik dengan keluarga meningkat setelah terjadi kenaikan harga BBM, yaitu menjadi 19.6 persen dan sebelumnya hanya 12.5 persen.

Kondisi yang sama juga terlihat bahwa permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh keluarga setelah kenaikan harga BBM adalah masalah keuangan keluarga. Jumlah keluarga yang mengalami kondisi tersebut meningkat tajam, yaitu menjadi 89.3 persen pada saat sesudah kenaikan harga BBM. Masalah lain yang banyak dialami keluarga sesudah kenaikan harga BBM adalah masalah ketersediaan makanan (66.7%) dan pekerjaan yang tidak menentu (56.5%). Pada saat sebelum kenaikan BBM, masalah masalah tersebut hanya dialami kurang dari 50% responden. Sedangkan minimnya aset keluarga tetap menjadi masalah pada saat sesudah kenaikan BBM (54.8%). Jumlah tersebut tidak banyak berubah dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM. Masalah-masalah lain yang dihadapi keluarga adalah pendidikan anak, kesehatan keluarga, tempat tinggal yag minim, suami tidak memiliki pekerjaan, suami merokok setiap hari, pembagian tugassuami isteri dan beban pekerjaan isteri menjadi berat.

Secara umum terdapat banyak masalah yang dihadapi keluarga pada saat sebelum maupun sesudah kenaikan BBM. Perbedaan yang terjadi adalah jumlah keluarga yang mengalami masalah menjadi meningkat setelah terjadi kenaikan BBM. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga yang semakin tidak stabil dan semakin menurun.

Tabel 20. Permasalahan Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM pada KK Total (n=168)

NO	PERNYATAAN	SEBELUM				SESUDAH			
		TIDAK		YA		TIDAK		YA	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Masalah Ketersediaan Makanan	114	67.9	54	32.1	56	33.3	112	66.7
2	Kesulitan keuangan keluarga	61	36.3	107	63.7	18	10.7	150	89.3
3	Masalah pekerjaan yang tidak menentu	92	54.8	76	45.2	73	43.5	95	56.5
4	Masalah jaminan pendidikan anak	115	68.5	53	31.5	100	59.5	68	40.5
5	Masalah kesehatan keluarga	122	72.6	46	27.4	97	57.7	71	42.3
6	Masalah hubungan/ konflik dalam keluarga	147	87.5	21	12.5	135	80.4	33	19.6
7	Masalah hubungan/ konflik dengan tetangga	161	95.8	7	4.2	161	95.8	7	4.2
8	Masalah minimnya tempat tinggal	118	70.2	50	29.8	112	66.7	56	33.3
9	Masalah minimnya aset keluarga	80	47.6	88	52.4	76	45.2	92	54.8
10	Masalah suami tdk punya pekerjaan tetap	117	69.6	51	30.4	102	60.7	66	39.3
11	Masalah suami merokok tiap hari	122	72.6	46	27.4	114	67.9	54	32.1
12	Masalah pembagian tugas suami istri	142	84.5	26	15.5	140	83.3	28	16.7
13	Masalah beban pekerjaan istri yg berat	123	73.2	45	26.8	107	63.7	61	36.3

Jika dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang dan berat maka sebagian besar keluarga (64.9%) memiliki permasalahan yang ringan pada saat sebelum kenaikan harga BBM (Tabel 21). Sedangkan pada saat sesudah kenaikan harga BBM, sebagian besar keluarga (56%) memiliki permasalahan dengan kategori sedang, bahkan yang berat meningkat menjadi 5.4 persen.

Tabel 21. Sebaran Responden Berdasarkan kategori Permasalahan Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan harga BBM pada KK Total

Kategori	Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%
Ringan (13-17)	109	64.9	65	38.7
Sedang (18-22)	53	31.5	94	56.0
Tinggi (23-26)	6	3.6	9	5.4

Permasalahan yang banyak (lebih dari 50%) dialami oleh keluarga dengan KK laki-laki maupun perempuan sebelum kenaikan harga BBM adalah masalah keuangan dan minimnya aset keluarga. Masalah lainnya yang banyak (41.1-47.3%) dialami adalah pekerjaan yang tidak menentu. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari 42.9 persen KK laki-laki yang menyatakan bahwa masalah yang dihadapinya adalah suami tidak memiliki pekerjaan tetap (Lampiran 3).

Keluarga yang menghadapi masalah seperti pekerjaan tidak menentu dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap menyebabkan penghasilan keluargapun juga tidak menentu. Hal inilah yang menyebabkan keluarga banyak mengalami kesulitan uang. Keadaan ini lebih parah lagi setelah harga BBM meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatknya berbagai masalah yang dihadapi oleh keluarga, termasuk masalah tidak menetunya pekerjaan dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Dampak dari masalah tersebut adalah meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki kesulitan keuangan setelah kenaikan harga BBM, yaitu mencapai 87.5 persen pada KK laki-laki dan 92.9 persen pada KK perempuan.

Sebagai akibat kesulitan keuangan, maka menimbulkan masalah lain yang lebih meningkat, seperti masalah ketersediaan makan. Jumlah keluarga yang mengalami masalah tersebut meningkat cukup banyak setelah kenaikan harga BBM, yaitu 66.1 persen pada KK laki-laki dan 67.9 persen pada KK perempuan. Adanya berbagai masalah yang dihadapi keluarga menjadikan beban isteri menjadi lebih berat. Hal ini terlihat dari meningkatnya responden yang menyatakan bahwa pekerjaan isteri menjadi berat setelah kenaikan BBM. Sebelum kenaikan harga BBM jumlah responden yang menyatakan tersebut sebanyak 25.0 persen pada KK laki-laki dan 30.4 persen pada KK perempuan dan setelah kenaikan harga BBM jumlah tersebut menjadi 33.0 persen pada KK laki-laki dan 42.9 persen pada KK perempuan. Selain beban istri menjadi berat, ditemukan masalah lain seperti konflik dalam keluarga. Jumlah responden yang mengalami konflik dalam keluarga meningkat setelah kenaikan harga BBM, yaitu menjadi 19.6 persen pada KK laki-laki maupun KK perempuan (Lampiran 3).

Jika dilihat berdasarkan kategorinya, maka pada umumnya permasalahan yang dihadapi keluarga sebelum kenaikan harga BBM termasuk kategori ringan (59.8% KK laki-laki dan 75.0% KK perempuan). Sedangkan sesudah kenaikan harga BBM setengah KK laki-laki (59.8%) mengahadapi permasalahan dengan kategori sedang, dan setengah KK perempuan (50.0%) mengahdapi permasalahan dengan kategori masih tetap ringan. Pada KK perempuan, jumlah keluarga yang menghadapi permasalahan dengan kategori sedang juga meningkat menjadi 48.2 persen. Keadaan yang berbeda, dimana pada keluarga dengan KK laki-laki, jumlah keluarga yang menghadapi permasalahan kategori berat meningkat menjadi 7.1 persen dan sebelum kenaikan harga jumlahnya hanya mencapai 4.5 persen (Tabel 22).

Tabel 22. Sebaran Responden Berdasarkan Kategori Permasalahan Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan harga BBM

Kategori	KK Laki-laki				KK Perempuan			
	Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Ringan (13-17)	67	59.8	37	33.0	42	75.0	28	50.0
Sedang (18-22)	40	35.7	67	59.8	13	23.2	27	48.2
Tinggi (23-26)	5	4.5	8	7.1	1	1.8	1	1.8

Permasalahan diringkas menjadi beberapa jenis masalah, yaitu (1) Masalah pangan (masalah ketersediaan pangan dan masalah suami merokok setiap hari), (2) Masalah keuangan dan aset (kesulitan keungan keluarga, masalah minimnya tempat tinggal dan masalah minimnya aset keluarga), (3) Masalah pekerjaan (masalah pekerjaan yang tidak menentu, masalah suami tdk punya pekerjaan tetap, masalah pembagian tugas suami istri dan masalah beban pekerjaan istri yg berat), (4) Masalah pendidikan, (5) Masalah kesehatan, dan (6) Masalah sosial (masalah hubungan atau konflik dalam keluarga dan masalah hubungan atau konflik dengan tetangga).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 6), sebagian besar contoh mengalami masalah keuangan dan aset keluarga sebelum kenaikan harga BBM baik pada contoh ibu bekerja (48.5%) dan pada ibu tidak bekerja (47.3%). Namun sesudah kenaikan harga BBM, persentase masalah ini yaitu meningkat menjadi 59.5 persen pada contoh ibu bekerja dan 54.6 persen pada ibu tidak bekerja.

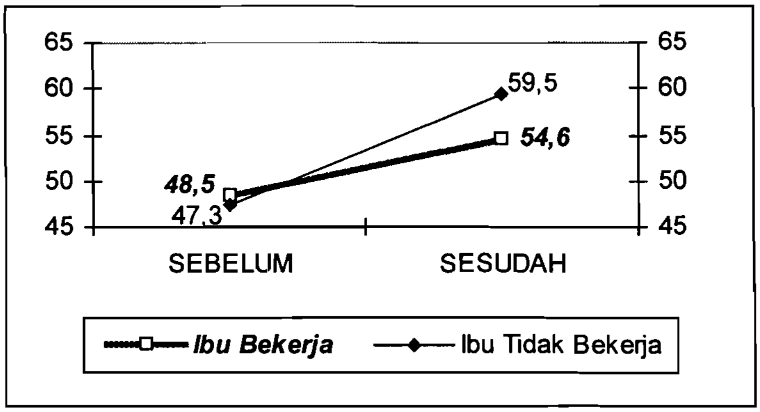

Gambar 6. Sebaran contoh mengalami masalah keuangan dan aset pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Lebih dari sepertiga contoh pada ibu bekerja mengalami masalah pangan sebelum kenaikan BBM (36.3%) dan sesudah harga BBM naik masalah ini meningkat menjadi 54.6 persen. Peningkatan juga terjadi pada contoh ibu tidak bekerja dalam masalah yang serupa. Semula hanya kurang dari sepertiga contoh (33.8%) mengalami masalah pangan, namun sesudah BBM naik menjadi 56.7 persen. Berikut adalah grafik sebaran contoh yang mengalami masalah pangan selama perubahan harga BBM :

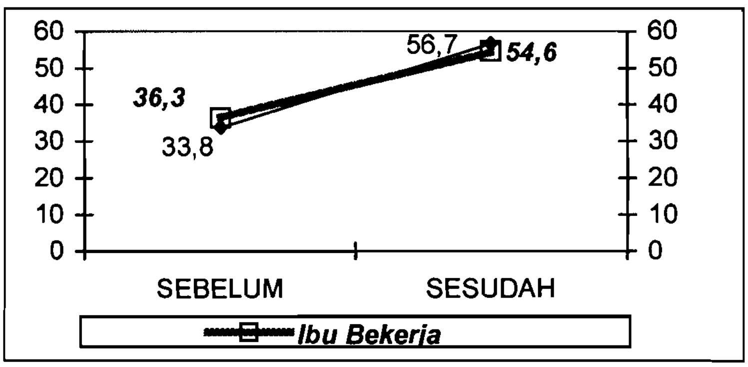

Gambar 7. Sebaran contoh mengalami masalah pangan pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Lebih dari sepertiga contoh baik pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja mempunyai masalah dalam hal pekerjaan. Pada contoh ibu bekerja, masalah pekerjaan ini menjadi meningkat persentasenya sesudah kenaikan harga BBM yaitu yang semula hanya 41.7 persen menjadi 48.5 persen, sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja yang semula 32.4 persen menjadi 41.9 persen. Berikut adalah gambar grafik sebaran contoh yang mengalami masalah pekerjaan selama perubahan harga BBM :

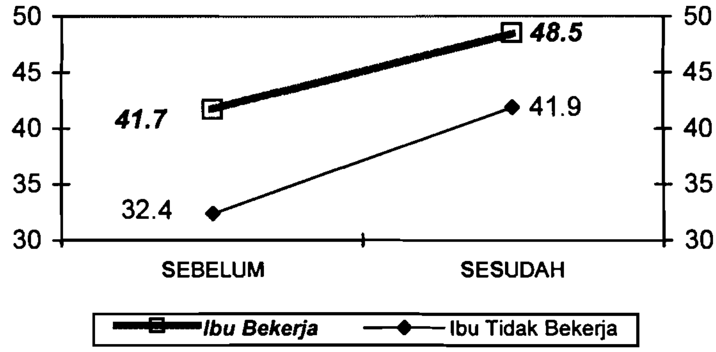

Gambar 8. Sebaran contoh mengalami masalah pekerjaan pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Peningkatan persentase terjadi pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja mengenai masalah jaminan pendidikan bagi anak. Lebih dari sepertiga contoh pada ibu bekerja (30.3%) yang mengalaminya sebelum kenaikan BBM, namun sesudah kenaikan BBM bertambah menjadi 36.3 persen. Sedangkan pada contoh ibu tidak bekerja sebelum kenaikan BBM yang mengalami masalah ini sebanyak lebih dari sepertiganya (37.8%), namun sesudah kenaikan harga BBM angka tersebut bertambah menjadi 50.0 persen.

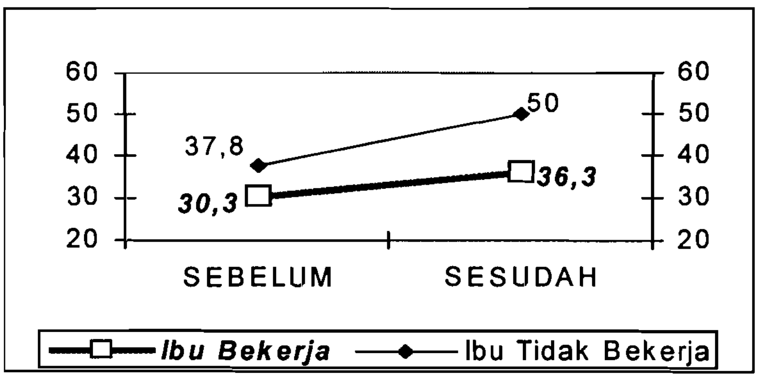

Gambar 9. Sebaran contoh mengalami masalah pendidikan pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Permasalahan lain yang dialami oleh contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja adalah mengenai masalah kesehatan keluarga (Gambar 10). Sebelum kenaikan

BBM, contoh ibu bekerja yang mengalami masalah ini cukup besar yaitu lebih dari seperempatnya (30.3%) dan sesudah kenaikan BBM persentase menjadi meningkat yaitu menjadi 48.5 persen. Peningkatan masalah ini pada contoh ibu tidak bekerja cukup tinggi, yaitu yang semula sebelum kenaikan BBM hanya sebanyak 28.4 persen lalu sesudah BBM naik menjadi 41.9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam hal kesehatan yang terjadi pada contoh ibu tidak bekerja lebih banyak daripada contoh ibu bekerja.

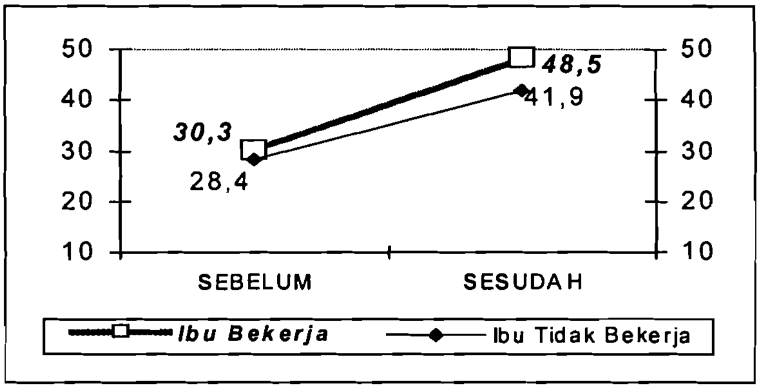

Gambar 10. Sebaran contoh mengalami masalah kesehatan pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Hanya sebagian kecil saja contoh yang mengalami masalah sosial sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Sebelum kenaikan BBM, contoh ibu bekerja yang mengalami permasalahan ini hanya sebanyak 12.1 persen, namun sesudah BBM naik persentasenya menjadi meningkat sebesar 15.2 persen. Hal serupa terjadi pada contoh ibu tidak bekerja yaitu yang semula hanya 9.5 persen menjadi 10.8 persen. Berikut adalah grafik sebaran contoh berdasarkan permasalahan tersebut :

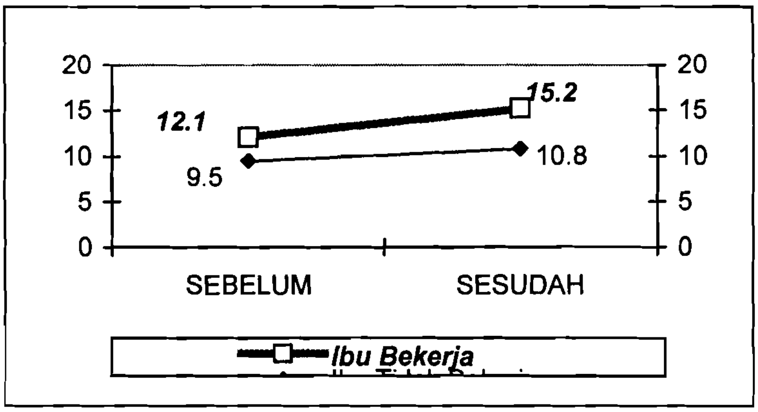

Gambar 11. Sebaran contoh mengalami masalah sosial pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM

Hasil penelitian menunjukkan hanya sebagian kecil contoh yang mengalami pertengkaran dalam rumah tangga selama pra dan pasca kenaikan harga BBM. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13 yaitu sebanyak kurang lebih ¾ contoh secara keseluruhan yaitu baik pada contoh ibu yang bekerja (75.8%) dan ibu tidak bekerja (72.3%) yang menyatakan tidak adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena perubahan harga BBM. Sedangkan sebanyak 18.2 persen contoh ibu bekerja dan 19.2 persen ibu tidak bekerja menyatakan bahwa selama perubahan harga BBM pertengkaran dalam rumah tangga mereka berada dalam kategori tetap, artinya tidak ada peningkatan maupun penurunan.

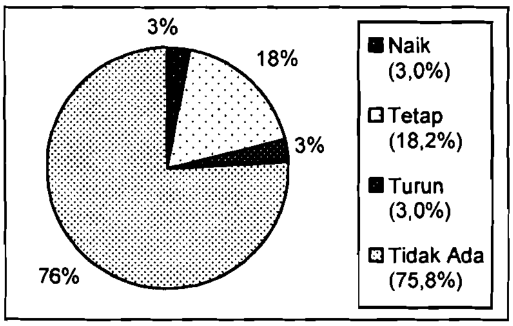

Gambar 12 Sebaran contoh ibu bekerja yang mengalami masalah pertengkaran RT

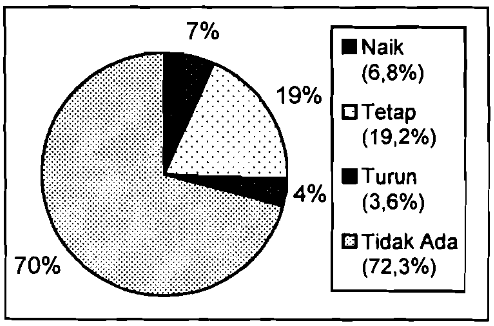

Gambar 13 Sebaran contoh ibu tidak bekerja yang mengalami masalah pertengkaran RT

Hanya sebagian kecil contoh yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan dan penurunan konflik dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada angka penurunan konflik rumah tangga pada contoh ibu bekerja (3.0%) yang tidak berbeda jauh dengan ibu tidak bekerja (3.6%), sedangkan angka kenaikan konflik rumah tangga contoh ibu bekerja (3.0%) lebih rendah daripada contoh ibu tidak bekerja (6.8%).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang hampir selalu dialami oleh setiap keluarga. Berdasarkan Gambar 14, hampir tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dari seluruh contoh baik pada keluarga ibu yang bekerja (93.9%) maupun ibu yang tidak bekerja (94.6%). Penurunan kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada keluarga contoh ibu yang tidak bekerja (1.4%). Tidak adanya perubahan kekerasan dalam rumah tangga pada ibu bekerja sebanyak 6.1 persen dan pada contoh ibu tidak bekerja adalah 4.1 persen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga akibat perubahan harga BBM ini baik pada contoh ibu bekerja atau pada ibu tidak bekerja.

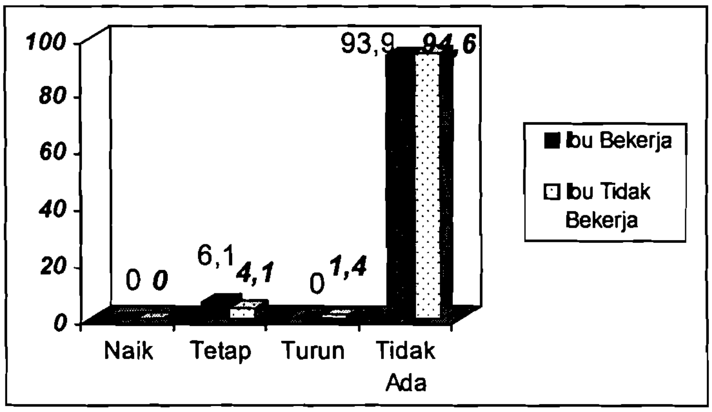

Gambar 14. Sebaran contoh berdasarkan masalah kekerasan dalam rumah tangga

Jika dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang dan berat, maka sebagian besar keluarga baik pada contoh ibu bekerja (48.5%) dan ibu tidak bekerja (63.5%) memiliki permasalahan yang ringan pada saat sebelum kenaikan harga BBM. Sedangkan pada saat sesudah kenaikan harga BBM, sebagian besar keluarga yaitu pada contoh ibu bekerja (57.6%) dan ibu tidak bekerja (63.5%) memiliki permasalahan dengan kategori sedang. Hanya sebagian kecil contoh yang memiliki permasalahan dengan tinggi, yaitu misalnya pada keluarga ibu bekerja sebelum kenaikan BBM (6.1%) meningkat sesudah kenaikan BBM (9.1%) dan pada ibu yang bekerja peningkatan terjadi dari 4.1% menjadi 6.8%.

Tabel 23. Sebaran contoh berdasarkan kategori permasalahan sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM (n=107)

Kategori	Ibu Bekerja						Ibu Tidak Bekerja					
	Sebelum		Sesudah		Total		Sebelum		Sesudah		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ringan (13-17)	16	48.5	11	33.3	14	40.9	47	63.5	22	29.7	35	46.6
Sedang (18-22)	15	45.4	19	57.6	17	51.5	24	32.4	47	63.5	35	47.9
Tinggi (23-26)	2	6.1	3	9.1	2	7.6	3	4.1	5	6.8	4	5.5
Total	33	100.0	33	100.0	33	100.0	74	100.0	74	100.0	74	100.0

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p > 0.05$) antara masalah-masalah yang dialami sebelum dan sesudah kenaikan BBM pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara masalah pangan, masalah keuangan dan aset keluarga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Alur Pembelanjaan Uang SLT-BBM

Setengah dari jumlah uang SLT digunakan responden untuk belanja pangan. Rata-rata uang SLT yang dibelanjakan untuk pangan adalah Rp 150 375 (Tabel 33). Selain untuk belanja pangan, responden juga menggunakan uang SLT untuk keperluan perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, bayar hutang, membeli rokok untuk suami, modal, memberi ke saudara dan anak, zakat, nabung, transport, listrik dan lain-lain. Diantara keperluan-keperluan tersebut, maka penggunaan uang SLT untuk keperluan bayar hutang, membeli pakaian, keperluan kesehatan dan pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan keperluan lainnya. Uang SLT yang digunakan untuk keperluan tersebut sekitar 6.6 -9.8%.

Rata-rata uang SLT yang digunakan untuk membayar hutang adalah Rp 29 313.61 untuk membeli pakaian Rp 22 877.98, keperluan kesehatan

Rp 22 094.67 dan untuk pendidikan adalah sebesar Rp 19 863.10. Sedangkan untuk keperluan lainnya, uang SLT yang digunakan sekitar 0.5 - 4.2 persen (Tabel 24). Meskipun kecil jumlahnya, responden juga menggunakan uang SLT untuk membeli rokok suaminya. Rata-rata uang SLT yang dibelanjakan untuk rokok adalah Rp 1 547.62 atau sekitar 0.5 persen.

Tabel 24. Alur Pembelanjaan Uang SLT

Uraian Pengeluaran	Jumlah	Persentase*
Pangan	150 375.00 ± 97 007.99	50.1
Perumahan	4 077.38 ± 24 351.71	1.4
Pendidikan	19 863.10 ± 58 393.35	6.6
Kesehatan	22 094.67 ± 63 584.03	7.4
Pakaian	22 877.98 ± 63 584.03	7.6
Bayar hutang	29 313.61 ± 60 726.47	9.8
Rokok	1 547.62 ± 9539.59	0.5
Modal	12 654.76 ± 47 584.28	4.2
Memberi ke anak	2 678.57 ± 10 678.94	0.9
Memberi ke saudara	2 142.86 ± 14 482.81	0.7
Zakat	6 630.95 ± 20 020.14	2.2
Menabung	6 345.24 ± 25 693.43	2.1
Transport	7 708.33 ± 29 843.17	2.6
Listrik	4 422.62 ± 13 879.07	1.5
Lain-lain	7 267.38 ± 34.535.25	2.4

Keterangan : Persentase dari Rp 300 000

Uang SLT yang diterima rata-rata habis dalam tempo 11 hari. Proporsi tertinggi responden (38.1%) dalam menghabiskan uang SLT adalah antara 2-7 hari. Bahkan yang habis dalam satu hari mencapai 28.0 persen. Selain itu juga ada sekitar 3.6 persen responden yang dapat menghabiskan uang SLT dalan jangka waktu lebih dari satu bulan (Tabel 25).

Tabel 25. Sebaran Responden Berdasarkan Lama Habisnya Uang SLT

Lama habis Uang SLT	n	%
1 hari	47	28.0
2-7 hari	64	38.1
8-14 hari	20	11.9
15 - 21 hari	11	6.5
22 hari – 30 hari	20	11.9
Lebih dari 30 hari	6	3.6
Total	168	100.0
Rata-rata ± std	11.25 ± 14.70	

Hampir setengah (49.4%) dari jumlah responden menyatakan bahwa penerima uang SLT adalah suami dan sepertiga lebih (39.3%) sebagai penerimanya adalah istri. Keadaan yang cukup mengkhawatirkan adalah bahwa yang menerima SLT adalah calo, meskipun dinyatakan oleh 0.6 persen responden (Tabel 26).

Tabel 26. Sebaran Responden Berdasarkan Penerima Uang SLT

Pengambil Uang	n	%
Suami	83	49.4
Istri	66	39.3
Anak	15	8.9
Lainnya (Saudara dan Calo)	4	2.4
Total	168	100.0

Jika uang tersebut diambil oleh suami, maka ada 15.7 persen suami (13 orang suami) yang tidak menyerahkan semua uang SLT kepada isterinya. Jumlah uang yang diserahkan kepada isterinya bervariasi yaitu Rp 30 000 (7.7%), Rp 100 000 (15.4%), Rp 150 000 (30.8%), Rp 170 000 (7.7%), Rp 200 000 (30.8%) dan Rp 280 000 (7.7%).

Uang SLT yang diterima oleh responden digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, membayar hutang, membeli rokok, modal, memberi ke anak dan saudara, zakat, menabung, transport dan bayar listrik. Dari berbagai keperluan tersebut maka belanja pangan paling banyak dilakukan oleh responden. Jumlah uang yang dibelanjakan untuk pangan pada keluarga dengan KK perempuan (Rp 158 765.3) lebih tinggi dibandingkan KK laki-laki (Rp 190 274.5) (Tabel 27). Selain untuk pangan, jumlah penggunaan uang SLT yang lebih tinggi pada KK perempuan

Tabel 27. Sebaran Responden Berdasarkan Alur Pembelanjaan Uang SLT

Uraian Pengeluaran	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	Rata-rata ± Std	n	Rata-rata ± Std
Pangan	98	158 765.3 ± 86 872.4	51	190 274.5 ± 80 223.5
Perumahan	6	114 166.7 ± 68 732.6	0	0
Pendidikan	15	162 066.7 ± 96 309.4	8	113 250.0 ± 36 393.7
.Ksehatan	18	166 027.8 ± 93 734.1	5	124 700.0 ± 76 716.7
Pakaian	28	114 410.7 ± 69 958.1	7	91 428.57 ± 59 561.9
Bayar hutang	33	108 363.6 ± 87 603.8	16	82 562.5 ± 35 916.5
Rokok	6	43 333.3 ± 29 439.2	0	0
Modal	9	130 666.7 ± 48 569.5	5	190 000.0 ± 114 017.5
Memberi ke anak	10	28 000.0 ± 16 700.0	3	56 666.7 ± 11 547.0
Memberi ke saudara	4	45 000.0 ± 70 000.0	4	45 000.0 ± 40 414.5
Zakat	15	56 300.0 ± 27 190.9	7	38 500.0 ± 31 752.9
Menabung	7	87 142.9 ± 65 302.3	7	64 142.9 ± 37 773.1
Transport	17	55 705.9 ± 73 475.1	9	38 666.7 ± 27 676.7
Listrik	10	32 700.0 ± 190 79.1	9	46 222.2 ± 16 798.6
Lain-lain	8	66 562.5 ± 71 575.8	7	116 571.4 ± 85 219.1

ditemukan pada penggunaan untuk modal, memberi ke anak, dan listrik. Sedangkan pada KK laki-laki, pembelanjaan uang SLT lebih tinggi terutama untuk pendidikan, kesehatan, pakaian, bayar hutang, dan zakat. Pada Tabel 27 terlihat bahwa pada keluarga dengan KK perempuan, tidak ada penggunaan uang SLT untuk perumahan dan rokok. Sedangkan sebanyak 6 keluarga pada KK laki-laki menggunakan uang untuk keperluan tersebut, dengan rata-rata Rp 114 166.7 untuk perumahan dan Rp 43 333.3 untuk rokok.

Pada umumnya uang SLT yang diterima habis dalam jangka waktu 2-7 hari. Kondisi ini terlihat pada keluarga dengan KK laki-laki maupun KK perempuan. Tetapi ditemukan juga sebanyak 29.5% KK laki-laki dan 25% KK perempuan menghabiskan uang SLT dalam tempo 1 hari. Sebaliknya ada juga keluarga yang menghabiskan uang SLT dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan, yaitu 2.7% pada KK laki-laki dan 5.4% KK perempuan (Tabel 28).

Tabel 28. Sebaran Responden Berdasarkan Lama Habisnya Uang SLT

Lama habis	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
1 hari	33	29.5	14	25.0
2-7 hari	41	36.6	23	41.1
8-14 hari	15	13.4	5	8.9
15 - 21 hari	7	6.3	4	7.1
22 hari – 30 hari	13	11.6	7	12.5
Lebih dari 30 hari	3	2.7	3	5.4
Total	112	100	56	100
Rata-rata ± std	10.67 ± 14.69		14.41 ± 14.8	

Pada keluarga dengan KK laki-laki, pada umumnya (70.5%) uang SLT diterima oleh suami, sedangkan 21.4 persen diterima oleh isteri. Selain oleh isteri dan suami uang SLT juga diterima oleh anak (5.4%) dan lainnya, seperti saudara, calo (2.7%). Keadaan yang berbeda terlihat pada KK perempuan dimana sebagian besar (82.1%) uang SLT diterima oleh isteri dan 16 persen oleh anak (Tabel 29).

Tabel 29. Sebaran Responden Berdasarkan Penerima Uang SLT

Pengambil	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
Suami	79	70.5	0	0
Istri	24	21.4	46	82.1
Anak	6	5.4	9	16.1
Lainnya	3	2.7	1	1.8

Berikut adalah alur pembelanjaan dana SLT-BBM pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja yang dapat dilihat pada gambar berikut :

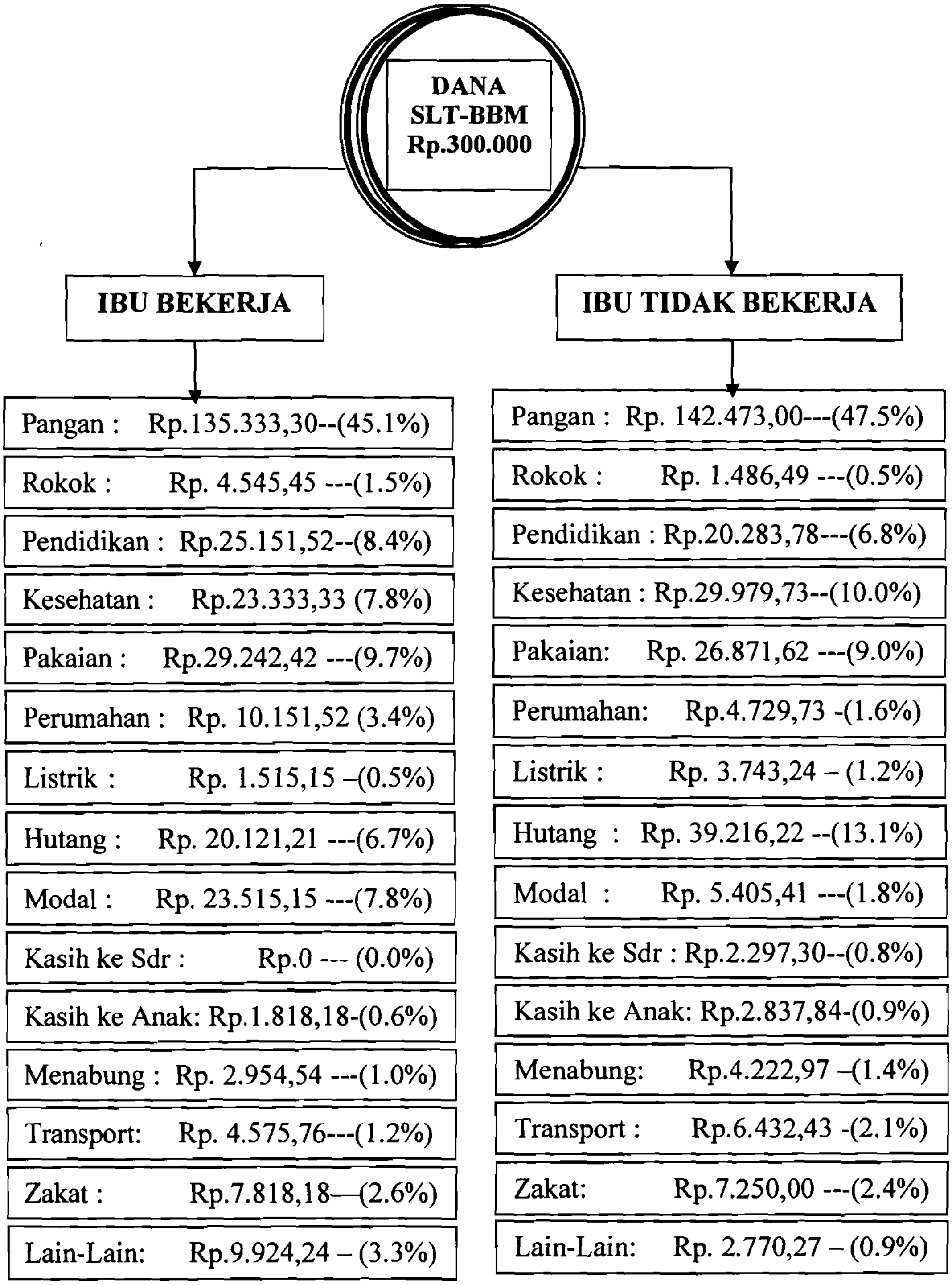

Gambar 15. Alur alokasi dana SLT-BBM Tahap I

Berdasarkan hasil uji beda T dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ($p>0.05$) antara alokasi dana SLT untuk biaya pangan, pendidikan, kesehatan, pakaian, operasional rumah, hutang dan biaya lain-lain pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti tidak adanya perbedaan yang nyata antara alokasi dana SLT untuk biaya pangan, pendidikan, kesehatan, pakaian, operasional rumah, hutang dan biaya lain-lain pada keluarga contoh ibu bekerja dan tidak bekerja. Namun, hasil uji beda T menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan ($p<0.05$) antara alokasi dana SLT untuk modal pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang nyata untuk alokasi dana terhadap modal pada keluarga contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Sebagian besar contoh ibu bekerja (75.8%) dan ibu tidak bekerja (67.6%) menyatakan bahwa pengambilan uang SLT dilakukan oleh suami sebagai pemilik kartu kompensasi BBM (Tabel 30). Namun sebanyak 18.2 persen contoh ibu bekerja dan 23.0 persen ibu tidak bekerja menyatakan bahwa istri-lah yang mengambil uang SLT ke Kantor Pos dengan alasan seperti misalnya tidak ada waktu yang dimiliki oleh suami untuk mengambil uang tersebut dikarenakan suami yang sedang bekerja. Hal ini menunjukan bahwa walaupun ibu bekerja di luar rumah, ternyata mereka masih menyisihkan sebagian waktunya untuk mengambil uang SLT, lain halnya dengan contoh ibu yang tidak bekerja dimana mereka memang memiliki waktu yang cukup banyak karena hanya mengerjakan tugas rumah tangga saja.

Tabel 30. Sebaran contoh berdasarkan penerima uang SLT pada KK laki-laki

Penerima	Ibu Bekerja		Ibu Tidak Bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Suami	25	75.8	50	67.6	75	71.7
Istri	6	18.2	17	23.0	23	20.6
Anak	2	6.1	4	5.4	6	5.8
Lainnya *)	0	0.0	3	4.1	3	1.9
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Std. Deviasi	0.585		0.780		0.726	
Uji Beda T			0.306			

*) Saudara dan Calo

Hanya sebagian contoh yang menyatakan bahwa pengambilan SLT dilakukan oleh anak atau saudara, yaitu 6.1 persen pada contoh ibu bekerja dan 5.4 persen pada contoh ibu tidak bekerja. Pengambilan uang SLT yang dilakukan oleh saudara ataupun calo hanya terjadi pada contoh ibu tidak bekerja (4.1%).

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan (p>0.05) antara penerima uang SLT pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara penerima uang SLT pada contoh ibu bekerja dan contoh ibu tidak bekerja.

Uang SLT-BBM yang diterima oleh contoh, habis hanya dengan beberapa hari saja. Berdasarkan Tabel 31 di bawah ini terdapat lebih dari seperlima contoh penerima SLT-BBM yaitu pada contoh ibu bekerja (33.3%) dan pada ibu tidak bekerja (27.0%) yang menghabiskan uang SLT hanya dalam jangka waktu satu hari saja, sedangkan 42.4 persen contoh ibu bekerja dan 35.1 persen contoh ibu tidak bekerja menghabiskan uang SLT tersebut antara 2-7 hari pasca penerimaan SLT di Kantor Pos. Contoh yang membelanjakan uang SLT dalam kurun waktu antara 8-14 hari cukup banyak, hal ini dapat dilihat baik pada contoh ibu bekerja (18.2%) maupun ibu tidak bekerja (12.2%). Hanya sebagian kecil saja contoh ibu bekerja (3.0%) dan ibu tidak bekerja (2.8%) yang menghabiskan uang SLT lebih dari satu bulan.

Tabel 31. Sebaran contoh berdasarkan lama habisnya dana SLT-BBM (n=107)

Lama Habis (hari)	Ibu Bekerja		Ibu Tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
1	11	33.3	20	27.0	31	30.1
2-7	14	42.4	26	35.1	40	38.8
8-14	6	18.2	9	12.2	15	15.2
15-21	0	0.0	6	8.1	6	4.1
22-30	1	3.0	11	14.9	12	9.0
>31	1	3.0	2	2.7	3	2.8
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0
Std.Deviasi	11.275		16.026		14.799	
Uji Beda T			0.178			

Berdasarkan uji beda T, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0.05) antara lama waktu habisnya uang SLT-BBM yang diterima oleh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata antara lama habisnya uang SLT pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Peran Gender dalam Keluarga

Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali keluarga dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anggota keluarganya, sehingga sebaiknya keputusan yang diambil adalah merupakan hasil kesepakatan bersama. Menurut (Lestari 1984b), pola pengambilan keputusan (*decision making*) dalam suatu keluarga menggambarkan bagaimana struktur atau pola kekuasaan dalam keluarga tersebut. Adapun konsep seperti pengaruh, kontrol dan wewenang serta dominasi digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kekuasaan dalam keluarga seperti dalam pengambilan keputusan (Lestari 1984b). Scanzoni dan Scanzoni yang diacu Lestari (1942b) menyatakan bahwa metode yang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam keluarga atau *family power* adalah dengan menanyakan kepada contoh mengenai siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga.

Pengambilan keputusan antara suami istri dalam penelitian ini yaitu menegenai beberapa persolan tertentu dalam keluarga seperti pengambilan keputusan tentang *coping strategy* dan juga dalam keterkaitannya dengan SLT-BBM. Terkait dengan gender khususnya dalam hal pengambil keputusan oleh wanita, masih terdapat anggapan yang menyatakan bahwa wanita tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar rumah tangga. Norma yang umumnya diakui oleh masyarakat tradisional yaitu yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kaum pria atau suami (Lestari 1984b).

Pada kenyataannya, terdapat berbagai variasi tentang pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu adakalanya wanita yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, namun ada juga justru wanita yang menentukan dalam pengambilan keputusan keluarga. Banyak pula keputusan dalam keluarga yang dilakukkan secara bersama-sama antara suami-istri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada kecenderungan mengenai pengambilan keputusan berdasarkan *survival strategy* keluarga yang dilakukan terhadap contoh merupakan hasil diskusi antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat bahwa lebih dari setengah contoh pada keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja yang menyatakan pengambilan keputusan untuk mengurangi biaya transport, mengurangi biaya kesehatan, menggadaikan barang, mengambil tabungan dan mengurangi biaya pendidikan anak cenderung merupakan hasil keputusan bersama.

Strategi keluarga (*coping strategy*) dilakukan untuk menanggulangi perubahan kebutuhan yang dihadapi keluarga tersebut berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. Cara yang dapat ditempuh antara lain dengan berhemat atau mengganti kebutuhan tersebut dengan alternative lain yang setara namun lebih terjangkau (Puspitawati 1998). *Coping strategy* terdiri dari strategi penghematan (*Cutting Back*) yang dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, strategi penambahan pendapatan (*Generating Income*) dan hutang ataupun bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata ada kecenderungan bahwa survival strategi keluarga yang dilakukan merupakan hasil diskusi antara suami dan isteri. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi tertinggi responden (lebih dari 50%) yang menyatakan bahwa dalam melakukan beberapa survival strategi keluarga seperti mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang, mengurangi biaya kesehatan, bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan, menjual aset, menggadaikan barang, mengambil tabungan, dan mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos) merupakan pemrakarsa suami dan isteri. Sedangkan proporsi tertinggi (lebih dari 50%) yang menyatakan bahwa survival strategi yang dilakukan merupakan prakarsa isteri saja terdapat pada beberapa kegiatan seperti mengurangi konsumsi pangan, hutang/ meminjam, dan mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak. Peran suami secara tunggal dalam memprakarsai survival strategi yang dilakukan oleh keluarga ternyata masih rendah. Hal ini terlihat dari proporsi responden yang kecil (kurang dari 6%) menyatakan bahwa survival trategi yang dilakukan adalah diprakarsai suami.

Proporsi tertinggi responden (11.9%) yang menyatakan bahwa survival strategi yang dilakukan adalah diprakarsai suami adalah bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan (Tabel 32). Pada keluarga dengan KK isteri maka pemrakarsa dalam melakukan survival strategi keluarga didominasi oleh isteri. Keadaan yang berbeda pada KK perempuan, maka isteri dan suami merupakan pemrakarsa dalam melakukan survival strategi keluarga. Meskipun demikian ada beberapa keluarga, istri adalah sebagai pemrakarsanya. Sebanyak 34.8-43.8 persen keluarga pada KK perempuan menyatakan bahwa mengurangi konsumsi pangan, hutang/meminjam dan mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak diprakarsai oleh isteri saja. Selain hal tersebut masih ada beberapa yang diprakarsai oleh isteri, seperti mengurangi biaya kesehatan, bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan, menjual aset, menggadaikan barang, dan mengambil tabungan. Hal ini dinyatakan oleh 20-24 persen keluarga pada KK perempuan. Keterlibatan isteri yang paling rendah adalah dalam hal mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang dan mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos).

Keterlibatan suami dalam memprakarsai survival strategi masih terlihat pada keluarga dengan KK laki-laki. Proposi keluarga tertinggi (17.0%) menyatakan bahwa keterlibatan suami terutama dalam hal bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prakarsa suami dalam melakukan survival strategi masih rendah. Hal ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa kurang dari 10 persen keluarga yang menyatakan bahwa survival strategi keluarga yang dilakukan adalah prakarsa suami saja.

Tabel 32. Sebaran Responden Berdasarkan Pemrakarsa Melakukan Survival Strategi Keluarga dan Jenis Kelami KK

Pernyataan	Pemrakarsa											
	KK Laki-laki						KK Perempuan					
	I		I+S		S		I		I+S		S	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Mengurangi konsumsi pangan	49	43.8	56	50.0	7	6.3	51	91.1	5	8.9	0	0.0
Mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang, dll	21	18.8	82	73.2	9	8.0	49	87.5	7	12.5	0	0.0
Mengurangi biaya kesehatan	27	24.1	78	69.6	7	6.3	49	87.5	7	12.5	0	0.0
Bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan	23	20.5	70	62.5	19	17.0	49	87.5	6	10.7	1	1.8
Menjual aset	24	21.4	82	73.2	6	5.4	52	92.9	4	7.1	0	0.0
Menggadaikan barang	27	24.1	80	71.4	5	4.5	50	89.3	6	10.7	0	0.0
Hutang/ meminjam	39	34.8	65	58.0	8	7.1	51	91.1	5	8.9	0	0.0
Mengambil tabungan	23	20.5	85	75.9	4	3.6	50	89.3	6	10.7	0	0.0
Mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos)	21	18.8	85	75.9	6	5.4	49	87.5	7	12.5	0	0.0
Mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak	44	39.3	61	54.5	7	6.3	52	92.9	4	7.1	0	0.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami dan istri-lah yang menjadi pengambilan keputusan dalam *coping strategy,* hal ini dapat dilihat dari Tabel 33 yaitu pada keluarga ibu bekerja dan ibu tidak bekerja yang menentukan dalam kategori *generating income* adalah merupakan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan bersama oleh istri dan suami (74.2% dan 72.6%). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada peranan suami dalam pengambilan keputusan mengenai *generating income* dalam mengambil tabungan baik pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, namun meskipun tidak mencolok dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yaitu suami pada contoh ibu bekerja ternyata lebih banyak yang berperan dalam menjual aset (6.1%) dan menggadaikan barang (3.0%) untuk memperoleh *income* dalam ketahanan keluarga daripada suami pada contoh ibu tidak bekerja (0%). Hal ini cenderung menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam melakukan strategi tersebut dibandingkan dengan ibu yang bekerja, sehingga terlihat pada keluarga ibu bekerja terdapat kecendrungan kerjasama yang lebih fleksibel.

Hutang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia agar tetap dapat *survive*. Dalam kehidupan keluarga contoh, lebih dari setengahnya menunjukkan bahwa yang mengambil keputusan untuk meminjam uang kepada pihak lain adalah suami dan istri, hal ini dapat dilihat baik pada ibu bekerja (54.5%) dan ibu tidak bekerja (62.2%).

Kategori strategi dalam penghematan atau *cutting back* dalam penelitian ini lebih dominan berdasarkan hasil keputusan suami dan istri, baik pada contoh ibu bekerja (71.5%) dan ibu tidak bekerja (64.6%). Lebih dari seperempat contoh menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan satu pihak saja yaitu oleh istri, hal ini terjadi pada contoh ibu bekerja (26.1%) dan ibu tidak bekerja (32.1%). Peranan suami dalam hal ini pada contoh ibu bekerja (2.4%) lebih rendah daripada contoh ibu tidak bekerja (3.3%). Hal ini dapat dilihat dari jenis strategi ini berupa pengurangan biaya kesehatan (4.1%) dan penggantian bahan bakar memasak (4.1%) pada keluarga ibu tidak bekerja memiliki peranan dari suami, sedangkan pada keluarga ibu bekerja tidak ada peranan suami untuk kedua jenis strategi tersebut. Berdasarkan hal itu, maka terlihat adanya kecendrungan kerjasama yang lebih erat pada keluarga ibu tidak bekerja dalam hal strategi penghematan.

Tabel 33. Sebaran contoh berdasarkan pengambilan keputusan keluarga dalam *coping strategy* pada KK laki-laki

STRATEGI	Ibu Bekerja						Ibu Tidak Bekerja					
	Suami (S)		Istri (I)		I + S		Suami (S)		Istri (I)		I + S	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
A. *Generating Income*												
Bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan	5	15.2	7	21.2	21	63.6	10	13.5	16	21.6	48	64.9
Menjual aset	2	6.1	6	18.2	25	75.8	0	0.0	18	24.3	56	75.7
Menggadaikan barang	1	3.0	7	21.2	25	75.8	0	0.0	20	27.0	54	73.0
Mengambil tabungan	0	0.0	6	18.2	27	81.8	0	0.0	17	23.0	57	77.0
Total	2	6.1	7	19.7	24	74.2	2	3.4	18	24.0	54	72.6
Uji Beda T	0.901											
B. *Cutting Back*												
Mengurangi konsumsi pangan	1	3.0	13	39.4	19	57.6	2	2.7	36	48.6	36	48.6
Mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang.	2	6.1	4	12.1	27	81.8	3	4.1	17	23.0	54	73.0
Mengurangi biaya kesehatan	0	0.0	7	21.2	26	78.8	3	4.1	20	27.0	51	68.9
Mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah / sering bolos)	1	3.0	5	15.2	27	81.8	1	1.4	16	21.6	57	77.0
Mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak	0	0.0	14	42.4	19	57.6	3	4.1	30	40.5	41	55.4
Total	1	2.4	9	26.1	23	71.5	2	3.3	24	32.1	48	64.6
Uji Beda T	0.335											
C. Hutang												
Hutang/ meminjam	1	3.0	14	42.4	18	54.5	3	4.1	25	33.8	46	62.2
Uji Beda T	0.583											

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Studi Wanita FISIP-UI dan penelitian oleh surat kabar Kompas yang diacu dalam Lestari (1984b), bahwa di kalangan contoh ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, istri tampak lebih berperan sebagai pengambil keputusan. Akan tetapi cukup banyak contoh yang mengakui bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan bersama antara suami dan istri. Dengan menghubungkan hasil penelitian tersebut dan data mengenai pengambilan keputusan atas *copping strategy,* terlihat mengenai persamaan dalam hal adanya kecendrungan istri dan suami bersama-sama mengambil keputusan dalam keluarga.

Hasil uji beda T berdasarkan pengambil keputusan dalam *coping strategy* seperti *generating income*, *cutting back* dan hutang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata ($p>0.05$). Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara *coping strategy* dalam *generating income*, *cutting back* dan hutang pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga contoh berkaitan dengan dana SLT-BBM pada penelitian ini (Tabel 33) yaitu menenai siapa yang mengambil dana tersebut. SMERU (2006) menyatakan bahwa masyarakat penerima SLT seharusnya mengambil sendiri dana SLT-nya kecuali bagi mereka yang sakit atau jompo. Menurut hasil wawancara dengan contoh, pengambilan uang SLT tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebagai pemilik kartu kompensasi BBM, namun juga diambil oleh pihak lain selain pemilik kartu seperti istri, anak dan lain-lain (saudara dan calo).

Pembagian Tugas Suami dan Isteri Dalam Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatur penyediaan makanan, mengatur kegiatan rumah tangga, bertanggung jawab pekerjaan domestik dan manajemen keuangan keluarga termasuk memutuskan untuk membelanjakan uang SLT, mengelola uang SLT, merencanakan keuangan keluarga, memegang/ mengatur uang SLT adalah menjadi tugas isteri. Beberapa hal yang pada umumnya menjadi tugas bersama (suami dan istri) adalah dalam hal mencari jalan pemecahan masalah keuangan, bertanggung jawab dalam aktivitas sosial dan pengasuhan serta pendidikan anak.

Pada KK perempuan pembagian tugas untuk semua urusan rumah tangga, baik yang besifat domestik maupun publik didominasi oleh isteri. Keadaan yang berbeda pada KK laki-laki, meskipun relatif didominasi oleh isteri tetapi masih terlihat adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Pada KK laki-laki, beberapa tugas yang pada umumnya dilakukan oleh isteri adalah memutuskan utk membelanjakan uang SLT, mengelola uang SLT, merencanakan keuangan keluarga, memegang/ mengatur keuangan keluarga, mengontrol pengeluaran keuangan, mengatur penyediaan makanan keluarga, mengatur kegiatan rumahtangga dan bertanggung jawab pekerjaan domestik. Masalah yang pada umumnya didiskusikan antara suami dan isteri terutama dalam hal mencari jalan pemecahan masalah keuangan, bertanggung jawab pekerjaan publik/ekonomi, bertanggung jawab aktivitas sosial serta bertanggung jawab pengasuhan & pendidikan anak. Ditemukan juga sekitar sepertiga suami bertugas dalam hal pekerjaan publik/ekonomi (Lampiran 4).

Berdasarkan Tabel 34, dapat dilihat bahwa sebagian besar contoh baik yang bekerja dan tidak bekerja menyatakan bahwa pembagian tugas lebih dominan dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu istri terutama dalam hal yang berhubungan dengan SLT, keuangan keluarga, pengaturan pangan keluarga dan pekerjaan domestik. Untuk pembagian tugas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SLT lebih dari setengahnya dilakukan oleh istri yaitu baik pada contoh ibu bekerja (71.2%) dan ibu tidak bekerja (63.5%).

Tabel 34. Sebaran contoh berdasarkan pembagian tugas dalam keluarga pada KK laki-laki

Pernyataan	Ibu Bekerja						Ibu Tidak Bekerja						Uji Beda T
	Suami (S)		Istri (I)		I + S		Suami (S)		Istri (I)		I + S		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	(p)
SLT	2	7,6	24	71,2	7	21,2	5	7,4	47	63,5	22	29,1	0.550
Keuangan Keluarga	2	8,3	22	65,1	9	26,6	7	9,1	42	56,7	25	34,2	0.377
Pangan	1	3.0	30	90.9	2	6.1	4	5.4	64	86.5	6	8.1	0.506
Pekerjaan Domestik	1	4,5	21	63,6	11	31,9	3	4,1	49	65,5	22	30,4	0.815
Pekerjaan Publik	7	21.2	8	24.2	18	54.5	37	50.0	0	0.0	37	50.0	0.014
Kehidupan Sosial	2	6.1	4	12.1	27	81.8	2	2.7	14	18.9	58	78.4	0.268
Pengasuhan Anak	0	0.0	9	27.3	24	72.7	1	1.4	15	20.3	58	78.4	0.361

Keuangan keluarga dalam penelitian ini lebih dominan diatur oleh istri, baik pada contoh ibu bekerja (65.1%) dan ibu tidak bekerja (56.7%) yaitu mengenai pemegang kendali keuangan, perencanaan keuangan, pemegang keuangan dan pengontrol keuangan serta yang mencari pemecahan akan masalah keuangan keluarga. Sebagian besar pengaturan penyediaan makanan sehari-hari anggota keluarga dikelola oleh istri, baik pada contoh ibu bekerja (90.9%) dan ibu tidak bekerja (86.5%). Persentase tertinggi akan pekerjaan domestik dilakukan oleh istri baik pada contoh ibu bekerja (63.6%) dan ibu tidak bekerja (65.5%), namun dalam tugas ini partisipasi suami cukup tinggi yaitu lebih dari sepertiganya.

Keterlibatan suami dalam pembagian tugas di keluarga masih relatif rendah, namun peranan suami yang cukup tinggi terlihat dalam hal tanggung jawabnya pada pekerjaan publik atau ekonomi baik pada contoh ibu bekerja (21.2%) dan ibu tidak bekerja (50.0%). Tugas yang dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri dengan persentase tinggi dapat dilihat yaitu dalam tanggung jawab terhadap aktivitas sosial baik pada ibu bekerja (81.8%) dan ibu tidak bekerja (78.4%). Selain itu juga dalam hal pengasuhan dan pendidikan untuk anak yaitu pada contoh ibu bekerja sebesar 72.7 persen dan pada ibu tidak bekerja lebih tinggi yaitu 78.4 persen.

Hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan (*p>0.05*) antara pembagian tugas mengenai SLT, keuangan keluarga, pengaturan pangan, pekerjaan domestik, kehidupan sosial dan pengasuhan anak pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja, sehingga hal ini berarti tidak ada perbedaan yang nyata mengenai pembagian tugas tersebut antara ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Sedangkan untuk pembagian tugas mengenai pekerjaan publik dapat dilihat dari hasil uji T terdapat perbedaan yang signifikan (*p<0.05*). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata untuk pekerjaan publik pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Frekuensi Konsumsi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

Semua responden mengkonsumsi beras setiap hari pada saat sebelum kenaikan harga BBM. Jenis pangan lain yang banyak dikonsumsi responden setiap hari adalah sayuran hijau, ikan asin, kopi/gula dan minyak goreng. Proporsi tertinggi responden (42.9-47.6%) menyatakan bahwa tempe, tahu dan rokok juga dikonsumsi setiap hari (Tabel 35). Sedangkan jenis pangan yang termasuk jarang dikonsumsi oleh responden adalah daging, ikan segar, ayam dan buah. Meskipun mereka mengkonsumsi hanya 1-3 kali/bulan bahkan untuk daging lebih dari sebulan. Sumber protein hewani yang dianggap sering dikonsumsi adalah telur. Sebanyak 39.9% responden mengkonsumsi telur dengan frekuensi 1-3 kali per minggu dan 28.6% dengan frekuensi 4-6 kali per minggu.

Keadaan konsumsi responden menunjukkan adanya perbedaan setelah kenaikan harga BBM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengkonsumsi beras setiap hari menurun menjadi 99.4 persen dan 0.6 persen berubah frekuensinya menjadi 4-6 kali per minggu. Jenis pangan yang banyak dikonsumsi sesudah kenaikan harga BBM sama seperti sebelum kenaikan harga BBM yaitu sayuran hijau, ikan asin, minyak goreng, rokok dan kopi/gula.

Perbedaan yang terjadi setelah kenaikan harga BBM adalah responden yang mengkonsumsi pangan tersebut dengan frekuensi setiap hari menurun, sedangkan frekuensi 4-6 kali per minggu dan 1-3 kali per minggu justru menunjukkan adanya peningkatan. Telur merupakan jenis protein hewani yang masih banyak dikonsumsi setelah kenaikan harga BBM. Sedangkan ikan segar, daging, ayam dan buah jenis pangan yang jarang dikonsumsi, bahkan jumlah responden yang tidak pernah mengkonsumsi lebih dari 40 persen. Responden yang mengkonsumsi tahu dan tempe dengan frekuensi per hari juga menurun sesudah kenaikan harga BBM dan peningkatan jumlah responden terlihat pada frekuensi 1-3 kali per minggu.

Berdasarkan data diatas maka secara maka secara umum responden mengurangi kuantitas dan kualitas jenis pangan yang dikonsumsi setelah kenaikan harga BBM. Hal ini adalah sebagai konsekuensi dari tingkat sosial ekonomi responden yang semakin menurun setelah kenaikan harga BBM.

Pada keluarga dengan KK laki-laki, jenis pangan yang sering dikonsumsi oleh semua responden adalah beras. Jenis pangan lain yang dianggap sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga (57-70%) sebelum kenaikan harga BBM adalah sayuran hijau, ikan asin, minyak goreng, kopi/gula dan rokok. Frekuensi jenis pangan tersebut adalah setiap hari. Hampir setengahnya keluarga juga menyatakan sering mengkonsumsi tempe dan tahun setiap hari. Sedangkan jenis pangan yang paling jarang dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga adalah ayam dan daging.

Tabel 35. Sebaran Responden Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Pangan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

No	Jenis Pangan	Sebelum												Sesudah											
		Setiap hari		4-6 kali/ minggu		1-3 kali/ minggu		1-3 kali/ bulan		Lebih sebulan		Tidak pernah		Setiap hari		4-6 kali/ minggu		1-3 kali/ minggu		1-3 kali/ bulan		Lebih sebulan		Tidak pernah	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1.	Beras	168	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	167	99.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Bubur	16	9.5	12	7.1	31	18.5	26	15.5	27	16.4	56	33.3	16	9.5	12	7.1	32	19.0	24	14.3	24	14.3	60	35.7
3.	Mie	26	15.5	22	13.1	71	42.3	32	19.0	9	5.4	8	4.8	23	13.7	25	14.9	72	42.9	24	14.3	14	8.3	10	6.0
4.	Sayuran hijau	102	60.7	36	21.4	29	17.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	95	56.5	34	20.2	34	20.2	5	3.0	0	0.0	0	0.0
5.	Buah	3	1.8	10	6.0	25	14.9	39	23.2	32	19.0	59	35.1	4	2.4	6	3.6	24	14.3	26	15.5	37	22.0	71	42.3
6.	Ikan segar	2	1.2	4	2.4	24	14.3	29	17.3	35	20.8	74	44.0	1	0.6	4	2.4	18	10.8	26	15.5	44	26.2	75	44.6
7.	Ikan asin	102	60.7	35	20.8	21	12.5	3	1.8	3	1.8	4	2.4	97	57.7	38	22.6	22	13.1	3	1.8	3	1.8	5	3.0
8.	Ayam	2	1.2	4	2.4	25	14.9	54	32.1	50	29.8	33	19.8	1	0.6	4	2.4	19	11.3	43	25.6	66	39.3	35	20.8
9.	Telur	20	11.9	48	28.6	67	39.9	22	13.1	9	5.4	2	1.2	18	10.7	40	23.8	73	43.5	27	16.1	5	3.0	5	03.0
10.	Daging	0	0.0	2	1.2	1	0.6	12	7.1	61	36.3	92	54.8	0	0.0	1	0.6	1	0.6	14	8.3	70	41.7	82	48.8
11.	Tahu	72	42.9	52	31.0	36	21.4	5	3.0	1	0.6	2	1.2	63	37.5	44	26.2	49	29.2	9	5.4	1	0.6	2	1.2
12.	Tempe	75	44.6	53	31.5	38	22.6	2	1.2	0	0.0	0	0.0	67	39.9	50	29.8	48	28.6	2	1.2	1	0.6	0	0.0
13.	Minyak goreng	127	75.6	3	1.8	35	20.8	2	1.2	0	0.0	1	0.6	125	74.4	5	3.0	30	17.9	7	4.2	0	0.0	1	0.6
14.	Kopi/gula	106	63.1	9	5.4	20	11.9	8	4.8	4	2.4	21	12.5	103	61.3	11	6.5	21	12.5	7	4.2	2	1.2	24	14.3
15.	Rokok	80	47.6	3	1.8	10	6.0	0	0.0	1	0.6	74	44.0	76	45.2	5	3.0	10	6.0	0	0.0	0	0.0	77	45.8
16.	Lain-lain	1	0.6	2	1.2	16	9.5	30	17.9	37	22.0	82	48.8	1	0.6	1	0.6	11	6.5	28	16.7	39	23.2	88	52.4

Diantara pangan hewani lainnya, telur relatif sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga. Lebih dari sepertiga keluarga mengkonsumsi telur dengan frekuensi 1-3 kali/minggu. Bahkan sebanyak 14.3 persen keluarga mengkonsumsi telur setiap hari. Pangan lain yang relatif jarang dikonsumsi adalah buah dan ikan segar. Sebagian besar keluarga (38.4-48.2%) menyatakan tidak pernah mengkonsumsi pangan tersebut.

Meskipun telah terjadi kenaikan harga BBM, beras masih tetapi dikonsumsi setiap hari oleh semua keluarga dengan KK laki-laki. Sama seperti sebelum kenaikan harga BBM, jenis pangan yang paling sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga adalah ikan asin, sayuran hijau, minyak goreng, rokok dan gula/kopi. Selain itu juga tempe dan tahu masih banyak yang mengkonsumsi dengan frekuensi setiap hari. Setelah terjadi kenaikan harga BBM, maka jumlah keluarga yang mengkonsumsi pangan tersebut dengan frekuensi setiap hari menurun dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM. Kondisi yang sama dengan sebelum kenaikan BBM, maka daging, ayam, ikan segar dan buah adalah jenis pangan yang jarang dikonsumsi. Telur jenis pangan hewani yang relatif sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga dengan frekuensi 1-3 kali per minggu.

Keadaan yang hampir sama dengan KK laki-laki, maka pada KK perempuan jenis pangan yang paling sering dikonsumsi oleh semua responden adalah beras. Hal terlihat sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Jenis pangan lain yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar keluarga pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM adalah sayuran hijau, ikan asin, minyak goreng, kopi dan gula. Berbeda dengan KK laki-laki maka sebagian besar KK perempuan tidak pernah merokok. Jenis pangan yang jarang dikonsumsi, pada sebelum maupun sesudah kenaikan harga BBM adalah ayam, daging, ikan segar dan buah. Walaupun mereka mengkonumsi hanya 1-3 kali/bulan atau lebih dari sebulan.

Penerimaan Keluarga tentang Perubahan-perubahan antara Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun hubungan dalam keluarga tetap saat sesudah kenaikan harga BBM tetapi konflik/pertengkaran dalam keluarga meningkat dan hal ini dinyatakan oleh 78 persen responden. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa sesudah kenaikan BBM ternyata kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh 95.2 persen responden. Kondisi lain yang terjadi sesudah kenaikan BBM adalah tidak ada uang yang ditabung, hal ini dialami oleh 92.3 persen responden. Sebanyak lebih dari setengah responden (51.8%) menyatakan bahwa pendapatan total mereka juga menurun, tetapi pengeluaran pangan dan non pangan menjadi meningkat (Tabel 36).

Perubahan yang kurang baik juga terjadi pada kualitas pendidikan anak. Hal ini terlihat dari proporsi tertinggi responden (48.8%) yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan anaknya menurun. Tetapi ada juga sebanyak 41.7 persen responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan anaknya tidak berubah (tetap) setelah kenaikan harga BBM. Hal lain yang banyak dirasakan responden menjadi menurun sesudah kenaikan BBM adalah penguasaan aset. Sedangkan hal lain yang dianggap tetap adalah kualitas kesehatan keluarga dan hubungan sosial dengan tetangga. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh sekitar 67.9-73.2 persen responden.

Tabel 36. Sebaran Responden Berdasarkan Perubahan-perubahan antara Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM (Oktober 2005)

PERNYATAAN	TDK ADA		TURUN		TETAP		NAIK	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Pendapatan Total Keluarga	7	4.2	87	51.8	65	38.7	9	5.4
Pengeluaran pangan Keluarga	2	1.2	52	31.0	33	19.6	81	48.2
Pengeluaran non pangan keluarga	54	32.1	15	8.9	24	14.3	75	44.6
Jumlah Makanan Keluarga	3	1.8	80	47.6	76	45.2	9	5.4
Kualitas Hubungan dalam Keluarga	7	4.2	5	3.0	140	83.3	16	9.5
Jumlah Tabungan Keluarga	155	92.3	3	1.8	7	4.2	3	1.8
Konflik/pertengkaran dalam Keluarga	6	3.6	27	16.1	4	2.4	131	78.0
Kekerasan dalam rumahtangga	0	0.0	6	3.6	2	1.2	160	95.2
Kualitas Pendidikan anak	82	48.8	16	9.5	70	41.7	0	0.0
Kualitas Kesehatan keluarga	10	6.0	43	25.6	114	67.9	1	0.6
Hubungan sosial dengan tetangga	6	3.6	2	1.2	123	73.2	37	22.0
Kualitas pekerjaan	17	10.1	75	44.6	73	43.5	3	1.8
Jumlah penguasaan aset (JUAL, GADAI)	76	45.2	29	17.3	62	36.9	1	0.6

Perubahan yang umumnya menurun setelah terjadi kenaikan BBM pada keluarga dengan KK laki-laki maupun perempuan adalah pendapatan total dan jumlah makanan keluarga. Sedangkan perubahan yang umumnyan meningkat adalah pengeluaran pangan dan non pangan keluarga, konflik/pertengkaran dalam keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga. Meningkatnya kekerasan rumah tangga dinyatakan oleh 93 persen lebih keluarga pada KK laki-laki maupun KK perempuan. Sedangkan konflik/pertengkatan keluarga yang meningkat dinyatakan oleh 72.3 persen KK laki-lakin dan 89.3 persen KK perempuan. Kondisi sebaliknya terlihat dalam hal tabungan keluarga, dimana 92 persen persen lebih keluarga menyatakan tidak memiliki tabungan. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan uang yang dimiliki sedangkan kebutuhan semakin banyak sehingga tidak ada uang yang akan ditabung Selain banyak yang tidak memiliki tabungan, keluarga juga pada umumnya tidak memiliki jumlah penguasaan aset. Kondisi yang berbeda terlihat dalam hal kesehatan keluarga, dimana 75.0 persen keluarga dengan KK laki-laki menyatakan tetap, sedangkan pada 69.6 persen keluarga dengan KK perempuan menyatakan meningkat (Lampiran 5).

Adanya kenaikan harga BBM tidak banyak menimbulkan perubahan dalam kualitas hubungan dalam keluarga serta dalam hubungan sosial mereka dengan tetangga. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 75.0-82.1 persen pada KK laki-laki dan 69.9-85.7 persen pada KK perempuan menyatakan bahwa hubungan dalam keluarga maupun sosial adalah tetap. Jika dilihat berdasarkan kondisi diatas maka dapat dikatakan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga dengan KK laki-laki maupun KK perempuan setelah terjadinya kenaikan harga BBM adalah menurun (Lampiran 5).

Survival Strategi Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

Survival strategi keluarga yang paling banyak (63.7%) dilakukan oleh responden adalah hutang/meminjam uang. Kebiasaan tersebut meningkat (79.8%) sesudah terjadi kenaikan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM, mengurangi konsumsi makan adalah salah satu survival strategi keluarga yang relatif banyak (22.0%) dilakukan responden dan sesudah kenaikan harga BBM jumlah keluarga yang melakukan kegiatan tersebut mencapai 57.7 persen. Peningkatan jumlah keluarga yang cukup banyak terjadi pada jenis survival strategi mengurangi biaya transport yaitu menjadi 47.6 persen pada saat sesudah dan 16.7 persen saat sebelum kenaikan harga BBM. Mengganti minyak tanah dengan kayu bakar adalah salah satu strategi yang banyak dilakukan sesudah kenaikan harga BBM, yaitu mencapai 35.7 persen dan sebelumnya hanya 12.5 persen (Tabel 37).

Jenis survival strategi lain yang dilakukan lebih seperlima keluarga pada saat sesudah kenaikan harga BBM adalah bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan (21.4%) dan menjual aset (22.6%). Sedangkan pada saat sebelum kenaikan harga BBM jumlah responden yang melakukan hal tersebut berkisar antara 8.3-10.7 persen. Survival strategi yang relatif sedikit dilakukan oleh keluarga, walaupun jumlahnya meningkat setelah kenaikan harga BBM adalah mengurangi biaya kesehatan, mengambil tabungan dan mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos). Pola yang berbeda terjadi dalam hal menggadaikan barang. Keluarga yang menggadaikan barang sesudah kenaikan harga BBM menurun menjadi 2.4 persen dan sebelumnya 3.6 persen. Hal ini diduga karena semakin menurunnya penguasaan aset keluarga setelah kenaikan harga BBM. Secara umum jenis survival strategi yang dilakukan keluarga sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM adalah sama tetapi terdapat peningkatan jumlah keluarga yang melakukan survival strategi sesudah kenaikan harga BBM.

Tabel 37. Sebaran Responden Berdasarkan Survival Strategi Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

STRATEGI	SEBELUM				SESUDAH			
	TIDAK		YA		TIDAK		YA	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Mengurangi konsumsi pangan	131	78.0	37	22.0	71	42.3	97	57.7
Mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang, dll	140	83.3	28	16.7	88	52.4	80	47.6
Mengurangi biaya kesehatan	151	89.9	17	10.1	138	82.1	30	17.9
Bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan	150	89.3	18	10.7	132	78.6	36	21.4
Menjual aset	154	91.7	14	8.3	130	77.4	38	22.6
Menggadaikan barang	162	96.4	6	3.6	164	97.6	4	2.4
Hutang/ meminjam	61	36.3	107	63.7	34	20.2	134	79.8
Mengambil tabungan	168	100	0	0.0	163	97.0	5	3.0
Mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos)	158	94.0	10	6.0	148	88.1	20	11.9
Mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak	147	87.5	21	12.5	108	64.3	60	35.7

Sebelum kenaikan harga BBM, sebagian besar keluarga pada KK laki-laki maupun perempuan tidak melakukan survival strategi keluarga. Hutang/meminjam adalah salah satu jenis survival strategi yang banyak (58.9-66.1%) dilakukan keluarga sebelum kenaikan harga BBM. Jenis survival strategi lain yang cukup banyak dilakukan keluarga adalah mengurangi konsumsi pangan (21.4-22.3%) dan mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang (16.1-17.0%).

Keadaan yang berbeda terlihat setelah terjadi kenaikan harga BBM, dimana jumlah keluarga yang melakukan survival strategi meningkat. Survival strategi cukup banyak dilakukan oleh keluarga setelah kenaikan harga BBM adalah mengurangi konsumsi pangan (57.1-58.0), hutang/ meminjam (76.8-81.3%), mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang (39.3-51.8%) dan mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak (33.9-36.6%). Selain itu juga ditemukan sebanyak 20.5-26.8% keluarga pada KK laki-laki dan KK perempuan menjual aset yang dimilikinya (Lampiran 6).

Manfaat SLT yang Dirasakan Keluarga dan Harapannya

Sebagian besar responden (48.8-86.3%) menyatakan bahwa uang SLT yang diterima memberi manfaat yang cukup dalam hal memberi dana segar untuk keluarga, membeli kebutuhan sembako, membayar hutang, memberikan ketenangan batin sesaat, memberikan motivasi hidup sesaat, menurunkan konflik keluarga, memberikan kebahagiaan sesaat dan merasa beban berat berkurang bagi isteri. Sedangkan proporsi responden tertinggi (64.3%) yang menyatakan bahwa uang SLT memberi manfaat sedikit adalah dalam hal membayar uang sekolah anak (Tabel 38).

Tabel 38. Sebaran Responden Berdasarkan Manfaat SLT yang Dirasakan Keluarga dan Harapannya

MANFAAT	TINGKAT MANFAAT					
	TDK ADA/ SEDIKIT		CUKUP		TINGGI	
	n	%	n	%	n	%
Memberi dana segar untuk keluarga	45	26.8	82	48.8	41	24.4
Untuk membeli kebutuhan sembako	32	19.0	103	61.3	33	19.6
Untuk membayar sekolah anak	108	64.3	52	31.0	8	4.8
Untuk membayar hutang	67	39.9	82	48.8	19	11.3
Memberikan ketenangan batin sesaat	5	3.0	116	69.0	47	28.0
Memberikan motivasi hidup sesaat	4	2.4	145	86.3	19	11.3
Menurunkan konflik keluarga	52	31.0	107	63.7	9	5.4
Memberikan kebahagiaan sesaat	3	1.8	129	76.8	36	21.4
Istri merasa beban berat berkurang	23	13.7	122	72.6	23	13.7

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa lebih dari seperlima responden menyatakan bahwa uang SLT memberi manfaat yang tinggi terutama dalam hal memberikan ketenangan batin sesaat (28.0%), memberi dana segar untuk keluarga (24.4%) dan memberikan kebahagiaan sesaat (21.4%).

Jika dilihat berdasarkan kategori manfaat maka sebagain besar keluarga (70.8%) menyatakan bahwa uang SLT cukup bermanfaat. Sedangkan sebanyak 22.6 persen keluarga memiliki manfaat yang rendah dan hanya 6.5 persen yang termasuk kategori manfaat tinggi (Tabel 39).

Tabel 39. Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Manfaat Uang SLT

Kategori	n	%
Sedikit (9-15)	38	22.6
Cukup (16-22)	119	70.8
Tinggi (23-27)	11	6.5
Total	168	100

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin KK, baik KK laki-laki maupun KK perempuan paling banyak (lebih dari 75%) menyatakan bahwa uang SLT yang diterima dapat memberikan motivasi hidup dan kebahagiaan sesaat. Sementara manfaat SLT untuk pendidikan anak masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi tertinggi responden pada KK laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa manfaat SLT untuk membayar sekolah anak tidak ada/sedikit. Selain itu juga lebih dari sepertiga responden dari KK laki-laki maupun perempuan merasakan bahwa manfaat uang SLT untuk membayar utang dan menurunkan konflik keluarga hanya sedikit/tidak ada. Bagi KK perempuan dengan diterimanya uang SLT lebih meringankan beban isteri. Hal ini dinyatakan oleh 83.9 persen responden pada KK perempuan, sedangkan pada KK laki-laki yang menyatakan hal tersebut hanya 57.0 persen.

Responden pada KK laki-laki maupun KK perempuan pada umumnya merasakan manfaat yang cukup dari uang SLT terutama dalam hal memberi dana segar untuk keluarga, membeli kebutuhan sembako, memberikan ketenangan batin sesaat dan menurunkan konflik keluarga (Lampiran 7).

Jika dikategorikan menjadi tiga kategori, sebagian besar keluarga (69.9-73.2%) pada KK laki-laki maupun KK perempuan menyatakan bahwa SLT mempunyai manfaat yang cukup. Sedangkan sekitar seperlima keluarga yang menyatakan bahwa manfaat SLT sedikit dan kurang dari 10 persen yang menyatakan bahwa manfaatnya tinggi (Tabel 40).

Tabel 40. Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Manfaat SLT dan Jenis Kelamin KK

Kategori	KK laki-laki		KK perempuan	
	n	%	n	%
Sedikit (9-15)	26	23.1	12	21.4
Cukup (16-22)	78	69.8	41	73.2
Tinggi (23-27)	8	7.1	3	5.4
Total	112	100	56	100

Manfaat yang dirasakan oleh contoh penerima SLT-BBM terdiri atas manfaat materi dan manfaat non-materi. Adapun yang termasuk ke dalam manfaat materi ini yaitu memberi dana segar untuk keluarga, dana untuk membeli kebutuhan sembako, dana untuk membayar sekolah anak dan dana untuk membayar hutang. Sedangkan manfaat non-materi yang dirasakan yaitu berupa manfaat psikologis seperti memberi ketenangan batin sesaat, memberikan motivasi hidup sesaat, menurunkan konflik keluarga, memberikan kebahagiaan sesaat dan istri merasa beban berat berkurang. Keseluruhan manfaat ini dapat dilihat pada Lampiran 8.

Berdasarkan hasil penelitian, kurang lebih setengah contoh pada ibu bekerja (51.5%) dan ibu tidak bekerja (44.9%) merasakan manfaat materi yang cukup atas pemberian dana SLT ini. Sedangkan persentase terkecil akan manfaat materi dari dana SLT yang dirasakan oleh contoh ibu bekerja (12.9%) dan ibu tidak bekerja (17.6%) yaitu pada kategori tinggi. Hanya sebagian kecil contoh pada ibu bekerja (35.6%) dan ibu tidak bekerja (37.5%) yang merasakan manfaat materi SLT ini tidak ada atau hanya sedikit.

Manfaat non-materi yang dirasakan oleh contoh ibu bekerja penerima SLT pada tingkat tingkat tinggi hanya sebesar 15.8 persen dan 15.7 persen pada contoh ibu tidak bekerja. Sebagian besar contoh pada ibu bekerja (70.3%) dan ibu tidak bekerja (73.2%) merasakan manfaat non-materi yang dirasakan atas dana SLT ini sudah cukup. Sedangkan hanya sebagian kecil contoh yang merasakan manfaat non-materi dari dana SLT ini sedikit atau tidak ada, yaitu pada contoh ibu bekerja 13.9 persen dan ibu tidak bekerja 11.1 persen.

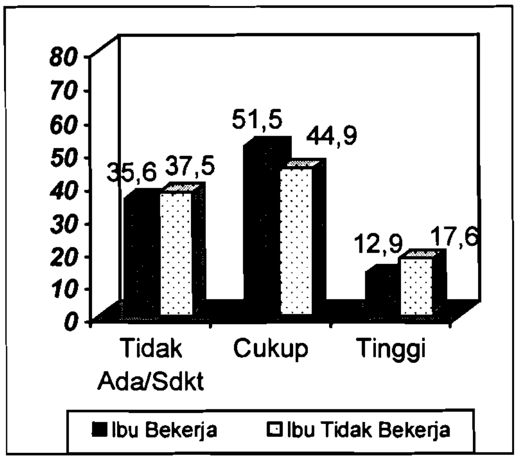

Gambar 16. Sebaran contoh berdasarkan manfaat materi pemberian dana SLT-BBM

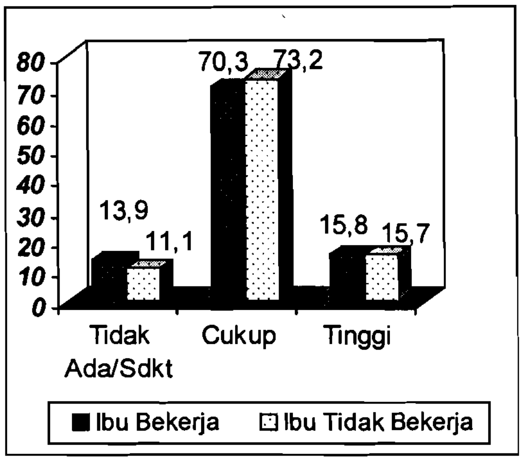

Gambar 17. Sebaran contoh berdasarkan manfaat non materi pemberian dana SLT-BBM

Uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p>0.05$) antara manfaat SLT pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara manfaat yang dirasakan mengenai pemberian dana SLT-BBM, baik manfaat dari segi materi dan non-materi pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Jika dilihat berdasarkan kategori tingkat manfaat yang dirasakan oleh contoh penerima SLT pada Tabel 41, maka sebagian besar contoh menyatakan bahwa SLT cukup bermanfaat, yaitu pada contoh ibu bekerja sebanyak 63.6 persen dan pada ibu yang tidak bekerja sebanyak 73.0 persen. Sedangkan contoh pada ibu bekerja (30.0%) lebih banyak yang menyatakan bahwa manfaat SLT sedikit atau ringan

Tabel 41. Sebaran contoh berdasarkan kategori manfaat dana SLT –BBM pada KK laki-laki

Kategori	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ringan (9-15)	10	30.3	14	18.9	24	24.6
Sedang (16-22)	21	63.6	54	73.0	**75**	**68.3**
Tinggi (23-27)	2	6.1	6	8.1	8	7.1
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0

dibandingkan dengan contoh ibu tidak bekerja (18.9%). Hanya sebagian kecil contoh yang menganggap bahwa manfaat SLT itu tinggi baik pada contoh ibu bekerja (6.1%) dan ibu yang tidak bekerja (7.1%).

Tingkat Kepuasan Terhadap Keadaan Kehidupan dan Gaya Manajemen Sumberdaya Saat Ini

Secara umum responden menyatakan cukup puas terhadap gaya manajemen sumberdaya saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh lebih dari 80% responden menyatakan cukup puas terhadap keadaan spiritual/mental, gaya manajemen waktu, gaya manajemen keuangan, gaya manajemen stress, gaya manajemen pekerjaan, dan optimisme menyongsong masa depan. Selain itu juga terdapat sekitar 50-75 persen responden menyatakan cukup puas juga terhadap keadaan makanan, keadaan tempat tinggal, keadaan kesehatan fisik, keadaan pendidikan anak, hubungan/komunikasi dengan orang tua, hubungan/komunikasi dengan

Tabel 42. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Kepuasan Terhadap Keadaan Kehidupan dan Gaya Manajemen Sumberdaya Saat Ini

No	Pertanyaan	Tidak puas		Cukup puas		Puas sekali	
		n	%	n	%	n	%
1	Keadaan keuangan anda	94	56.0	71	42.3	3	1.8
2	Keadaan makanan anda	43	25.6	122	72.6	3	1.8
3	Keadaan tempat tinggal anda	53	31.5	106	63.1	9	5.4
4	Keadaan materi/aset anda	89	53.0	74	44.0	5	3.0
5	Keadaan spiritual/mental anda	7	4.2	142	84.5	19	11.3
6	Keadaan kesehatan fisik anda	37	22.0	115	68.5	16	9.5
7	Keadaan pendidikan anak anda	52	31.0	112	66.7	4	2.4
8	Gaya manajemen waktu anda	19	11.3	140	83.3	9	5.4
9	Gaya manajemen keuangan anda	12	7.1	148	88.1	8	4.8
10	Gaya manajemen stress anda	25	14.9	135	80.4	8	4.8
11	Gaya manajemen pekerjaan anda	11	6.5	148	88.1	9	5.4
12	Hubungan/komunikasi dengan orang tua	6	3.6	110	65.5	52	31.0
13	Hubungan/komunikasi dengan saudara	7	4.2	107	63.7	54	32.1
14	Hubungan/komunikasi dengan teman anda	3	1.8	111	66.1	54	32.1
15	Hubungan/komunikasi dengan tetangga	6	3.6	108	64.3	54	32.1
16	Optimisme menyongsong masa depan	5	3.0	142	84.5	21	12.5
17	Manfaat SLT bagi keluarga anda	33	19.6	95	56.5	40	23.8
18	Besaran uang SLT Rp 100.000/ bulan	66	39.3	83	49.4	19	11.3
19	Antrian untuk mendapatkan uang SLT	58	34.5	101	60.1	9	5.4
20	Proses pendataan sebelum mendapatkan SLT termasuk verifikasi kriteria kemiskinan	37	22.0	121	72.0	10	6.0

saudara, hubungan/komunikasi dengan teman, hubungan/komunikasi dengan tetangga, manfaat SLT bagi keluarga, antrian untuk mendapatkan uang SLT, dan proses pendataan sebelum mendapatkan SLT termasuk verifikasi kriteria kemiskinan. Untuk masalah komunikasi dengan orang tua, saudara, teman maupun tetangga, lebih dari sepertiga responden menyatakan puas sekali (Tabel 42).

Sebaliknya untuk keadaan pendidikan anak, keadaan tempat tinggal, besaran uang SLT Rp 100.000/bulan dan antrian untuk mendapatkan uang SLT, lebih sepertiga responden menyatakan tidak puas. Kondisi yang tidak puas juga banyak dinyatakan responden (lebih dari 50%) dalam hal keadaan keuangan dan keadaan materi/aset. Pada saat ini hanya sedikit sekali (kurang dari 2%) responden yang menyatakan puas sekali terhadap keadaan keuangan dan makanan.

Jika dikelompokkan menjadi tiga kategori maka sebagian besar responden (91.7%) termasuk kategori cukup puas terhadap keadaan kehidupan dan gaya manajemen sumberdaya saat ini. Walaupun demikian masih ditemukan sebanyak 6.5 persen responden yang termasuk kategori kurang puas dan hanya sebagian kecil saja yang termasuk ategori puas sekali terhadap keadaan kehidupan dan gaya manajemen sumberdaya saat ini (Tabel 43).

Tabel 43. Sebaran Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Kepuasan Terhadap Keadaan Kehidupan dan Gaya Manajemen Sumberdaya

Kategori	n	%
Kurang puas (20-33)	11	6.5
Cukup puas (34-47)	154	91.7
Puas sekali (48-60)	3	1.8
Total	168	100

Sebanyak lebih dari 80 persen responden pada KK laki-laki maupun perempuan menyatakan cukup puas terhadap beberapa hal seperti keadaan spiritual/mental, gaya manajemen waktu, gaya manajemen keuangan, gaya manajemen stress, gaya manajemen stress, dan optimisme menyongsong masa depan. Persamaan lain yang dialami oleh keluarga dengan KK laki-laki dan perempuan adalah lebih dari setengah keluarga tersebut merasa tidak puas terhadap keadaan keuangan dan keadaan materi/aset. Selain hal tersebut, lebih dari sepertiga responden pada KK laki-laki maupun KK perempuan tidak puas terhadap besaran uang SLT Rp 100.000/ bulan dan antrian untuk mendapatkan merasakan rasa puas sekali terhadap keadaan kesehatan fisik dan mental mereka. Terkait dengan pemberian dana SLT-BBM mengenai manfaat dana, pemberian jumlah uang SLT senilai Rp.300.000/triwulan dan proses mendapatkan dana SLT, hanya 15.2 persen pada contoh ibu bekerja dan 11.5 persen ibu tidak bekerja yang merasakan sangat puas.

Tabel 45. Sebaran contoh berdasarkan tingkat kepuasan pada KK laki-laki

Kepuasan	Ibu Bekerja						Ibu Tidak Bekerja						Uji Beda T
	Tidak Puas		Cukup Puas		Puas Sekali		Tidak Puas		Cukup Puas		Puas Sekali		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	(p)
Keuangan dan Aset	17	51,5	14	41,4	2	7,1	34	45,5	39	53,2	1	1,4	0.972
Pangan Keluarga	7	21.2	24	72.7	2	6.1	20	27.0	53	71.6	1	1.4	0.299
Kesehatan Mental&Fisik	3	9,1	24	72,7	6	18,2	6	7,7	61	82,4	7	9,9	0.368
Pendidikan Anak	6	18.2	24	72.7	3	9.1	22	29.7	52	70.3	0	0.0	0.042
Gaya Manajemen	4	10,6	26	79,6	3	9,9	7	9,1	64	85,8	4	5,1	0.580
Hubungan Sosial	1	2,3	24	73,5	8	24,3	2	3,1	45	60,8	27	36,2	0.242
Dana SLT-BBM	9	27,3	19	57,6	5	15,2	24	32,8	41	55,7	9	11,5	0.270

Berdasarkan hasil uji beda T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ($p>0.05$) antara tingkat kepuasan mengenai keuangan dan aset, pangan keluarga, kesehatan mental dan fisik, gaya manajemen, hubungan sosial, dana SLT-BBM pada ibu bekeja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti bahwa keadaan keuangan dan aset, pangan keluarga, kesehatan fisik dan mental, gaya manajemen, hubungan sosial dan pemberian dana SLT tidak berbeda nyata pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Namun hasil uji beda T menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan ($p<0.05$) antara tingkat kepuasan mengenai pendidikan anak pada contoh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang nyata antara kepuasan contoh tentang pendidikan anak pada ibu bekerja dan ibu tidak bekerja.

Sebagian besar contoh pada ibu bekerja (87.9%) dan ibu tidak bekerja (89.2%) merasakan tingkat kepuasan yang sudah cukup. Hanya sebagaian kecil saja contoh yang merasakan kepuasan sangat tinggi pada contoh ibu bekerja (6.0%) dan ibu tidak bekerja (1.3%). Hal serupa juga terjadi pada contoh yang merasakan tingkat kepuasan masih kurang, yaitu 6.1 persen pada contoh ibu bekerja dan 9.5 persen pada ibu tidak bekerja (Tabel 46).

Tabel 46. Sebaran contoh berdasarkan kategori tingkat kepuasan terhadap keadaan kehidupan dan gaya manajemen sumberdaya

Kategori	Ibu bekerja		Ibu tidak bekerja		Total	
	n	%	n	%	n	%
Kurang (20-33)	2	6.1	7	9.5	9	7.8
Cukup (34-47)	29	87.9	66	89.2	95	88.5
Tinggi (48-60)	2	6.0	1	1.3	3	3.7
Total	33	100.0	74	100.0	107	100.0

Harapan Terhadap Kelangsungan SLT

Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju terhadap beberapa pernyataan seperti SLT dihentikan dalam waktu dekat karena tidak mendidik (84.5%), SLT membuat orang jadi malas karena tidak mendidik (89.9%) dan SLT diberikan pada pemuda yang masih gagah (96.4%). Sebaliknya sebagian besar responden menyatakan sangat setuju terhadap beberapa pernyataan seperti SLT diberikan seterusnya, apapun kata orang (77.1%), jumlah uang SLT pinginnya dinaikkan (81.5%), SLT diberikan pada janda-janda tua yang memerlukan (77.4%) dan anak yatim (69.6%). Sedangkan jika SLT diganti dengan bantuan modal tanpa agunan namun harus digunakan untuk modal kerja, ditanggapi dengan tidak setuju oleh 43.5 persen responden, setuju 41.1 persen dan sisanya (15.5%) menyatakan sangat setuju (Tabel 47).

uang SLT. Dalam kondisi keuangan yang tidak puas, kedua kelompok keluarga tersebut masih merasa cukup puas dengan keadaan makanan dan keadaan tempat tinggalnya (Lampiran 9).

Meskipun sama-sama cukup puas terhadap keadaan kesehatan fisik dan pendidikan anak, namun pada keluarga dengan KK perempuan lebih banyak (lebih dari 30%) yang menyatakan tidak puas terhadap kedua hal tersebut dibandingkan KK laki-laki (kurang dari 30%) (Tabel 44).

Tabel 44. Sebaran Responden Berdasarkan Kepuasaan Terhadap Keadaan Kehidupan dan Gaya Manajemen Sumberdaya Saat Ini

Kategori	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
Kurang puas (20-33)	9	8.0	2	3.6
Cukup puas (34-47)	100	89.3	54	96.4
Puas sekali (48-60)	3	2.7	0	0.0
Total	112	100.0	56	100.0

Pada kelompok ibu bekerja dan tidak bekerja tingkat kepuasan dirangkum menjadi beberapa jenis, yaitu : (1) Keadaan keuangan, tempat tinggal dan aset keluarga, (2) Keadaan pangan keluarga, (3) Keadaan kesehatan mental dan fisik, (4) Keadaan pendidikan anak, (5) Gaya manajemen, (6) Hubungan sosial, dan (7) Dana SLT-BBM. Hampir seperempat contoh baik pada ibu bekerja (24.3%) dan ibu tidak bekerja (36.2%) sudah merasa sangat puas dalam hal hubungan sosial mereka, yaitu mengenai komunikasi contoh dengan orang tua, saudara, teman dan tetangga. Sebagian besar contoh ibu bekerja (79.6%) dan ibu tidak bekerja (85.8%) mengaku bahwa gaya manajemen mereka sudah cukup sehingga mereka menyatakan cukup puas, baik dalam manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen stress dan manajemen pekerjaan (Tabel 45).

Keadaan keuangan dan aset keluarga pada contoh masih relatif kurang, hal ini dapat dilihat masih banyak contoh yang tidak puas dengan keadaan yang mereka miliki pada saat penelitian berlangsung baik pada contoh ibu bekerja (51.5%) dan ibu tidak bekerja (45.5%). Keadaan pangan keluarga pada contoh ibu bekerja (72.7%) dan ibu tidak bekerja (71.6%) sudah dirasakan cukup oleh mereka, hal ini menunjukkan bahwa contoh sudah cukup puas dengan keadaan makanan keluarga. Hanya sebagian kecil contoh ibu bekerja (18.2%) dan ibu tidak bekerja (9.9%) yang

Tabel 47. Sebaran responden Berdasarkan Harapan terhadap Kelangsungan SLT

PERNYATAAN	Tidak Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	n	%	n	%	n	%
SLT diberikan seterusnya, apapun kata orang	12	7.1	26	15.5	130	77.4
SLT dihentikan dalam waktu dekat karena tidak mendidik	142	84.5	26	15.5	0	0.0
SLT diganti dengan bantuan modal tanpa agunan namun harus digunakan untuk modal kerja	73	43.5	69	41.1	26	15.5
Kata orang, SLT membuat orang jadi malas karena tidak mendidik	151	89.9	13	7.7	4	2.4
Jumlah uang SLT pinginnya dinaikkan	2	1.2	29	17.3	137	81.5
SLT diberikan pada pemuda yang masih gagah	162	96.4	4	2.4	2	1.2
SLT diberikan pada janda-janda tua yang memerlukan	2	1.2	36	21.4	130	77.4
SLT diberikan pada anak-anak yatim	2	1.2	49	29.2	117	69.6

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat responden pada KK laki-laki maupun KK perempuan menyatakan sangat setuju bahwa SLT diberikan seterusnya apapun kata orang, jumlah uang SLT pinginnya dinaikkan dan SLT diberikan pada janda-janda tua yang memerlukan. Pada KK laki-laki yang menyatakan sangat setuju bahwa SLT diberikan pada anak-anak yatim adalah sebanyak 65.2 persen, sedangkan pada KK perempuan lebih banyak, yaitu 78.6 persen. Keadaan sebaliknya, dimana lebih dari 80 persen responden pada KK laki-laki maupun KK perempuan menyatakan tidak setuju terhadap beberapa pernyataan seperti SLT dihentikan dalam waktu dekat karena tidak mendidik, kata orang, SLT membuat orang jadi malas karena tidak mendidik dan SLT diberikan pada pemuda yang masih gagah. Sedangkan jika SLT diganti dengan bantuan modal tanpa agunan namun harus digunakan untuk modal kerja, pada umumnya (45.5%) responden pada KK laki-laki menyatakan setuju sedangkan lebih dari setengah responden pada KK perempuan menyatakan tidak setuju (Lampiran 10).

Jika dikategorikan mejjadi tiga kategori seperti yang tercantum pada Tabel 48 maka sebagian besar (lebih dari 85%) keluarga pada KK laki-laki maupun perempuan cukup berharap terhadap kelangsungan SLT. Untuk keluarga yang tidak berharap lebih banyak pada KK perempuan (12.5%) dibanidngkan KK laki-laki (9.8%). Sementara yang sangat berharap hanya ditemukan pada keluarga dengan KK laki-laki.

Tabel 48. Sebaran Responden Berdasarkan Kategori Harapan Terhadap Kelangsungan SLT

Kategori	KK Laki-laki		KK Perempuan	
	n	%	n	%
Tidak berharap (8-13)	11	9.8	7	12.5
Cukup berharap (14-19)	99	88.4	49	87.5
Sangat berharap (20-24)	2	1.8	0	0.0
Total	112	100.0	56	100.0

PEMBAHASAN UMUM

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar setengah dari jumlah rumahtangga miskin dinyatakan salah sasaran atau tidak layak mendapatkan dana SLT. Rumahtangga contoh yang memenuhi 9 kriteria atau lebih dari aturan yang ditetapkan oleh BPS (2005) hanya sebesar 45 persen saja. Selama observasi di tempat tinggal keluarga contoh dalam rangka verifikasi kriteria kemiskinan, ditemui beberapa aset seperti sepeda motor, audio visual, dan rumah yang cukup baik dan nyaman. Memang secara visual, terlihat bahwa ada sebagian dari responden yang seharusnya tidak layak untuk menerima dana SLT. Namun demikian, kalau ditinjau dari sudut besarnya pendapatan yang diperoleh, rata-rata pendapatan keluarga contoh per bulan sebagian besar (75%) di bawah Rp 750.000,- untuk KK laki-laki dan di bawah Rp 500.000,- untuk KK perempuan. Apalagi kalau dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan, maka sebanyak 60 persen keluarga contoh berada di bawah Rp 100.000,- atau di bawah garis kemiskinan, yaitu untuk Kota Bogor Rp 133.803 per kapita per bulan dan Kabupaten Bogor Rp 105 588 per kapita per bulan (Garis Kemiskinan tahun 2003).

Program SLT dirasakan banyak manfaatnya bagi keluarga miskin. Hal ini terlihat dari aliran dana SLT sejumlah Rp 300.000 yang diterima oleh responden. Berdasarkan " *Flow of resources to and from the household*", diketahui bahwa sekitar setengah dari jumlah dana SLT diprioritaskan untuk kebutuhan pangan pokok (sesuai dengan tahapan kebutuhan Maslow). Selanjutnya, kurang dari sepertiganya dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan rokok. Bahkan sebagian lagi dialokasikan untuk membayar hutang atau untuk modal usaha. Sayangnya, dana SLT yang diperuntukkan untuk modal usaha adalah sangat kecil, yaitu kurang dari lima persen. Sepertinya keluarga contoh memang sangat terbatas sumberdaya keuangannya, sehingga dana SLT ini langsung dialokasikan untuk kebutuhan pokok saja. Hal ini juga terbukti apabila dilihat dari jangka waktu lamanya dana SLT habis, yaitu kurang dari seminggu. Gambar 3 menunjukkan analisa Analisa *Flow of resources to and from the household*" bagi Rumahtangga Miskin Penerima SLT.

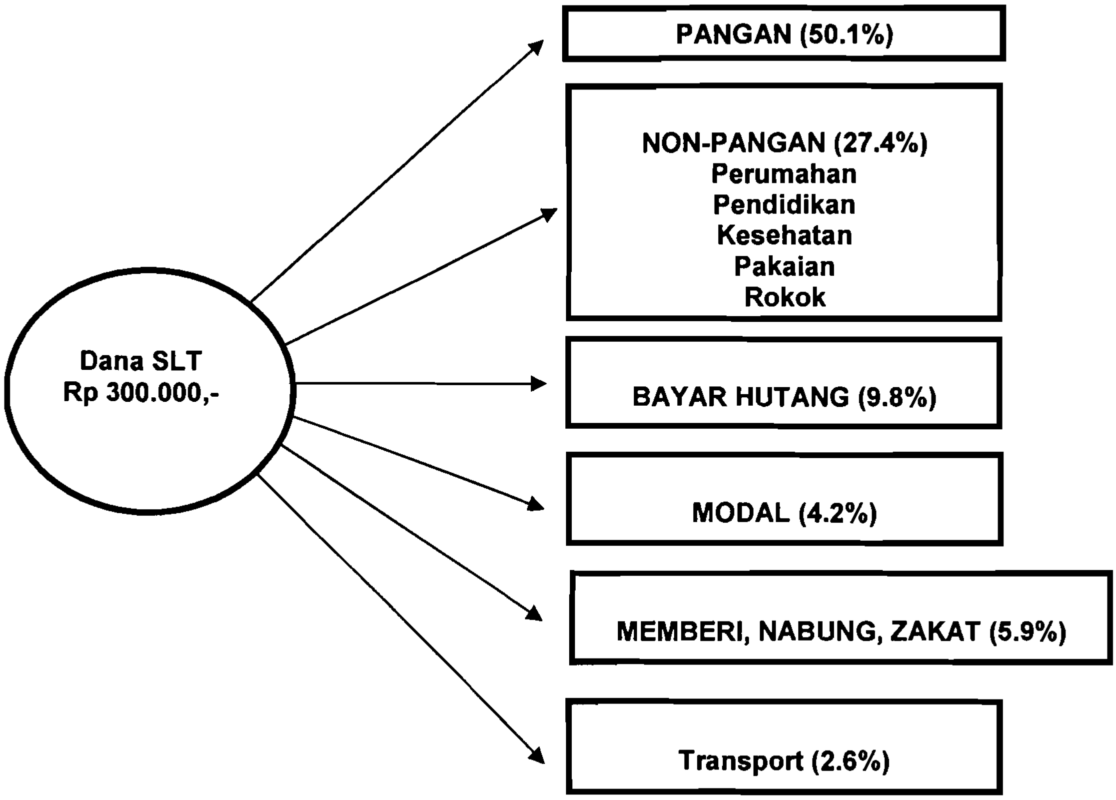

Gambar 18. Analisa *Flow of resources to and from the household"* bagi Rumahtangga Miskin Penerima SLT

Apabila dilihat dari pemrakarsa dalam melakukan *coping strategy* atau kiat-kiat dalam mengatasi kesulitan hidup, maka terbukti bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka keterlibatan istri saja yang mempunyai prakarsa dalam survival strategy adalah kurang dari setengah jumlah contoh, sedangkan keterlibatan bersama antara istri dan suami adalah sekitar setengahnya. Adapun keterlibatan suami saja dalam berprakarsa agar keluarganya tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya hanya kurang dari lima persen saja. Dengan demikian membuktikan bahwa peran perempuan dalam bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup sehari-hari adalah sangat dominan dan penting.

Masalah terbesar yang diakui oleh keluarga contoh adalah berujung dari masalah ekonomi. Oleh karena itu strategi pemecahan yang dilakukan terdiri atas dua cara. Strategi pertama dilakukan dengan cara berhemat atau mengurangi pengaluaran-pengeluaran untuk biaya pangan, transport, dan kesehatan, atau dengan cara mensubstitusi penggunaan bahan baker untuk memasak dari minyak tanah ke kayu baker yang lebih murah. Strategi kedua adalah dengan cara menambah jumlah ketersediaan sumberdaya keluarga dengan cara bekerja lembur, menjual asset, menggadaikan barang, atau berhutang. Gambar 4 menunjukkan analisa Analisa "*Coping Strategy*" pada rumahtangga miskin.

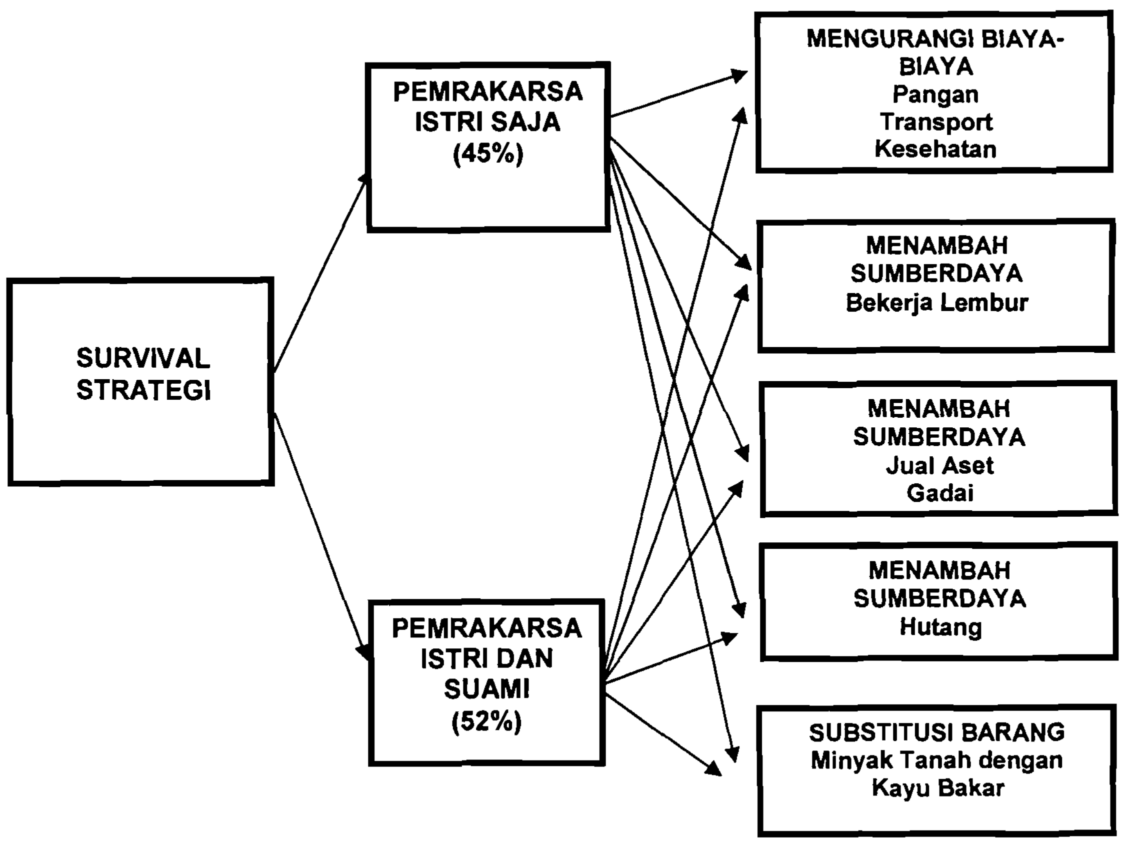

Gambar 19. Analisa "*Coping Strategy*" pada Rumahtangga Miskin

Analisa berikutnya adalah analisa gender (*Intra-household gender analysis*) di dalam rumahtangga yang berkaitan dengan pemberian SLT. Konsisten dengan hasil sebelumnya bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran perempuan sangat dominan dan penting dalam bertanggung jawab mengenai kelangsungan hidup keluarga sehari-hari di sektor manajemen kegiatan domestik rumahtangga.

Berdasarkan analisa SEAGA (*Socio Economic and Gender Analysis*) terhadap manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi rumahtangga miskin, maka diketahui bahwa pada tingkat mikro/field analysis, peran perempuan dan laki-laki di dalam rumahtangga adalah setara. Memang telah dibuktikan bahwa peran perempuan atau istri lebih dominan dalam pembagian kerja pada aktivitas domestik, pengaturan uang SLT, mengatur uang keluarga, menyediakan makanan. Sedangkan peran suami atau laki-laki lebih bertanggung jawab pada aktivitas publik/ ekonomi. Namun demikian, ditemukan bukti bahwa ada join peran antara laki-laki dan perempuan yang seimbang di dalam pembagian peran di dalam keluarga, yaitu bersama-sama bertanggung jawab pada pengasuhan dan pendidikan anak.

Pada tingkat meso atau tingkat masyayarakat (*community level*), dampak dana BLT dapat dinikmati atau benefited baik bagi laki-laki maupun perempuan. Telah dibuktikan bahwa laki-laki dan perempuan bersama-sama mempunyai akses, kontrol dan benefit dari Program SLT. Secara Ekonomi baik KK laki-laki maupun KK perempuan mendapatkan tambahan dana segar untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Secara sosial baik laki-laki maupun perempuan dapat berinteraksi dengan lebih baik setelah mendapatkan dana SLT, dan secara mental merasa tingkat stresnya menurun sesaat setelah mendapatkan dana SLT.

Pada tingkat meso atau tingkat masyayarakat (*community level*), baik laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan dan bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. *Social capital* yang ada di tingkat desa dan kecamatan mendapatkan respon positif dari para keluarga miskin, baik KK laki-laki maupun KK perempuan, terutama kegiatan sosial dan keagamaan. Gambar 5 berikut ini menyajikan analisa SEAGA (Socio Economic and Gender Analysis) dalam mengetahui manfaat Program SLT.

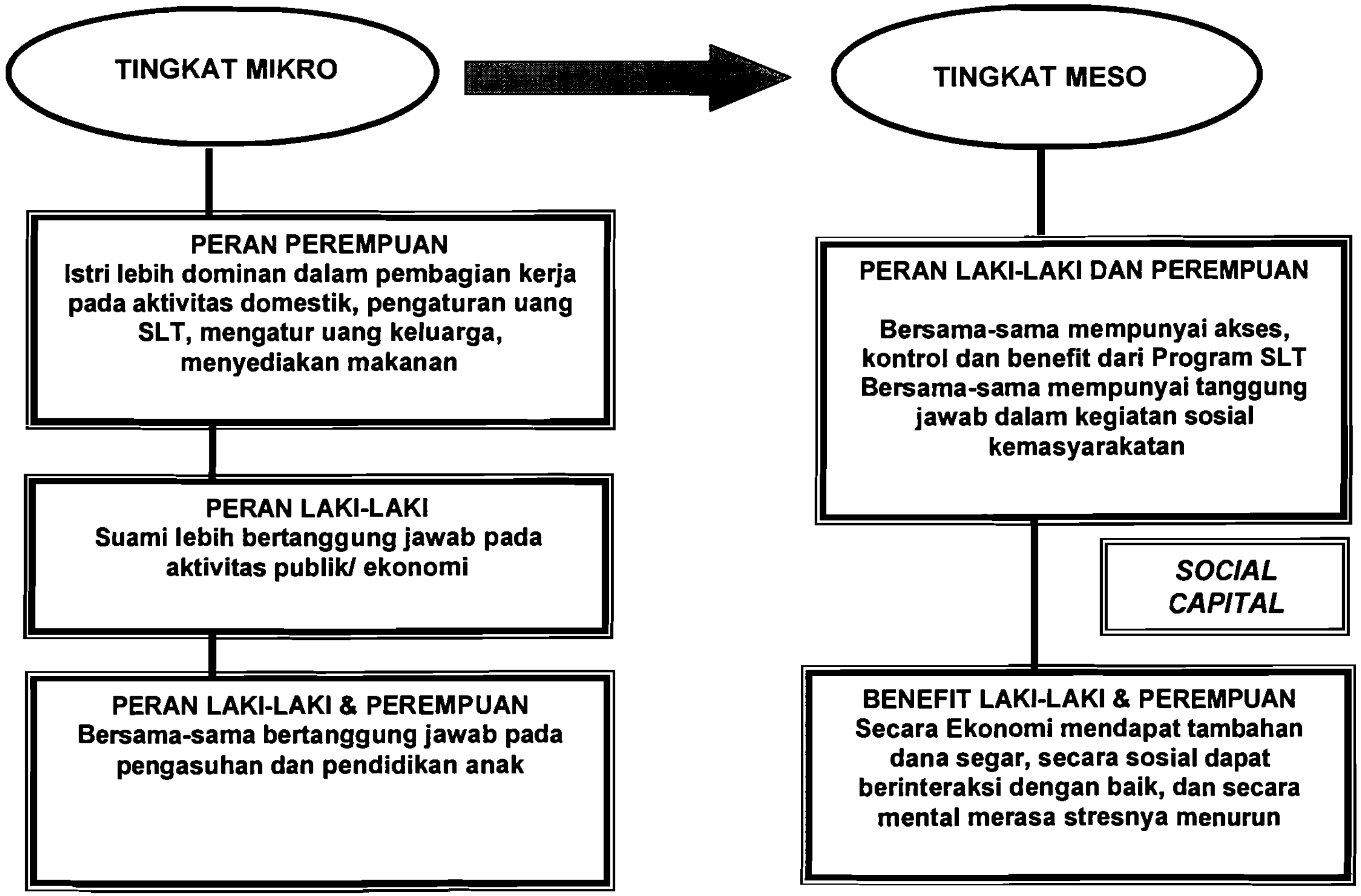

Gambar 20. Analisa SEAGA (Socio Economic and Gender Analysis) dalam mengetahui manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi Rumahtangga Miskin

Berdasarkan analisa *benefit cost rasio* terhadap program SLT bagi keluarga miskin di Kota/Kabupaten Bogor, maka diketahui bahwa social cost yang harus ditanggung baik oleh unit keluarga/ rumahtangga dan oleh Negara dalam jangka panjang adalah lebih lesar dari pada benefit sesaat yang dirasakan oleh keluarga miskin. *Lesson learn* dari Program SLT berdasarkan *Benefit Cost Rasio* terhadap Pemberdayaan Masyarakat diuraikan sebagai berikut.

Benefit yang dirasakan oleh keluarga miskin di Kota/Kabupaten Bogor adalah bahwa keluarga merasakan manfaat dana segar SLT; secara mental, stres keluarga terkurangi; dana dapat digunakan untuk keperluan pangan, perumahan, pendidikan, keseharan, membayar hutang, modal, memberi saudara/anak, zakat, dll; dan perempuan merasa beban beratnya berkurang, serta SLT dapat meningkatkan interaksi antar anggota keluarga (*intra-family*) dan antar keluarga (*inter-families*). Namun biaya social yang harus ditanggung dari sisi mikro pihak keluarga miskin adalah Pemberian SLT dalam jangka waktu yang lama akan melemahkan motivasi bekerja dan menurunkan kreativitas dalam melakukan survival strategies dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan biaya social yang harus ditanggung dari sisi makro pihak Negara RI adalah bahwa dana SLT berasal dari hutang luar negeri yang harus dibayar dalam jangka waktu panjang sehingga dapat menjadikan negara kita *dependent* terhadap hutang luar negeri.

Dengan demikian telah dibuktikan bahwa benefit yang dirasakan oleh keluarga hanya sesaat saja, yaitu kurang dari waktu seminggu dana SLT sudah habis, sedangkan setelah seminggu keluarga penerima SLT kembali miskin. Meskipun para responden menginginkan adanya Program SLT ini diberikan selamanya (karena menurut keluarga miskin sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari), namun mengingat benefit yang dirasakan hanya sesaat, sedangkan biaya social dan biaya ekonomi hutang luar negeri yang ditanggung oleh seluruh Bangsa Indonesia adalah dalam jangka waktu panjang, maka penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bantuan SLT diberikan dalam bentuk lain, misalnya dikaitkan dengan human investment, seperti modal kerja berkelompok atau disalurkan ke keluarga miskin melalui institusi pendidikan dasar,
2. Untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya golongan *handicapp* disalurkan melalui balai latihan kerja khusus,

3. Untuk kelompok lanjut usia dan masyarakat tertinggal disalurkan melalui Departemen Sosial,
4. Untuk kelompok anak yatim disalurkan melalui Departemen Sosial.

Secara rinci Gambar 6 menyajikan *lesson learn* dari Program SLT berdasarkan *Benefit Cost Rasio* terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Jadi penelitian ini merekomendasikan agar pemberian subsidi untuk rakyat harus dipaketkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, baik berkaitan dengan human investment atau aktivitas ekonomi, agar uang yang disalurkan ke rakyat dapat mempunyai *multiplier effect* di kemudian hari.

ANALISA BENEFIT COST RASIO PROGRAM SLT BAGI KELUARGA MISKIN DI KOTA BOGOR

BENEFIT

Keluarga merasakan manfaat dana segar SLT
Secara mental, stres keluarga terkurangi
Dana dapat digunakan untuk keperluan pangan, perumahan, pendidikan, keseharan, membayar hutang, modal, memberi saudara/anak, zakat, dll
Perempuan merasa beban beratnya berkurang
SLT dapat meningkatkan interaksi antar anggota keluarga (intra-family) dan antar keluarga (inter-families)

COST

Pemberian SLT dalam jangka waktu yang lama akan melemahkan motivasi bekerja dan menurunkan kreativitas dalam melakukan survival strategies dalam memenuhi kebutuhan keluarga
Dana SLT yang berasal dari hutang luar negeri harus dibayar dalam jangka waktu panjang sehingga menjadikan negara kita dependent terhadap hutang luar negeri, dalam waktu seminggu saia dana SLT sudah habis dan keluarga kembali miskin

REKOMENDASI

Bantuan SLT diberikan dalam bentuk lain, misalnya dikaitkan dengan human investment, seperti modal kerja berkelompok atau disalurkan ke keluarga miskin melalui institusi pendidikan dasar
Untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya golongan *handicapp* disalurkan melalui balai latihan kerja khusus
Untuk kelompok lanjut usia dan masyarakat tertinggal disalurkan melalui Departemen Sosial
Untuk kelompok anak yatim disalurkan melalui Departemen Sosial

Gambar 21. Lesson Learn dari Program SLT berdasarkan Benefit Cost Rasio terhadap Pemberdayaan Masyarakat

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar setengah dari jumlah rumahtangga miskin dinyatakan salah sasaran atau tidak layak mendapatkan dana SLT. Rumahtangga contoh yang memenuhi 9 kriteria atau lebih dari aturan yang ditetapkan oleh BPS (2005) hanya sebesar 45 persen saja. Namun demikian, kalau ditinjau dari sudut besarnya pendapatan yang diperoleh, rata-rata pendapatan keluarga contoh per bulan sebagian besar (75%) di bawah Rp 750.000,- untuk KK laki-laki dan di bawah Rp 500.000,- untuk KK perempuan. Apalagi kalau dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan, maka sebanyak 60 persen keluarga contoh berada di bawah Rp 100.000,- atau di bawah garis kemiskinan, yaitu untuk Kota Bogor Rp 133.803 per kapita per bulan dan Kabupaten Bogor Rp 105 588 per kapita per bulan (Garis Kemiskinan tahun 2003).

Program SLT dirasakan banyak manfaatnya bagi keluarga miskin. Hal ini terlihat dari aliran dana SLT sejumlah Rp 300.000 yang diterima oleh responden. Berdasarkan " *Flow of resources to and from the household*", diketahui bahwa sekitar setengah dari jumlah dana SLT diprioritaskan untuk kebutuhan pangan pokok (sesuai dengan tahapan kebutuhan Maslow). Selanjutnya, kurang dari sepertiganya dialokasikan untuk kebutuhan non-pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan rokok. Bahkan sebagian lagi dialokasikan untuk membayar hutang atau untuk modal usaha. Sayangnya, dana SLT yang diperuntukkan untuk modal usaha adalah sangat kecil, yaitu kurang dari lima persen. Sepertinya keluarga contoh memang sangat terbatas sumberdaya keuangannya, sehingga dana SLT ini langsung dialokasikan untuk kebutuhan pokok saja. Hal ini juga terbukti apabila dilihat dari jangka waktu lamanya dana SLT habis, yaitu kurang dari seminggu.

Apabila dilihat dari pemrakarsa dalam melakukan *coping strategy* atau kiat-kiat dalam mengatasi kesulitan hidup, maka terbukti bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut, maka keterlibatan istri saja yang mempunyai prakarsa dalam *survival strategy* adalah kurang dari setengah jumlah contoh, sedangkan keterlibatan bersama antara istri dan suami adalah sekitar setengahnya. Adapun keterlibatan suami saja dalam berprakarsa agar keluarganya tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya hanya kurang dari lima persen saja. Dengan demikian membuktikan bahwa peran perempuan dalam bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup sehari-hari adalah sangat dominan dan penting.

Masalah terbesar yang diakui oleh keluarga contoh adalah berujung dari masalah ekonomi. Oleh karena itu strategi pemecahan yang dilakukan terdiri atas dua cara. Strategi pertama dilakukan dengan cara berhemat atau mengurangi pengaluaran-pengeluaran untuk biaya pangan, transport, dan kesehatan, atau dengan cara mensubstitusi penggunaan bahan baker untuk memasak dari minyak tanah ke kayu baker yang lebih murah. Strategi kedua adalah dengan cara menambah jumlah ketersediaan sumberdaya keluarga dengan cara bekerja lembur, menjual asset, menggadaikan barang, atau berhutang.

Analisa berikutnya adalah analisa gender (*Intra-household gender analysis*) di dalam rumahtangga yang berkaitan dengan pemberian SLT. Konsisten dengan hasil sebelumnya bahwa perempuan berperan sangat aktif dalam mencari ide dan melaksanakan ide tersebut demi agar keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran perempuan sangat dominan dan penting dalam bertanggung jawab mengenai kelangsungan hidup keluarga sehari-hari di sektor manajemen kegiatan domestik rumahtangga.

Berdasarkan analisa SEAGA (*Socio Economic and Gender Analysis*) terhadap manfaat Program Pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT) bagi rumahtangga miskin, maka diketahui bahwa pada tingkat mikro/field analysis, peran perempuan dan laki-laki di dalam rumahtangga adalah setara. Memang telah dibuktikan bahwa peran perempuan atau istri lebih dominan dalam pembagian kerja pada aktivitas domestik, pengaturan uang SLT, mengatur uang keluarga, menyediakan makanan. Sedangkan peran suami atau laki-laki lebih bertanggung jawab pada aktivitas publik/ ekonomi. Namun demikian, ditemukan bukti bahwa ada join peran antara laki-laki dan perempuan yang seimbang di dalam pembagian peran di dalam keluarga, yaitu bersama-sama bertanggung jawab pada pengasuhan dan pendidikan anak.

Pada tingkat meso atau tingkat masyayarakat (*community level*), dampak dana BLT dapat dinikmati atau benefited baik bagi laki-laki maupun perempuan. Telah dibuktikan bahwa laki-laki dan perempuan bersama-sama mempunyai akses, kontrol dan benefit dari Program SLT. Secara Ekonomi baik KK laki-laki maupun KK perempuan mendapatkan tambahan dana segar untuk keperluan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Secara sosial baik laki-laki maupun perempuan dapat berinteraksi dengan lebih baik setelah mendapatkan dana SLT, dan secara mental merasa tingkat stresnya menurun sesaat setelah mendapatkan dana SLT.

Pada tingkat meso atau tingkat masyayarakat (*community level*), baik laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan dan bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. *Social capital* yang ada di tingkat desa dan kecamatan mendapatkan respon positif dari para keluarga miskin, baik KK laki-laki maupun KK perempuan, terutama kegiatan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan analisa *benefit cost rasio* terhadap program SLT bagi keluarga miskin di Kota/Kabupaten Bogor, maka diketahui bahwa *social cost* yang harus ditanggung baik oleh unit keluarga/ rumahtangga dan oleh Negara dalam jangka panjang adalah lebih lesar dari pada benefit sesaat yang dirasakan oleh keluarga miskin. Lesson Learn dari Program SLT berdasarkan *Benefit Cost Rasio* terhadap Pemberdayaan Masyarakat diuraikan sebagai berikut.

Benefit yang dirasakan oleh keluarga miskin di Kota/Kabupaten Bogor adalah bahwa keluarga merasakan manfaat dana segar SLT; secara mental, stres keluarga terkurangi; dana dapat digunakan untuk keperluan pangan, perumahan, pendidikan, keseharan, membayar hutang, modal, memberi saudara/anak, zakat, dll; dan perempuan merasa beban beratnya berkurang, serta SLT dapat meningkatkan interaksi antar anggota keluarga (*intra-family*) dan antar keluarga (*inter-families*). Namun biaya social yang harus ditanggung dari sisi mikro pihak keluarga miskin adalah Pemberian SLT dalam jangka waktu yang lama akan melemahkan motivasi bekerja dan menurunkan kreativitas dalam melakukan survival strategies dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan biaya sosial yang harus ditanggung dari sisi makro pihak Negara RI adalah bahwa dana SLT berasal dari hutang luar negeri yang harus dibayar dalam jangka waktu panjang sehingga dapat menjadikan negara kita *dependent* terhadap hutang luar negeri.

Dengan demikian telah dibuktikan bahwa benefit yang dirasakan oleh keluarga hanya sesaat saja, yaitu kurang dari waktu seminggu dana SLT sudah habis, sedangkan setelah seminggu keluarga penerima SLT kembali miskin.

Rekomendasi

Meskipun para responden menginginkan adanya Program SLT ini diberikan selamanya (karena menurut keluarga miskin sangat membantu dalam mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari), namun mengingat benefit yang dirasakan hanya sesaat, sedangkan biaya social dan biaya ekonomi hutang luar negeri yang ditanggung oleh seluruh Bangsa Indonesia adalah dalam jangka waktu panjang, maka penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bantuan SLT diberikan dalam bentuk lain, misalnya dikaitkan dengan human investment, seperti modal kerja berkelompok atau disalurkan ke keluarga miskin melalui institusi pendidikan dasar,
2. Untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya golongan *handicapp* disalurkan melalui balai latihan kerja khusus,
3. Untuk kelompok lanjut usia dan masyarakat tertinggal disalurkan melalui Departemen Sosial,
4. Untuk kelompok anak yatim disalurkan melalui Departemen Sosial.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemberian subsidi untuk rakyat harus dipaketkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, baik berkaitan dengan human investment atau aktivitas ekonomi, agar uang yang disalurkan ke rakyat dapat mempunyai *multiplier effect* di kemudian hari.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Primer dan Sekunder Penelitian Berdasarkan Sumber dan Alat serta Cara Pengukurannya

Jenis Data	Data	Jenis Pertanyaan	Responden	Alat dan Cara Pengukuran
Sekunder	Jumlah keluarga miskin, jumlah keluarga penerima SLT BBM, data monograf dan potensi desa	-	BPS, Kantor Pos Pusat Bogor, Staf Kelurahan	Dokumentasi dan Buku
Primer	Karakteristik Keluarga	Jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan anggota keluarga	186 Keluarga	Kuesioner dan wawancara
	Verifikasi Kriteria Rumah Tangga Miskin	Luas bangunan tempat tinggal, Jenis lantai bangunan, Jenis dinding bangunan, Fasilitas jamban/kakus, Sumber penerangan utama, Sumber air minum, Jenis bahan bakar untuk masak, Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu, Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun, Frekuensi makan dalam sehari, Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik, Lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan utama kepala rumah tangga, Pendidikan kepala rumah tangga dan Kepemilikan asset liquid (minimum Rp.500 ribu).	186 Keluarga (14 item)	Kuesioner, wawancara dan pengamatan
	Pendapatan Keluarga	Pendapatan total keluarga/bulan	186 Keluarga	Kuesioner dan wawancara
	Pengeluaran Keluarga	Rata-rata Pengeluaran untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transport dll tiap bulannya.	186 Keluarga	Kuesioner dan wawancara
	Permasalahan Keluarga	Permasalahan sebelum dan setelah kenaikan BBM	186 Keluarga (13 item)	Kuesioner dan wawancara
	Alur Pembelanjaan Uang SLT	1. Alokasi pengeluaran dana Rp.300.000 2. Masa habisnya uang SLT 3. Penerimaan uang SLT	186 Keluarga	Kuesioner dan wawancara
	Pembagian Tugas Suami Istri	1. Pengelolaan uang SLT 2. Pekerjaan publik 3. Pekerjaan domestik 4. Manajemen keuangan keluarga 5. Kehidupan sosial	186 Keluarga (12 item)	Kuesioner dan wawancara
	Frekuensi Pangan	Sebeluan dan setelah kenaikan harga BBM	186 Keluarga (15 item)	Kuesioner dan wawancara
	Penerimaan Keluarga	Pendapatan keluarga, Pengeluaran pangan&non pangan, kuallitas hubungan dalam keluarga, konflik, jumlah asset keluarga, kualitas pendidikan, dll.	186 Keluarga (13 item)	Kuesioner dan wawancara

Lampiran 1 (Lanjutan)

Jenis Data	Data	Jenis Pertanyaan	Responden	Alat dan Cara Pengukuran
	Survival Strategy Keluarga	Sebeluan dan setelah kenaikan harga BBM	186 Keluarga (10 item)	Kuesioner dan wawancara
	Manfaat SLT	Sebeluan dan setelah kenaikan harga BBM	186 Keluarga (9 item)	Kuesioner dan wawancara
	Tingkat Kepuasan Keluarga	Keadaan kehidupan keluarga, gaya manajemen sumberdaya, komunikasi dll	186 Keluarga (20 item)	Kuesioner dan wawancara
	Harapan akan SLT	Pemberian SLT	186 Keluarga (8 item)	Kuesioner dan wawancara

Lampiran 2. Pengkodean Variable-variabel Penelitian

Variabel	Jenis Pertanyaan	Kode Variabel	Jumlah Item	Skala Likert
Karakteristik Keluarga	1. Jenis kelamin 2. umur, 3. pendidikan terakhir 4. pekerjaan anggota keluarga	1. KKJK, ISJK, A1JK, A2JK 2. KKUMR, ISUMR, A1UMR, A2UMR 3. KKDIK, ISDIK, A1DIK, A2DIK 4. KKPEK, ISPEK, A1PEK,A2PEK	4	-
Verifikasi Kriteria Rumah Tangga Miskin	Luas bangunan tempat tinggal, Jenis lantai bangunan, Jenis dinding bangunan, Fasilitas jamban/kakus, Sumber penerangan utama, Sumber air minum, Jenis bahan bakar untuk masak, Kemampuan membeli daging/ ayam/ susu dalam seminggu, Kemampuan membeli pakaian baru dalam setahun, Frekuensi makan dalam sehari, Kemampuan berobat ke puskemas/poliklinik, Lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan utama kepala rumah tangga, Pendidikan kepala rumah tangga dan Kepemilikan asset liquid (minimum Rp.500 ribu).	V201 – V214	14	1 = Tidak 2 = Ya
Pendapatan Keluarga	Pendapatan total keluarga/bulan : 1. Utama (kepala keluarga, istri dan anak) 2. Sampingan (kepala keluarga, istri dan anak) 3. Hutang 4. Bantuan	1. KKU, ISU, ANU 2. KKS, ISS, ANS 3. HUT 4. BAN	-	-
Pengeluaran Keluarga	Rata-rata Pengeluaran tiap bulannya untuk : 1. pakaian 2. pangan pokok, lauk pauk, sayur, jajan, rokok 3. pendidikan 4. kesehatan 5. transport	1. PAKB 2. PANGB,LAUKB, SAYURB, JAJANB, ROKOKB 3. DIDIKB 4. KESB 5. TRANSB	-	-
Permasalahan Keluarga	Permasalahan sebelum dan setelah kenaikan BBM : 1. sebelum kenaikan BBM 2. setelah kenaikan BBM	1. V501SB – V513SB 2. V501SD – V513SD	13	1. 1 = Tidak 2. 2 = Ya
Alur Pembelanjaan Uang SLT	1. Alokasi pengeluaran dana Rp.300.000 2. Masa habisnya uang SLT 3. Siapa yang menerima uang SLT 4. Apakah suami menyerahkan ke istri 5. Berapa yang diserahkan ke istri 6. Proses dan Konflik	1. 6PANG, 6RUMAH, 6DIDIK dll 2. V6LAMA 3. V6SIAPA 4. V6ISTRI 5. V6RPIS 6. -	-	1. - 2. - 3. 1=Bapak, 2=Ibu 4. 1=Tidak, 2=Ya 5. – 6. -

Variabel	Jenis Pertanyaan	Kode Variabel	Jumlah Item	Skala Likert
Pembagian Tugas Suami Istri		V701 – V712	12	1= Suami 2= Istri dan Suami 3= Istri
Frekuensi Pangan	1. Sebeluan kenaikan harga BBM 2. Setelah kenaikan harga BBM	1. V801SB – V815SB 2. V801SD – V815SD	15 15	1= setiap hari 2= 4-6 kali/mggu 3= 1-3 kali/mggu 4= 1-3 kali/bulan 5= lebih dari sebulan 6= tidak pernah

Variabel	Jenis Pertanyaan	Kode Variabel	Jumlah Item	Skala Likert
Penerimaan Keluarga	1. Pendapatan Total Keluarga 2. Pengeluaran pangan Keluarga 3. Pengeluaran non pangan keluarga 4. Jumlah Makanan Keluarga 5. Kualitas Hubungan dalam Keluarga 6. Jumlah Tabungan Keluarga 7. Konflik/pertengkaran dalam Keluarga 8. Kekerasan dalam rumahtangga 9. Kualitas Pendidikan anak 10. Kualitas Kesehatan keluarga 11. Hubungan sosial dengan tetangga 12. Kualitas pekerjaan 13. Jumlah penguasaan aset (JUAL, GADAI)	1. V901 2. V902 3. V903 4. V904 5. V905 6. V906 7. V907 8. V908 9. V909 10. V910 11. V911 12. V912 13. V913	13	Untuk V 901-V906 dan V909-V913 : 1=tdk ada, 2=turun 3=tetap 4=naik Untuk V907 dan V908 : 1=naik 2=tetap 3=turun 4=tidak ada
Survival Strategy Keluarga	1. Pemrakarsa	1. V10P01 – V10P10	10	1. 1=suami 2=istri&suami 3=istri
	2. Sebeluan kenaikan harga BBM	2. VSTRSB01 – VSTRSB10	10	2. 1=tidak, 2=Ya
	3. Setelah kenaikan harga BBM	3. VSTRSD01 – VSTRSD10	10	3. 1=tidak, 2=Ya
Manfaat SLT	Tingkat manfaat SLT bagi keluarga	VMAN01 – VMAN09	9	1= tidak ada/sedikit 2= cukup 3= tinggi
Tingkat Kepuasan Keluarga	Keadaan kehidupan keluarga, gaya manajemen sumberdaya, komunikasi dll	OUT01 – OUT20	20	1= tidak puas 2= cukup puas 3= puas sekali
Harapan akan SLT	Pemberian SLT	HAR1 – HAR8	8	1= tidak setuju 2= setuju 3= sangat setuju

Lampiran 3. Sebaran Keluarga Berdasarkan Permasalahan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM (Oktober 2005)

No	Pernyataan	KK Laki-laki								KK Perempuan							
		Sebelum				Sesudah				Sebelum				Sesudah			
		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
		%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	Masalah Ketersediaan Makanan	34	30.4	78	69.6	74	66.1	38	33.9	20	35.7	36	64.3	38	67.9	18	32.1
2	Kesulitan keuangan keluarga	67	59.8	45	40.2	98	87.5	14	12.5	40	71.4	16	28.6	52	92.9	4	7.1
3	Masalah pekerjaan yang tidak menentu	53	47.3	59	52.7	67	59.8	45	40.2	23	41.1	33	58.9	28	50.0	28	50.0
4	Masalah jaminan pendidikan anak	40	35.7	72	64.3	51	45.5	61	54.5	13	23.2	43	76.8	17	30.4	39	69.6
5	Masalah kesehatan keluarga	33	29.5	79	70.5	49	43.8	63	56.3	13	23.2	43	76.8	22	39.3	34	60.7
6	Masalah hubungan/ konflik dalam keluarga	17	15.2	95	84.8	22	19.6	90	80.4	4	7.1	52	92.9	11	19.6	45	80.4
7	Masalah hubungan/ konflik dengan tetangga	6	5.4	106	94.6	6	5.4	106	94.6	1	1.8	55	98.2	1	1.8	55	98.2
8	Masalah minimnya tempat tinggal	37	33.0	75	67.0	39	34.8	73	65.2	13	23.2	43	76.8	17	30.4	39	69.6
9	Masalah minimnya aset keluarga	58	51.8	54	48.2	60	53.6	52	46.4	30	53.6	26	46.4	32	57.1	24	42.9
10	Masalah suami tdk punya pekerjaan tetap	48	42.9	64	57.1	62	55.4	50	44.6	3	5.4	53	94.6	4	7.1	52	92.9
11	Masalah suami merokok tiap hari	42	37.5	70	62.5	50	44.6	62	55.4	4	7.1	52	92.9	4	7.1	52	92.9
12	Masalah pembagian tugas suami istri	23	20.5	89	79.5	25	22.3	87	77.7	3	5.4	53	94.6	3	5.4	53	94.6
13	Masalah beban pekerjaan istri yg berat	28	25.0	84	75.0	37	33.0	75	67.0	17	30.4	39	69.6	24	42.9	32	57.1

Lampiran 4. Sebaran Keluarga Berdasarkan Pembagian Tugas Suami Dan Istri Dalam Keluarga

NO	PERNYATAAN	KK Laki-laki						KK Perempuan					
		ISTRI		I+S		SUAMI		ISTRI		I+S		SUAMI	
		n	%	n	n	%	n	%	n	%	%	n	%
1	Memutuskan utk membelanjakan uang SLT	72	64.3	29	25.9	11	9.8	55	98.2	0	0.0	1	1.8
2	Mengelola uang SLT	69	61.6	30	26.8	13	11.6	54	96.4	1	1.8	1	1.8
3	Merencanakan keuangan keluarga	70	62.5	32	28.6	10	8.9	53	94.6	1	1.8	2	3.6
4	Memegang/ mengatur keuangan keluarga	86	76.8	14	12.5	12	10.7	53	94.6	0	0.0	3	5.4
5	Mengontrol pengeluaran keuangan	74	66.1	17	15.2	21	18.8	52	92.9	2	3.6	2	3.6
6	Mengatur penyediaan makanan keluarga	95	84.8	9	8.0	8	7.1	53	94.6	1	1.8	2	3.6
7	Mengatur kegiatan rumahtangga	78	68.6	26	23.2	8	7.1	53	94.6	2	3.6	1	1.8
8	Mencari jalan pemecahan masalah keuangan	26	23.2	76	67.9	10	8.9	51	91.1	4	7.1	1	1.8
9	Bertanggung jawab pekerjaan domestik	63	56.3	42	37.5	7	6.3	52	92.9	3	5.4	1	1.8
10	Bertanggung jawab pekerjaan publik/ekonomi	15	13.4	56	50.0	41	36.6	48	85.7	6	10.7	2	3.6
11	Bertanggung jawab aktivitas sosial	18	16.1	87	77.7	7	6.3	49	87.5	6	10.7	1	1.8
12	Bertanggung jawab pengasuhan & pendidikan anak	26	23.2	83	74.1	3	2.7	51	91.1	5	8.9	0	0.0

Lampiran 5. Sebaran Keluarga Berdasarkan Perubahan-perubahan yang Dirasakan Antara Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM

PERNYATAAN	KK Laki-laki								KK Perempuan							
	TDK ADA		TURUN		TETAP		NAIK		TDK ADA		TURUN		TETAP		NAIK	
	n	%	n	%	n	%	n	%								
Pendapatan Total Keluarga	5	4.5	58	51.8	42	37.5	7	6.3	2	3.6	29	51.8	23	41.1	2	3.6
Pengeluaran pangan Keluarga	2	1.8	35	31.3	22	19.6	53	47.3	0	0.0	17	30.4	11	19.6	28	50.0
Pengeluaran non pangan keluarga	36	32.1	11	9.8	20	17.9	45	40.2	18	32.1	4	7.1	4	7.1	30	53.6
Jumlah Makanan Keluarga	3	2.7	49	43.8	52	46.4	8	7.1	0	0.0	31	55.4	24	42.9	1	1.8
Kualitas Hubungan dalam Keluarga	5	4.5	4	3.6	92	82.1	11	9.8	2	3.6	1	1.8	48	85.7	5	8.9
Jumlah Tabungan Keluarga	103	92.7	3	2.7	5	4.5	1	0.9	52	92.9	0	0.0	2	3.6	2	3.6
Konflik/pertengkaran dalam Keluarga	6	5.4	21	18.8	4	3.6	81	72.3	0	0.0	6	10.7	0	0.0	50	89.3
Kekerasan dalam rumahtangga	0	0.0	6	5.4	1	0.9	105	93.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8	55	98.2
Kualitas Pendidikan anak	46	41.1	12	10.7	54	48.2	0	0.0	36	64.3	4	7.1	0	0.0	16	28.6
Kualitas Kesehatan keluarga	5	4.5	28	25.0	78	69.6	1	0.9	5	8.9	15	26.8	0	0.0	36	64.3
Hubungan sosial dengan tetangga	3	2.7	1	0.9	84	75.0	24	21.4	3	5.4	1	1.8	39	69.6	13	23.2
Kualitas pekerjaan	4	3.6	54	48.2	51	45.5	3	2.7	13	23.2	21	37.5	22	39.3	0	0.0
Jumlah penguasaan aset (JUAL, GADAI)	48	42.9	18	16.1	45	40.2	1	0.9	28	50.0	11	19.6	17	30.4	0	0.0

Lampiran 6. Sebaran Responden Berdasarkan Survival Strategi Keluarga Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM dan Jenis Kelamin KK

Pernyataan	KK Laki-laki								KK Perempuan							
	Sebelum				Sesudah				Sebelum				Sesudah			
	Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak		Ya		Tidak	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Mengurangi konsumsi pangan	25	22.3	87	77.7	65	58.0	47	42.0	12	21.4	44	78.6	32	57.1	24	42.9
Mengurangi biaya transport dengan naik sepeda/jalan/numpang, dll	19	17.0	93	83.0	58	51.8	54	48.2	9	16.1	47	83.9	22	39.3	34	60.7
Mengurangi biaya kesehatan	13	11.6	99	88.4	21	18.8	91	81.3	4	7.1	52	92.9	9	16.1	47	83.9
Bekerja lembur/tambahan untuk meningkatkan pendapatan	14	12.5	98	87.5	26	23.2	86	76.8	4	7.1	52	92.9	10	17.9	46	82.1
Menjual aset	9	8.0	103	92.0	23	20.5	89	79.5	5	8.9	51	91.1	15	26.8	41	73.2
Menggadaikan barang	3	2.7	109	97.3	2	1.8	110	98.2	3	5.4	53	94.6	2	3.6	54	96.4
Hutang/ meminjam	74	66.1	38	33.9	91	81.3	21	18.8	33	58.9	23	41.1	43	76.8	13	23.2
Mengambil tabungan	0	0.0	112	100	4	3.6	108	96.4	0	0.0	56	100	1	1.8	55	98.2
Mengurangi biaya pendidikan anak (anak putus sekolah/ sering bolos)	2	2.7	109	97.3	11	9.8	101	90.2	7	12.5	49	87.5	9	16.1	47	83.9
Mengganti minyak tanah dengan kayu bakar untuk memasak	16	14.3	96	85.7	41	36.6	71	63.4	5	8.9	51	91.1	19	33.9	37	66.1

Lampiran 7. Sebaran Responden Berdasarkan Manfaat SLT yang Dirasakan Keluarga dan Jenis Kelamin KK

Pernyataan	TINGKAT MANFAAT											
	KK Laki-laki						KK Perempuan					
	TDK ADA/ SEDIKIT		CUKUP		TINGGI		TDK ADA/ SEDIKIT		CUKUP		TINGGI	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Memberi dana segar untuk keluarga	35	31.3	51	45.5	26	23.2	10	17.9	31	55.4	15	26.8
Untuk membeli kebutuhan sembako	22	19.6	67	59.8	23	20.5	10	17.9	36	64.3	10	17.9
Untuk membayar sekolah anak	68	60.7	39	34.8	5	4.5	40	71.4	13	23.2	3	5.4
Untuk membayar hutang	42	37.5	55	49.1	15	13.4	25	44.6	27	48.2	4	7.1
Memberikan ketenangan batin sesaat	5	4.5	79	70.5	28	25.0	0	0.0	37	66.1	19	33.9
Memberikan motivasi hidup sesaat	4	3.6	96	85.7	12	10.7	0	0.0	49	87.5	7	12.5
Menurunkan konflik keluarga	37	33.0	68	60.7	7	6.3	15	26.8	39	69.6	2	3.6
Memberikan kebahagiaan sesaat	3	2.7	87	77.7	22	19.6	0	0.0	42	75.0	14	25.0
Istri merasa beban berat berkurang	19	17.0	75	57.0	18	16.1	4	7.1	47	83.9	5	8.9

Lampiran 8. Sebaran contoh berdasarkan tingkat manfaat SLT

Manfaat	Ibu Bekerja						Ibu Tidak bekerja					
	Tidak Ada/ Sedikit		Cukup		Tinggi		Tidak Ada/ Sedikit		Cukup		Tinggi	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Memberi dana segar untuk keluarga	10	30.3	15	45.5	8	24.2	24	32.4	32	43.2	18	24.3
Untuk membeli kebutuhan sembako	7	21.2	22	66.7	4	12.1	14	18.9	41	55.4	19	25.7
Untuk membayar sekolah anak	17	51.5	13	39.4	3	9.1	48	64.9	24	32.4	2	2.7
Untuk membayar hutang	13	39.4	18	54.5	2	6.1	25	33.8	36	48.6	13	17.6
Memberikan ketenangan batin sesaat	2	6.1	23	69.7	8	24.2	3	4.1	52	70.3	19	25.7
Memberikan motivasi hidup sesaat	1	3.0	63	85.1	8	10.8	1	3.0	29	87.9	3	9.1
Menurunkan konflik keluarga	12	36.4	20	60.6	1	3.0	23	31.1	45	60.8	6	8.1
Memberikan kebahagiaan sesaat	1	3.0	25	75.8	7	21.2	2	2.7	58	78.4	14	18.9
Istri merasa beban berat berkurang	7	21.2	19	57.6	7	21.2	10	13.5	53	71.6	11	14.9

Lampiran 9. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Kepuasan Terhadap Keadaan Kehidupan dan Gaya Manajemen Sumberdaya Anda Saat Ini

Pernyataan	TINGKAT KEPUASAAN											
	KK Laki-laki						KK Perempuan					
	Tidak puas		Cukup puas		Puas sekali		Tidak puas		Cukup puas		Puas sekali	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Keadaan keuangan anda	66	58.9	44	39.3	2	1.8	28	50.0	27	48.2	1	1.8
Keadaan makanan anda	29	25.9	80	71.4	3	2.7	14	25.0	42	75.0	0	0.0
Keadaan tempat tinggal anda	36	32.1	71	63.4	5	4.5	17	30.4	35	62.5	4	7.1
Keadaan materi/aset anda	57	50.9	52	46.4	3	2.7	32	57.1	22	39.3	2	3.6
Keadaan spiritual/mental anda	4	3.6	93	83.0	15	13.4	3	5.4	49	87.5	4	7.1
Keadaan kesehatan fisik anda	20	17.9	81	72.3	11	9.8	17	30.4	34	60.7	5	8.9
Keadaan pendidikan anak anda	30	26.8	78	69.6	4	3.6	22	39.3	34	60.7	0	0.0
Gaya manajemen waktu anda	12	10.7	93	83.0	7	6.3	7	12.5	47	83.9	2	3.6
Gaya manajemen keuangan anda	10	8.9	95	84.8	7	6.3	2	3.6	53	94.6	1	1.8
Gaya manajemen stress anda	13	11.6	91	81.3	8	7.1	12	21.4	44	78.6	0	0.0
Gaya manajemen pekerjaan anda	6	5.4	100	89.3	6	5.4	5	8.9	48	85.7	3	5.4
Hubungan/komunikasi dengan orang tua	3	2.7	73	65.2	36	32.1	3	5.4	37	66.1	16	28.6
Hubungan/komunikasi dengan saudara	4	3.6	71	63.4	37	33.0	3	5.4	36	64.3	17	30.4
Hubungan/komunikasi dengan teman anda	2	1.8	73	65.2	37	33.0	1	1.8	38	67.9	17	30.4
Hubungan/komunikasi dengan tetangga	4	3.6	72	64.3	36	32.1	2	3.6	36	64.3	18	32.1
Optimisme menyongsong masa depan	3	2.7	93	83.0	16	14.3	2	3.6	49	87.5	5	8.9
Manfaat SLT bagi keluarga anda	24	21.4	59	52.7	29	25.9	9	16.1	36	64.3	11	19.6
Besaran uang SLT Rp 100.000/ bulan	46	41.1	52	46.4	14	12.5	20	35.7	31	55.4	5	8.9
Antrian untuk mendapatkan uang SLT	40	35.7	65	58.0	7	6.3	18	32.1	36	64.3	2	3.6
Proses pendataan sebelum mendapatkan SLT termasuk verifikasi kriteria kemiskinan	26	23.2	77	68.8	9	8.0	11	19.6	44	78.6	1	1.8

Lampiran 10. Sebaran Responden Berdasarkan Harapan Terhadap Kelangsungan SLT Ini

Pernyataan	TINGKAT MANFAAT											
	KK Laki-laki						KK Perempuan					
	Tidak Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Tidak Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
SLT diberikan seterusnya, apapun kata orang	8	7.1	18	16.1	86	76.8	4	7.1	8	14.3	44	78.6
SLT dihentikan dalam waktu dekat karena tidak mendidik	90	80.4	22	19.6	0	0.0	52	92.9	4	7.1	0	0.0
SLT diganti dengan bantuan modal tanpa agunan namun harus digunakan untuk modal kerja	39	34.8	51	45.5	22	19.6	34	60.7	18	32.1	4	7.1
Kata orang, SLT membuat orang jadi malas karena tidak mendidik	101	90.2	8	7.1	3	2.7	50	89.3	5	8.9	1	1.8
Jumlah uang SLT pinginnya dinaikkan	2	1.8	21	18.8	89	79.5	0	0.0	8	14.3	48	85.7
SLT diberikan pada pemuda yang masih gagah	107	95.5	3	2.7	2	1.8	55	98.2	1	1.8	0	0.0
SLT diberikan pada janda-janda tua yang memerlukan	1	0.9	27	24.1	84	75.0	1	1.8	9	16.1	46	82.1
SLT diberikan pada anak-anak yatim	1	0.9	38	33.9	73	65.2	1	1.8	11	19.6	44	78.6

DAFTAR PUSTAKA

[Anonim]. 2005a. Dampak Kenaikan BBM Langsung Dirasakan Rakyat Miskin. http://www.uplink.or.id. [09 April 2006].

________ 2005b. Setelah Kenaikan Harga BBM Separuh Warga Jawa Barat Miskin. http://www.pikiran rakyat.com [09 April 2006].

[BPS] Biro Pusat Statistik. 1998. *Profil Wanita Kepala Rumah Tangga.* Jakarta: BPS.

[BKKBN] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1996. *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera.* Jakarta. BKKBN.

Djalil SA. 2005. Latar Belakang dan Kebijaksanaan Mengenai BBM. http://www.depkominfo.co.id [09 April 2006].

Djamal C. 1996. Membantu Suami, Mengurus Rumah Tangga: Perempuan di Sektor Informal. Di dalam Gardiner MO, Wagemann ML, Suleeman E, Sulastri, editor. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm: 232-250.

Hasibuan C, Sedyono. 1996. Perempuan di Sektor Formal. Di dalam Gardiner MO, Wagemann ML, Suleeman E, Sulastri, editor. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm: 212-231.

Hasyim I. 2005. *Siklus Krisis di Sektor Energi.* Jakarta: Proklamasi Publishing House.

Herawaty N. 2000. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Remaja SMU tentang Peran Gender Tradisional (Studi Kasus di SMU Islam Al-Azhar Pusat Jakarta dan SMUN 46 Jakarta). [Skripsi]. Bogor: Program S1 Jurusan Gizi masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB.

Huffman, 1986. Human Resources Research (1887-1987) Proceedings The College of Home Economics Iowa State University, Ames, Iowa.

Guhardja S, Herien P, Hartoyo, Hastuti D. 1992. Manajemen Sumberdaya Keluarga. Diktat yang tidak dipublikasikan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Lestari I. 1984a. Pembagian Pekerjaan dalam Rumah Tangga. Di dalam: Ihroni TO, editor. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda.* Jakarta: FE-UI Pr. hlm: 78-86.

________ 1984b. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga. Di dalam: Ihroni TO, editor. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda.* Jakarta: FE-UI Pr. hlm: 87-101.

Mintoro A, Hardono GS. 1995. Profil Rumah Tangga Miskin di Propinsi Lampung. Di dalam: Hermanto, Pakpahan A, Sawit MH, Taryoto AH, Zulham A, Saliem HP, editor. *Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya.* Buku 2. Jakarta: IPB Pr. hlm: 293-301.

Mudzhar, Alvi SS, Sadli S. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia.* Yogyakarta: Sunan Kalnaga.

Pakpahan A, Hermanto, Taryoto AH. 1995. Metodologi Penelitian Kemiskinan di Pedesaan; Konsepsi dan Aplikasinya. Di dalam: Hermanto, Pakpahan A, Sawit MH, Taryoto AH, Zulham A, Saliem HP, editor. *Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya.* Buku 1. Jakarta: IPB Pr. hlm: 13-24.

Prasetyo AM. 2004. Analisis Gender terhadap Strategi Pertahanan Hidup Keluarga melalui Manajemen Keuangan pada Keluarga Nelayan. [Skripsi]. Bogor: Program S1 Departemen Gizi masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB.

Sajogyo P. 1981. *Peranan Wanita dalam Keluarga, Rumah Tangga dan Masyarakat yang Lebih Luas di Pedesaan Jawa.* Jakarta: UI Pr.

Sugiah S, Mugniesyah, Wigna W, Husaini E. 2002. *Jender dan Perilaku Masyarakat Petani Lahan Kering dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.* Bogor: IPB Pr.

Suhartiningsih W. 2005. Dana Kompensasi BBM dan Jaminan Sosial. http://www.uplink.or.id [09 April 2006].